

**PENGARUH SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN
PERSEPSI WAJIB PAJAK TENTANG
PELAKSANAAN SENSUS PAJAK NASIONAL
TERHADAP KESADARAN WAJIB PAJAK
ORANG PRIBADI**

**(Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi
Di Wilayah Banyuwangi)**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Menempuh Ujian Sarjana
pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya**

HERLAMBAK KURNIAWAN

NIM. 105030400111058



**UNIVERSITAS BRAWIJAYA
FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI
JURUSAN ADMINISTRASI BISNIS
PROGRAM STUDI PERPAJAKAN**

MALANG

2014

*Kupersembahkan Karyaku
Kepada Ayahanda, Ibunda, Adiko-adiku
Dan Seluruh Pengajar
Serta Semua Sahabat-sahabatku*

Motto

*Aku percaya jika hari esok tidak dapat mengubah
apa yang terjadi pada hari ini,*

*Namun dengan merenungkan masa lalu dan
semangat untuk bertindak membuat*

*Aku percaya jika hari ini masih dapat mengubah
apa yang akan terjadi pada hari esok*

(Anonim)

In Action There is Hope

(Hr. Kurniawan)



TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi)

Disusun oleh : Herlambang Kurniawan

NIM : 105030400111058

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Bisnis

Program Studi : Perpajakan

Malang, 24 Juli 2014

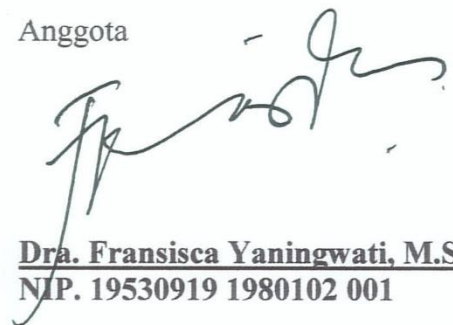
Komisi Pembimbing

Ketua



Dr. Srikandi Kumadji, MS
NIP. 19611110 198601 2 002

Anggota



Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si
NIP. 19530919 1980102 001

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan majelis penguji skripsi, Fakultas Ilmu
Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari : Rabu

Tanggal : 20 Agustus 2014

Jam : 13.00

Skripsi atas nama : Herlambang Kurniawan

Judul : Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak
tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap
Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap
Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi)

Dan dinyatakan lulus

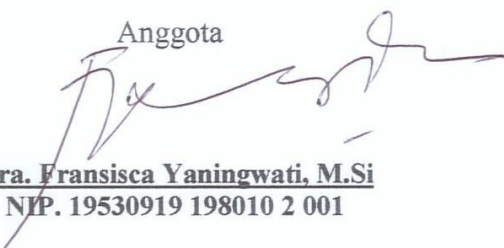
MAJELIS PENGUJI

Ketua



Dr. Srikandi Kumadji, MS
NIP. 19611110 198601 2 002

Anggota



Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si
NIP. 19530919 198010 2 001

Anggota



Dr. Sri Mangesti Rahayu, M.Si
NIP. 19550902 198202 2 001

Anggota



Dra. Maria Goretti Wi Endang NP., M.Si
NIP. 19620422 198701 2 001

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan saya, di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata didalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-perundangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, Pasal 25 ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 25 Juli 2014

Mahasiswa



HERLAMBAK KURNIAWAN
NIM. 105030400111058

RINGKASAN

Kurniawan, Herlambang. 2014. *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi)*. Pembimbing: Dr. Srikandi Kumadji, MS dan Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si. 158 Hal + xv.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama maupun parsial terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

Jenis penelitian adalah eksplanatori dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dengan menggunakan angket. Sampel sebanyak 100 Orang Wajib Pajak (WP OP) yang telah disensus oleh pegawai pajak. Analisis data secara deskriptif dan regresi linier berganda.

Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama memberikan pengaruh sebanyak 59,3% terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Variabel yang lebih dominan mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak adalah Sosialisasi Perpajakan.

Kata Kunci: Sosialisasi Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak, Sensus Pajak Nasional, Kesadaran Wajib Pajak

SUMMARY

Kurniawan, Herlambang. 2014. *The Effect of Socialization of Taxation, and Taxpayer Perception on the Implementation of National Tax Census on Individual Taxpayer Awareness (Survey on Individual Taxpayer at Banyuwangi Tax Office)*. Advisors: Dr. Srikandi Kumadji, MS dan Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si. 158 Pages + xv.

The purpose of this research is to find the effect of between the Socialization of Taxation and Taxpayer Perception on the Implementation of National Tax Census simultaneously and partially on Individual Taxpayer Awareness.

The type of research is eksplanatory with the quantitative approach. The data collection method use form of questionnaire. Samples of 100 Individual Taxpayer has been recorded in the census by tax officer. The data analysis is descriptive and multiple linear regression.

The results of research showed Socialization of taxation and taxpayer perception on the implementation of the National Tax Census simultaneously effect significantly on Taxpayer Awareness. Socialization of Taxation partially effect significantly on Taxpayer Awareness. Taxpayer Perception on the Implementation of the National Tax Census partially effect significantly on Taxpayer Awareness. The results test of determination coefficient showed that Socialization of Taxation, and Taxpayer Perception on the Implementation of the National Tax Census simultaneously give effect of 59,3% on Taxpayer Awareness. Variable that more dominant effect of Individual Taxpayer Awareness is Socialization of Taxation.

Key words: socialization of taxation, taxpayer perception, national tax census, taxpayer awareness

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul ”Pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Wilayah Banyuwangi)”.

Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam memperoleh Sarjana Perpajakan pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, MS selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
2. Ibu Prof. Dr. Endang Siti Astuti, M.Si selaku ketua Jurusan Bisnis Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
3. Bapak Dr. Kadarisman Hidayat, M.Si selaku Ketua Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
4. Bapak Yuniadi Mayowan, S.Sos, MAB selaku Sekretaris Program Studi Perpajakan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
5. Ibu Dr. Srikandi Kumadji, MS selaku Dosen pembimbing I yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan
6. Ibu Drs. Fransisca Yaningwati, M.Si selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pemikirannya untuk memberikan pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan

7. Kepada Ayah, Ibu dan Adik-adik saya yang telah memberikan dukungan kepada saya baik secara moral maupun materiil
8. Bapak Kepala Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III dan jajarannya atas kesediaannya memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian
9. Bapak Kepala KPP Pratama Banyuwangi atas kesediaannya memberikan izin kepada penulis dalam melakukan penelitian
10. Para Pegawai dari Seksi Bagian Umum, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Pelayanan, dan Seksi Ektensifikasi KPP Pratama Banyuwangi yang bersedia memberikan izin dan membantu penulis dalam melakukan penelitian
11. Seluruh Pengajar yang pernah mengajar dan mendidik penulis dalam menuntut ilmu
12. Semua Sahabat-sahabatku yang telah memberikan semangat dan dukungannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi
13. Kepada semua pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.

Demi kesempurnaan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Malang, Juli 2014

Penulis

DAFTAR ISI

PERSEMBAHAN	ii
MOTTO	iii
TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
TANDA PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	vi
RINGKASAN	vii
<i>SUMMARY</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	12
E. Sistematika Penulisan	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Kajian Empiris	14
B. Kajian Teoritis	19
1. Pajak	19
2. Wajib Pajak	22
3. Sosialisasi Perpajakan	24
4. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	35
5. Kesadaran wajib Pajak	45
C. Hubungan Antar Variabel	47
D. Hipotesis	48
1. Model Hipotesis	49
2. Rumusan Hipotesis	49
BAB III METODE PENELITIAN	50
A. Jenis Penelitian	50
B. Lokasi Penelitian	50
C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, dan Skala Pengukuran	51
1. Variabel Penelitian	51
2. Definisi Operasional Variabel	52
3. Skala Pengukuran	56
D. Populasi dan Sampel	56
1. Populasi	56
2. Sampel	57



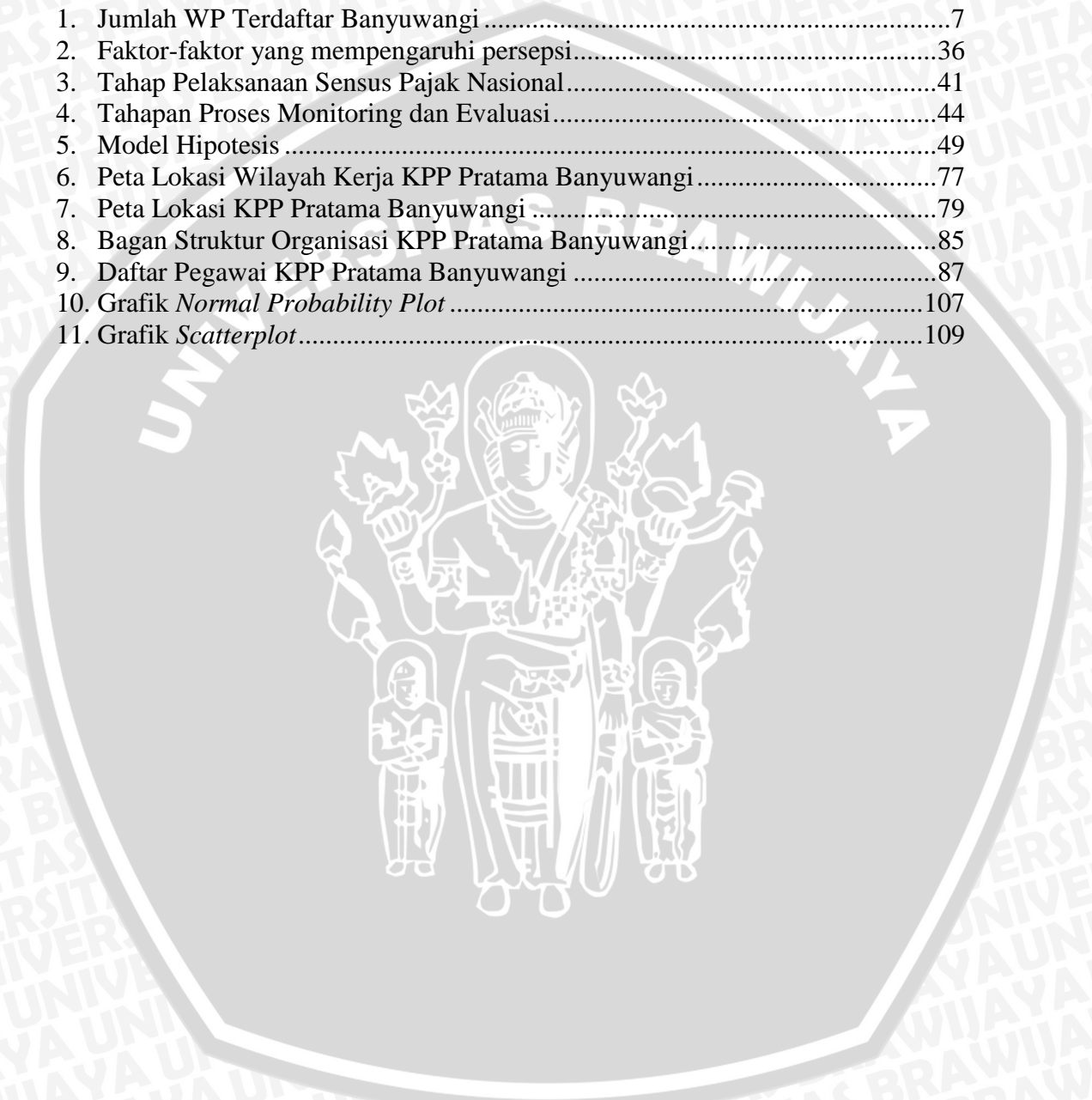
3. Teknik <i>Sampling</i>	58
E. Jenis Data.....	59
F. Metode Pengumpulan Data.....	59
G. Uji Instrumen Penelitian.....	60
1. Uji Validitas	60
2. Uji Reliabilitas	61
3. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas.....	62
H. Analisis Data	68
1. Analisis Deskriptif	68
2. Analisis Regresi Linier Berganda	68
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	77
A. Gambaran Umum KPP Pratama Banyuwangi	77
1. Lokasi KPP Pratama Banyuwangi	79
2. Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi.....	80
3. Visi dan Misi DJP	83
4. Nilai-nilai Kementerian Keuangan	83
B. Bidang-bidang Kegiatan.....	84
1. Bagan struktur organisasi KPP Pratama Banyuwangi	85
2. Tugas Organisasi KPP Pratama Banyuwangi	88
C. Gambaran Umum Responden.....	89
1. Profil Responden	90
2. Analisis Deskriptif	94
D. Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis.....	106
1. Hasil Uji Asumsi Klasik	106
2. Hasil Uji Hipotesis	109
E. Pembahasan	113
1. Pengaruh Variabel X_1 dan X_2 terhadap Variabel Y	114
2. Pengaruh Variabel X_1 terhadap Variabel Y	114
3. Pengaruh Variabel X_2 terhadap Variabel Y	117
4. Variabel yang Berpengaruh Dominan terhadap Variabel Y	118
BAB V PENUTUP.....	119
A. Kesimpulan	119
B. Saran.....	119
DAFTAR PUSTAKA	122
LAMPIRAN.....	125
CURRICULUM VITAE.....	158

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Hlm.
1.	<i>Mapping</i> Persentase Data Jumlah WP OP Kabupaten Banyuwangi.....	8
2.	Target dan Realisasi Responden SPN di Kabupaten Banyuwangi	9
3.	<i>Mapping</i> Penelitian terdahulu	17
4.	Variabel, Indikator dan Item	54
5.	Skala Pengukuran.....	56
6.	Pengujian Validitas Angket Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)	63
7.	Pengujian Validitas Angket Sensus Pajak Nasional (X_2)	65
8.	Pengujian Validitas Angket Variabel Kesadaran WP (Y)	66
9.	Pengujian Reliabilitas Variabel.....	68
10.	Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi.....	80
11.	Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah WP OP KPP Pratama Banyuwangi	82
12.	Daftar Jumlah Pegawai Berdasarkan Jabatan pada KPP Pratama Banyuwangi	86
13.	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Kelamin	90
14.	Distribusi Frekuensi Usia Responden	91
15.	Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	92
16.	Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan	93
17.	Komposisi Tahun Sensus	93
18.	Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	95
19.	Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN	98
20.	Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran WP.....	102
21.	Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda.....	110

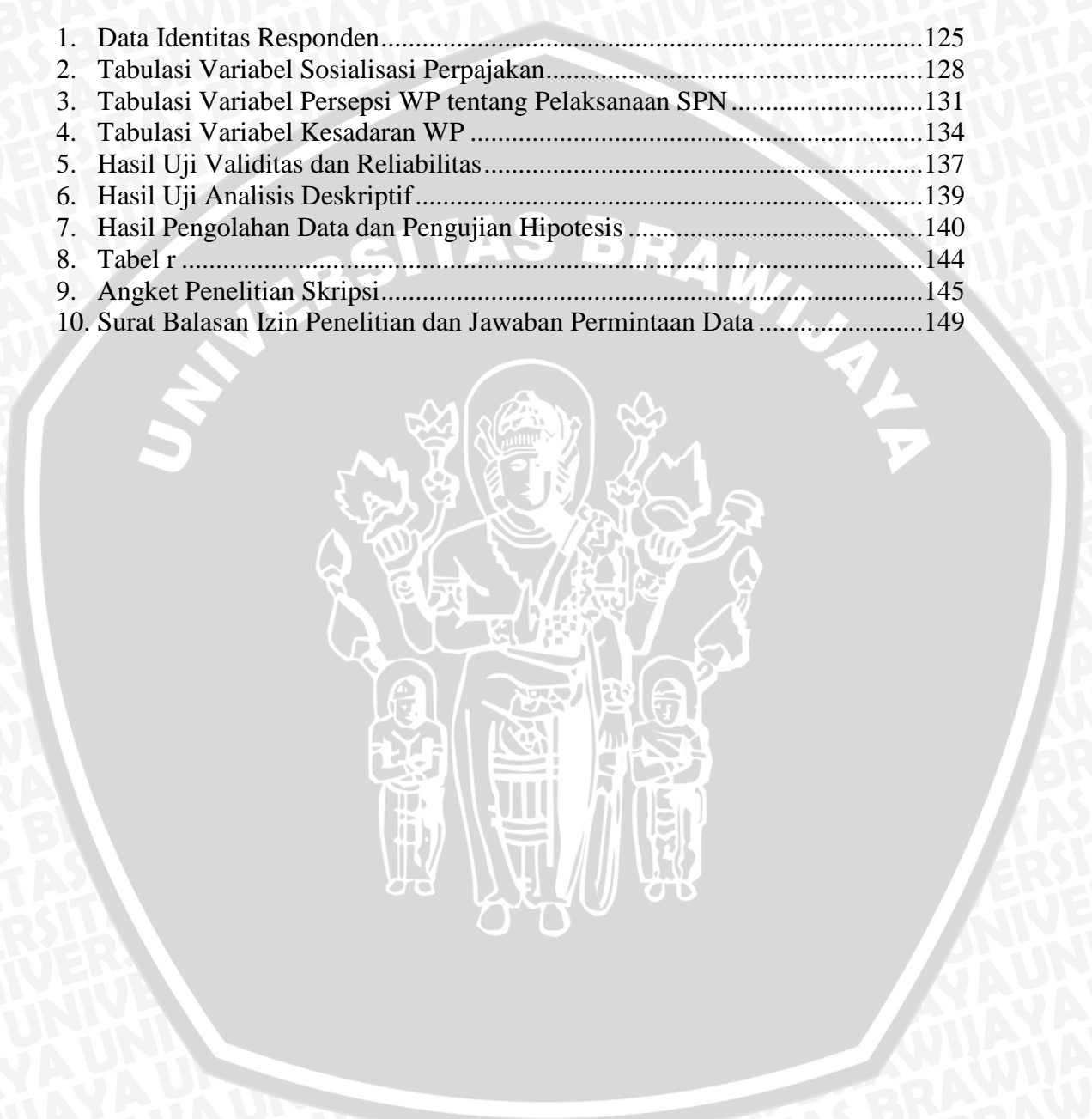
DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Hlm.
1.	Jumlah WP Terdaftar Banyuwangi	7
2.	Faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi	36
3.	Tahap Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional	41
4.	Tahapan Proses Monitoring dan Evaluasi	44
5.	Model Hipotesis	49
6.	Peta Lokasi Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi	77
7.	Peta Lokasi KPP Pratama Banyuwangi	79
8.	Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi	85
9.	Daftar Pegawai KPP Pratama Banyuwangi	87
10.	Grafik <i>Normal Probability Plot</i>	107
11.	Grafik <i>Scatterplot</i>	109



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Hlm.
1.	Data Identitas Responden.....	125
2.	Tabulasi Variabel Sosialisasi Perpajakan.....	128
3.	Tabulasi Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN.....	131
4.	Tabulasi Variabel Kesadaran WP.....	134
5.	Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas.....	137
6.	Hasil Uji Analisis Deskriptif.....	139
7.	Hasil Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis.....	140
8.	Tabel r.....	144
9.	Angket Penelitian Skripsi.....	145
10.	Surat Balasan Izin Penelitian dan Jawaban Permintaan Data.....	149



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Struktur perekonomian suatu Negara pada umumnya lebih didominasi dari pemasukan sektor pajak dengan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Pemanfaatan uang pajak yang telah dihimpun, menjadi hal yang penting terutama dalam distribusi, pengelolaan dan pengawasannya. Tidak optimalnya pemungutan pajak akan berujung pada bertambahnya hutang luar negeri sebagai sumber pembiayaan Negara. Semakin besar penerimaan Negara tentu akan semakin banyak fasilitas publik yang dapat disediakan oleh pemerintah. Penerimaan Negara dapat ditingkatkan jika ada peran aktif Wajib Pajak (WP) dalam membayar dan melapor pajak serta peran aktif dari pemerintah dalam menghimpun penerimaan pajak.

Pajak adalah sumber utama penerimaan negara, hal ini dapat dilihat dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan merupakan alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara sebagaimana yang telah direncanakan dalam Rencana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN). Berdasarkan APBN 2013, pajak diharapkan dapat menyumbang 77,93% atau hampir 78% dari seluruh penerimaan negara. “Target penerimaan pajak Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2013 adalah Rp 1.042,3 triliun, yang berarti terjadi kenaikan target senilai Rp 157 triliun dari target APBN Perubahan tahun 2012” (www.bisniskeuangan.kompas.com). Kontribusi wajib dari masyarakat tersebut masuk ke kas negara untuk selanjutnya digunakan

membiyai belanja negara. Pengeluaran negara yang semakin meningkat harus diimbangi dengan pertumbuhan penerimaan pajak yang tinggi. Anggaran pendidikan, subsidi energi, dan pembangunan infrastruktur sangat bergantung dari besar kecilnya pajak yang dihimpun dari masyarakat. “Upaya tersebut akan menghadapi berbagai kendala antara lain adalah masih rendahnya kesadaran masyarakat (*taxpayers awareness*) untuk membayar pajak, belum optimalnya pelaksanaan penyuluhan dan pelayanan di bidang perpajakan, dan banyak potensi pajak yang belum tergali dan terealisasi secara optimal sehingga *tax ratio*-nya rendah” (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

Peran vital Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai instansi yang diamanahi tugas penghimpun penerimaan negara harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran partisipasi masyarakat mengenai perpajakan, sebagai perbandingan bahwa dengan jumlah penduduk yang mencapai 240 Juta jiwa, jumlah WP Orang Pribadi (OP) per April 2012 hanya sebesar 22 Juta, padahal dengan asumsi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebesar Rp. 24,3 Juta/Tahun, maka jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu, ini selaras dengan standar Bank Dunia mengenai garis kemiskinan yang ditetapkan di angka Rp 6,12 Juta/Tahun dan disandingkan dengan Pendapatan Per Kapita tahun 2012 Republik Indonesia yaitu sebesar Rp 31,80 Juta/Tahun berarti masih banyak WP OP yang belum terjaring. Adapun jumlah WP Terdaftar sebanyak 22 Juta orang tersebut, di tahun 2011 menanggung kontribusi penerimaan sebesar Rp 200 Triliun yang dialokasi untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 Juta jiwa lainnya (Wijaya, 2012).

Data World Bank menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246 juta jiwa, dari jumlah tersebut minimal 25%-nya atau sekitar 61,5 juta jiwa, dikatakan telah memenuhi syarat sebagai WP. Namun, jumlah WP OP yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 23,22 juta. Artinya, masih terdapat kurang lebih 38 juta penduduk yang belum ber-NPWP. Hal ini juga berarti telah

terjadi ketidakadilan terhadap 23,22 juta WP OP yang memenuhi kewajiban perpajakannya (<http://news.detik.com>).

Banyaknya masyarakat yang belum mendaftarkan diri sebagai WP, DJP harus segera melakukan perluasan basis perpajakan. Atas dasar itulah DJP mendorong peningkatan pemahaman dan kesadaran perpajakan melalui program Sosialisasi Perpajakan yang gencar digalakan kepada masyarakat. Upaya meningkatkan sosialisasi dan penyuluhan kepada WP atau masyarakat sejak usia dini, maka Sosialisasi Perpajakan diharapkan dapat mengedukasi masyarakat agar dapat memahami ketentuan peraturan dan mekanisme dalam perpajakan serta membentuk masyarakat yang paham, sadar dan peduli pajak.

Kegiatan penyuluhan dan kehumasan banyak dilaksanakan oleh Kantor Wilayah dan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di Sekolah maupun Perguruan tinggi. KPP bekerja sama dengan pihak sekolah mensosialisasikan peran dan manfaat pajak di kalangan para generasi muda. *Tax goes to school*, *Tax goes to campus*, *Tax road show*, Kuis pajak, Cerdas cermat perpajakan, Kuliah umum, Olimpiade pajak, *Tax competition*, dan *Tax essay competition* merupakan bentuk kegiatan kerjasama antara KPP dengan lembaga pendidikan. Melalui program-program tersebut, diharapkan generasi muda sebagai bagian dari Masyarakat dapat memahami dan Sadar akan Pajak agar dapat mengimplementasikan dan mengabdikannya ke dalam masyarakat. Informasi program perpajakan inilah yang beberapa tahun terakhir, bersamaan dengan bergulirnya reformasi birokrasi di tubuh institusi DJP, diberikan dalam bentuk sosialisasi yang lebih luas dan terencana meskipun *mapping* subjek edukasi saat ini memang masih fokus pada

Wilayah sentra ekonomi (perindustrian dan perdagangan), daerah perkotaan, dan beberapa daerah kabupaten yang memiliki potensi ekonomi tinggi (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Pemahaman dan kesadaran masyarakat terhadap perpajakan perlu didukung juga dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi WP. Selain kegiatan penyuluhan dan pelayanan, DJP juga berusaha memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada masyarakat dengan adanya bagian kehumasan. Pada bidang penyuluhan diuraikan kegiatan penyuluhan atau Sosialisasi Perpajakan baik yang langsung dilakukan ke berbagai instansi pemerintah/swasta, maupun via elektronik atau TV dan Radio, termasuk analisisnya.

DJP juga melaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN) sebagai salah satu kegiatan Ekstensifikasi Perpajakan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 yang merupakan sarana untuk meningkatkan kesadaran pajak (*tax awareness*) dari Masyarakat. Melalui kebijakan ini diharapkan akan tercipta suatu basis data objek/subjek pajak yang akurat, relevan dan handal demi terwujudnya pengenaan pajak yang lebih adil, merata, peningkatan tertib administrasi dan peningkatan penerimaan pajak. Kebijakan ini diterapkan oleh DJP dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak, penjangkaran potensi pajak dan perluasan basis pajak yang diinformasikan kepada masyarakat luas dalam berbagai bentuk publikasi dan sosialisasi, baik berupa

iklan media massa maupun kegiatan kehumasan lainnya. Kegiatan ini diharapkan semua orang atau badan usaha yang belum melaksanakan kewajiban membayar pajak, dapat melaksanakannya sesuai ketentuan perpajakan (Direktorat Jenderal Pajak, 2012).

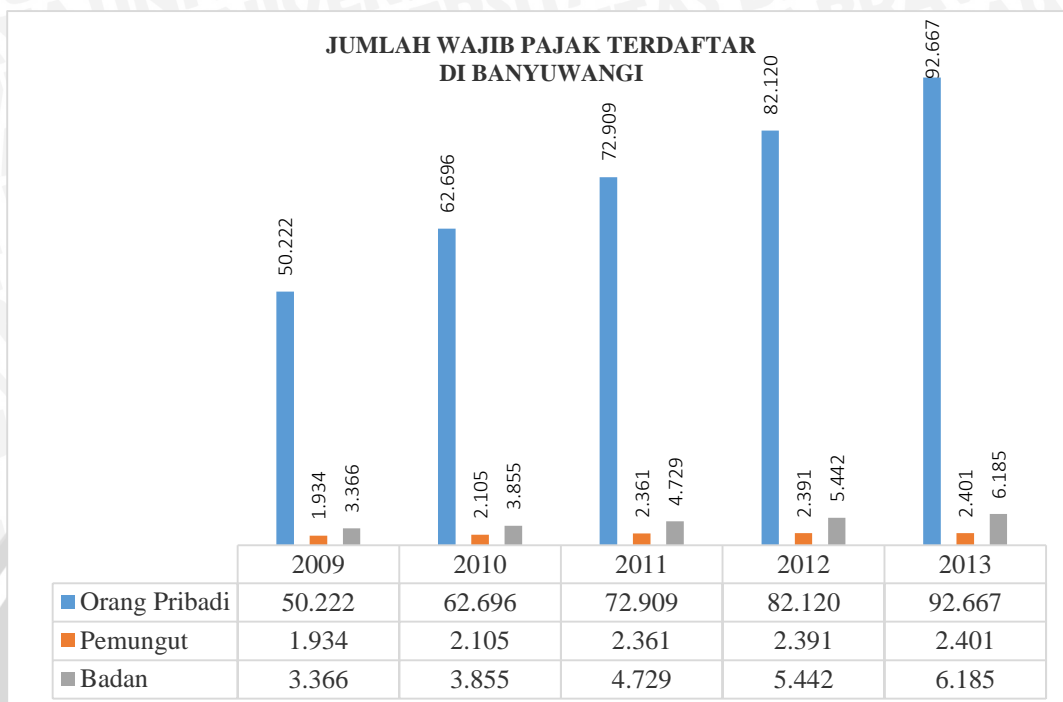
SPN akan memudahkan DJP dalam memutakhirkan basis data dari masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak, namun belum mendaftarkan diri. Setelah basis data terbentuk, pembinaan terhadap WP akan lebih mudah dilakukan oleh DJP melalui penyuluhan perpajakan, himbauan hingga penegakan hukum. Kegiatan ini diharapkan memberikan edukasi kepada masyarakat, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya. Melalui SPN, DJP melalui petugasnya memiliki kesempatan untuk melakukan Sosialisasi Perpajakan secara langsung kepada masyarakat. Petugas sensus dapat menyampaikan kepada subjek sensus tentang manfaat pajak dan pentingnya membayar pajak sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk membayar pajak. Apabila kesadaran WP dalam membayar pajak secara sukarela (*voluntary compliance*) telah dirasakan oleh masyarakat, diharapkan penerimaan pajak dapat meningkat. Pembayaran pajak secara sukarela, tentu akan meningkatkan tanggung jawab dalam pengawasan penerimaan pajak. Masyarakat yang sukarela membayar pajak akan lebih menuntut efektivitas dalam pemanfaatan penerimaan pajak, sehingga terwujud kemakmuran bersama.

Pada tahun anggaran 2012, DJP melaksanakan serentak SPN di seluruh Wilayah Indonesia melalui instansi vertikal DJP yang meliputi 29 Kantor Wilayah dari 31 Kantor Wilayah DJP tepatnya pada tanggal 1 Mei hingga Oktober 2012.

Target yang dicanangkan dalam SPN tahun 2012 adalah 3.558.000 Formulir Isian Sensus (FIS) yang menjadi *representative* subyek pajak yang disensus. Evaluasi hasil SPN tahun 2011 dan 2012 Sampai dengan tanggal 23 September 2013, secara nasional tindak lanjut hasil SPN tahun 2011 sebesar 77,14%, sedangkan tahun 2012 tindak lanjut hasil Sensus mencapai 94,82% (Direktorat Jenderal Pajak, 2013).

Menurut Hartoyo selaku Direktur Ekstensifikasi dan Penilaian DJP (2012), Sensus Pajak Nasional (SPN) tahun 2012 berhasil menghimpun 3,4 juta formulir sensus terisi yang terdiri atas WP lama yang telah terdaftar dan WP baru. WP baru yang terjaring berjumlah sekitar 2,2 juta WP OP dan sekitar 200.000 WP badan. Penerimaan negara dari WP baru hasil sensus tersebut untuk sementara mencapai Rp 1,5 triliun. Dikatakan sementara karena masih ada sejumlah penerimaan yang masih dalam proses rekapitulasi dan baru akan tuntas dilaporkan ke pusat per Maret 2013. Dengan demikian, SPN tahun 2013 yang rencananya akan diselenggarakan pada bulan Mei-Oktober ditargetkan dapat menjaring minimal 2,2 juta WP baru. Dari WP baru tersebut diharapkan ada penambahan penerimaan pajak minimal sekitar Rp 1,5 triliun.

Salah satu daerah di Jawa Timur yang berpotensi pajak yang masih bisa digali adalah Banyuwangi. Menurut data KPP Pratama Banyuwangi Per 31 Desember 2013 terdapat 92.667 WP OP terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi. Rincian jumlah WP terdaftar dari Per 31 Desember 2009 hingga Per 31 Desember 2013 tersaji pada Gambar 1.



Gambar 1 Jumlah WP Terdaftar Banyuwangi

Sumber: KPP Pratama Banyuwangi, 2013

Data diatas dapat dilihat bahwa Jumlah WP OP pada periode 2009 hingga periode 2013 selalu mengalami peningkatan. Peningkatan tertinggi terjadi pada 31 Desember 2009 hingga 31 Desember 2010 yang mengalami peningkatan sebanyak 12.526 WP OP. Pada tahun 2011 yang dapat diketahui merupakan langkah awal DJP dalam memperluas basis pajak melalui penerapan program Sensus Pajak Nasional, di Kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan terendah pada 31 Desember 2011 hingga 31 Desember 2012 dengan jumlah peningkatan sebanyak 7.681 WP OP yang pada periode sebelumnya mengalami peningkatan sebanyak 9.194 WP OP.

Menurut data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, Jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2013 mencapai 1.627.130 jiwa dan mempunyai jumlah kepala keluarga sebesar 695.697

kepala keluarga yang tersebar di seluruh wilayahnya. Berikut jumlah penduduk dan kepala keluarga Kabupaten Banyuwangi yang tersebar di seluruh wilayahnya menurut Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi serta persentase Jumlah WP OP terhadap Jumlah Kepala Keluarga Per 31 Desember 2011 hingga Per 31 Desember 2013. Adapun *mapping* datanya dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. *Mapping* persentase data Jumlah WP OP Kabupaten Banyuwangi

Tahun	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah WP OP Terdaftar	Persentase (%)
1	2	3	4	$4 : 3 \times 100$
2011	1.614.482	652.722	72.909	11,169
2012	1.627.469	656.130	82.120	12,516
2013	1.627.130	695.697	92.667	13,32

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Banyuwangi, 2013

Data *mapping* diatas dapat dilihat bahwa persentase jumlah WP OP bergerak selalu meningkat dari 11,169% pada periode 2011 hingga 13,32% pada periode 2013 dari jumlah Kepala Keluarga di Banyuwangi pada periode 2011 hingga 2013. Pada periode 2013 dapat dilihat jumlah Kepala Keluarga mencapai 695.697 dan jumlah WP OP mencapai 92,667, sehingga sekitar 600 ribu lebih Kepala Keluarga belum terdaftar sebagai WP. Berdasarkan data tersebut dapat dikatakan bahwa masih terdapat potensi pajak yang masih harus digali oleh KPP Pratama Banyuwangi melalui kegiatan ekstensifikasi. Salah satu kebijakan ekstensifikasi yang terbaru dan telah diterapkan oleh KPP Pratama Banyuwangi sejak tahun 2011 untuk menggali potensi pajak tersebut adalah dengan melaksanakan kegiatan Sensus Pajak Nasional (SPN).

Sensus Pajak Nasional (SPN) 2013 yang dilaksanakan pada KPP Pratama Banyuwangi dimulai melalui sosialisasi SPN yaitu dengan cara menyebar

brosur dan pamflet sebagai wujud simpatik terhadap masyarakat Banyuwangi yang dilakukan di beberapa Kecamatan. SPN periode 2013 di Banyuwangi menarget responden melalui SPN mencapai 2.500 WP baru. Target ini mencakup responden Orang Pribadi (OP) maupun badan usaha dengan tujuan untuk perluasan basis pajak, peningkatan penerimaan pajak, peningkatan jumlah penerimaan SPT Tahunan PPh dan pemutakhiran data WP. Realisasi Responden Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP Pratama Banyuwangi pada tahun 2013 telah melampaui jumlah target yang ditetapkan yaitu mencapai 2.558 responden yang disensus. Tabel 2 akan menjelaskan rincian jumlah target dan realisasi responden yang disensus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kabupaten Banyuwangi.

Tabel 2. Target dan Realisasi Responden SPN di Kabupaten Banyuwangi

Tahun Sensus	Jumlah Target	Realisasi Responden	Persentase (%)
1	2	3	3 : 2 x 100
2011	4.400	3.362	76,41
2012	15.000	12.999	86,66
2013	2.500	2.558	102,32
Jumlah	21.900	18.919	86,39

Sumber: KPP Pratama Banyuwangi, 2013

Data di atas dapat diketahui bahwa realisasi penjangkaran responden terbesar dalam tiga periode terjadi pada periode kedua atau pada tahun 2012 yaitu sebanyak 12.999 responden. Peneliti berasumsi bahwa penjangkaran besar ini dilakukan atas dasar menurunnya jumlah WP OP yang mendaftar pada periode 2011 dari periode sebelumnya, yang mana pada 2011 merupakan tahun pertama pelaksanaan program SPN oleh DJP.

Salah satu kendala dalam penggalan potensi pajak di Banyuwangi adalah tingkat kesadaran masyarakat mengenai arti penting membayar pajak

yang masih rendah. Masyarakat masih tidak sepenuhnya melaksanakan kewajibannya sebagai WP seperti melaporkan seluruh penghasilannya, melunasi pajak terutang, dan menyampaikan surat pemberitahuan (SPT). Dengan demikian, Program Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan SPN diharapkan mampu menjangkau dan meningkatkan kesadaran WP terdaftar dalam membayar pajak di Banyuwangi. Hal ini merupakan tugas KPP Pratama Banyuwangi untuk selalu memberikan pemahaman, sosialisasi dan pengawasan kepada masyarakat agar ingin sepenuhnya memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan penjelasan tersebut terlihat bahwa kesadaran WP di Banyuwangi masih perlu ditingkatkan. Mengingat program Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan SPN memiliki peran yang sangat penting untuk mendekatkan pajak kepada masyarakat, maka peneliti merasa perlu mengkaji lebih mendalam lagi dan ingin membuktikan secara empiris mengenai Sosialisasi Perpajakan dan pelaksanaan SPN yang dilaksanakan di Banyuwangi. Peneliti tertarik untuk menggabungkan kedua variabel independen tersebut dalam satu penelitian untuk mengetahui apakah kedua variabel independen tersebut cukup kuat mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi di Banyuwangi. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai kajian, evaluasi, strategi dan prediksi di masa mendatang mengenai kinerja dari program DJP yang telah diimplementasikan di Banyuwangi.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi?
2. Bagaimanakah pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara parsial terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi?
3. Di antara ke dua variabel tersebut, manakah yang berpengaruh dominan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara bersama-sama antara Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
2. Mengetahui dan menjelaskan pengaruh secara parsial antara Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
3. Mengetahui dan menjelaskan variabel dominan pengaruhnya terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis

Secara akademis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pengetahuan kepada pembaca mengenai bagaimana pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan persepsi Wajib Pajak dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) yang dilakukan oleh pegawai pajak. Penelitian ini juga diharapkan dapat diperbarui dan dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya terkait dengan sosialisai perpajakan dan pelaksanaan SPN terhadap kesadaran WP sebagai bahan literatur untuk menambah wawasan terhadap pengembangan teori perpajakan kedepan.

2. Manfaat Praktis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pemahaman dan wawasan bagi masyarakat mengenai pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional. Memberikan informasi dan masukan kepada DJP mengenai masalah sebenarnya yang terjadi mengenai kesadaran WP melalui pendekatan sosialisasi dan persepsi WP.

E. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini peneliti akan menggambarkan mengenai latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Bab ini terdiri dari teori-teori mengenai kajian empiris, kajian teoritis, hubungan antar variabel, model hipotesis dan rumusan hipotesis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam metode penelitian terdiri dari sub bab yaitu jenis penelitian, lokasi penelitian, variabel penelitian, populasi dan sampel, jenis data, metode pengumpulan data, uji instrumen penelitian dan analisis data.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menyajikan gambaran umum instansi terkait, bidang-bidang kegiatan instansi, gambaran umum responden, pengolahan data, pengujian hipotesis, dan pembahasan.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Empiris

Peneliti perlu melakukan suatu kajian atau tinjauan terhadap penelitian-penelitian terkait yang pernah dilakukan sebelumnya, hal tersebut dimaksudkan agar membentuk suatu dasar penelitian. Peneliti melakukan kajian dari hasil penelitian terdahulu yang secara garis besar memiliki karakteristik sama dengan tema yang akan diangkat oleh peneliti. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Suryadi (2006) meneliti tentang hubungan kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak (WP) dan pengaruhnya terhadap Kinerja Penerimaan Pajak survei di wilayah Jawa Timur. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah *structural equation modelling* (SEM) dan uji beda dua rata-rata (*t-Test*). Seluruh analisis data akan dihitung dengan menggunakan program aplikasi komputer program SPSS 10.0 *for windows* dan program AMOS *graphics*. Hasil penelitian menunjukkan, Kesadaran WP yang diukur dari persepsi WP, pengetahuan perpajakan, karakteristik WP dan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kinerja penerimaan pajak yang merupakan hasil pengujian dengan *confirmatory factor analysis* (CFA).

Selanjutnya penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmawati, Prasetyono, dan Rimawati, (2013) meneliti tentang pengaruh Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Tingkat Kesadaran WP, Tingkat Kepatuhan WP. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Partial*

Least Square (PLS). Hasil penelitian menunjukkan Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP dalam membayar pajak. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rohman, (2013) meneliti tentang pengaruh Kesadaran WP, Persepsi WP Tentang Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Pelaporan WP. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. kesadaran, persepsi WP dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.

Penelitian yang dilakukan oleh Shofia (2013), meneliti tentang Pengaruh program Sensus Pajak Nasional (SPN) terhadap tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi Di kota Malang. Penelitian ini menggunakan metode survei berupa kuesioner terhadap WP Orang Pribadi yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil penelitian setelah dilakukan pengujian hipotesis, didapatkan hasil bahwa adanya program SPN berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis, rumusan hipotesis pertama H_1 yang menyatakan bahwa SPN berpengaruh terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi adalah diterima.

Penelitian yang dilakukan oleh Dewinta (2012) meneliti tentang pengaruh persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) dan kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan WP di lingkungan Kanwil Direktorat Jederal Pajak (DJP) daerah istimewa yogyakarta. Bertujuan untuk mengetahui apakah persepsi dan kesadaran pajak mempengaruhi pelaksanaan program SPN sehingga dapat meningkatkan kepatuhan pajak. Penelitian ini menggunakan metode survei

berupa kuesioner terhadap WP Orang Pribadi (OP) maupun badan yang dianalisis dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa SPN berpengaruh signifikan dengan persepsi dan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Ditinjau dari pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN), masyarakat juga ikut serta dalam memberikan informasi data secara benar sesuai keadaan yang sebenarnya untuk didata. Disamping itu, petugas atau pegawai pajak yang menyensus juga memberikan sosialisasi yang terkait dengan hak dan kewajiban WP setelah terdaftar sebagai WP. Sedangkan untuk variabel independen lainnya peneliti menggunakan variabel sosialisasi perpajakan. Jika sosialisasi perpajakan terus dilakukan secara intensif, maka tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan akan meningkat yang nantinya juga akan berpengaruh terhadap kesadaran WP.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menemukan bukti empiris pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi WP tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran WP. Ringkasan atau *mapping* dari hasil penelitian dan beberapa penelitian terdahulu yang akan dijadikan penulis sebagai acuan atau dasar dari panalitian disajikan pada Tabel 3.

Tabel 3. Mapping Penelitian

Penulis (Tahun)	Variabel Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Kurniawan, (2014)	Variabel Independen: - Sosialisasi Perpajakan - Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Variabel Dependen: - Kesadaran Wajib Pajak	- Wajib Pajak Orang Pribadi - Lokasi penelitian di KPP Pratama Banyuwangi	- Penelitian Eksplanatori dengan pendekatan Kuantitatif - Metode Survei - Regresi Linier Berganda - Angket	Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi
Rahmawati, Prasetyono, dan Rimawati, (2013)	Variabel Independen: - Sosialisasi Perpajakan - Pengetahuan Perpajakan Variabel Dependen: - Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak	- Wajib Pajak Orang Pribadi - Lokasi penelitian di KPP Pratama Gresik Utara	- Penelitian Deskriptif Kuantitatif - Metode Survey - <i>Partial Least Square</i> (PLS) - Kuesioner	Sosialisasi dan Pengetahuan Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak
Rohman, (2013)	Variabel Independen: - Kesadaran Wajib Pajak, - Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan, - Kualitas Pelayanan Fiskus Variabel Dependen: - Kepatuhan Wajib Pajak	- Wajib Pajak Badan Dalam Negeri (BUMS: PT, CV dan Koperasi) - Lokasi penelitian di Kota Yogyakarta	- Penelitian Deskriptif - Metode Survei - Regresi linier berganda - Kuesioner	kesadaran, persepsi Wajib Pajak dan kualitas pelayanan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Lanjutan Tabel 3.

Penulis (Tahun)	Variabel Penelitian	Objek dan Lokasi Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
Shofia, (2013)	Variabel Independen: - program Sensus Pajak Nasional Variabel Dependen: - tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi	- Wajib Pajak Orang Pribadi - Lokasi penelitian di Kota Malang	- Penelitian Deskriptif Kuantitatif - Metode Survey - Regresi Linier sederhana - Kuesioner	program Sensus Pajak Nasional berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan WP Orang Pribadi
Dewinta, (2012)	Variabel Independen: - persepsi pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, - kesadaran perpajakan, Variabel Dependen: - kepatuhan Wajib Pajak	- Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi - Lokasi penelitian dilingkungan Kanwil DJP di Yogyakarta	- Deskriptif Kuantitatif - Regresi linier berganda - Kuesioner	Persepsi pelaksanaan SPN dan kesadaran perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak
Suryadi, (2006)	Variabel Independen: - Kesadaran wajib pajak, - Pelayanan wajib pajak, - Kepatuhan wajib pajak Variabel Dependen: - kinerja penerimaan pajak	- Wajib Pajak pembayar pajak terbesar - Lingkungan kerja Kanwil DJP jawa timur	- Metode Survey - <i>structural equation modelling</i> (SEM) dan uji beda dua rata-rata (<i>t-Test</i>) - Kuesioner	Kesadaran WP yang diukur dari Persepsi WP, Pengetahuan Perpajakan, Karakteristik WP dan Penyuluhan Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kinerja Penerimaan Pajak.

Fokus penelitian ini adalah mengacu pada penelitian Dewinta (2012) dan Suryadi (2006). Berbeda dengan penelitian tersebut peneliti yang secara khusus meneliti Kesadaran WP di Banyuwangi dengan menggunakan variabel independen yaitu sosialisasi perpajakan dan persepsi WP tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN). Peneliti menggunakan kebijakan program pelaksanaan SPN, karena SPN merupakan kebijakan Direktur Jenderal Pajak (DJP) yang pada dasarnya diharapkan sebagai sarana untuk meningkatkan kesadaran pajak (*tax awareness*) dari Warga Negara dengan menggunakan strategi yang efektif untuk menjaring WP (Surat Edaran DJP: SE-44/PJ/2013).

B. Kajian Teoritis

1. Pajak

a. Definisi Pajak

Pajak menurut Pasal 1 Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh Orang Pribadi (OP) atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Soemitro, “Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum” (Mardiasmo, 2009:1).

Sedangkan definisi lain pajak yang dikemukakan oleh S. I. Djajadiningrat (Resmi, 2009:2) adalah sebagai berikut:

Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian daripada kekayaan ke kas negara disebabkan suatu keadaan, kejadian dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan umum.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pajak memiliki Unsur-unsur pokok yaitu: iuran atau pungutan, dihimpun berdasarkan Undang-undang, dapat dipaksakan, tidak menerima atau memperoleh kontraprestasi, dan untuk membiayai pengeluaran umum Pemerintah.

b. Fungsi Pajak

(1) Fungsi Budgetair

Fungsi Budgetair yaitu sebagai sumber pemasukan keuangan negara dan selanjutnya dapat digunakan untuk pembiayaan pengeluaran negara.

(2) Fungsi Regulatif

Fungsi Regulatif, yakni mengatur pajak digunakan sebagai alat untuk mengatur baik masyarakat baik dibidang ekonomi, sosial maupun politik dengan tujuan tertentu. Contoh: pemeberian insentif pajak (*Tax Holiday*, penyusutan dipercepat), pengenaan pajak ekspor untuk produk tertentu, pengenaan Bea Masuk (BM) dan PPnBM untuk produk impor tertentu (Suandy, 2009:14).

c. Pengelompokan Pajak

(1) Menurut Golonganya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, Contoh: pajak penghasilan. Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, Contoh: pajak pertambahan nilai (Mardiasmo, 2009:5).

(2) Menurut Sifatnya

Pajak subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memperhatikan keadaan diri WP, Contoh: pajak penghasilan. Pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan diri WP, Contoh: pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah (Mardiasmo, 2009:5).

(3) Menurut Lembaga Pemungutnya

Segala pengadministrasian yang berkaitan dengan pajak pusat, akan dilaksanakan di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) dan Kantor Wilayah DJP serta di Kantor Pusat DJP.

Pajak pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan bangunan-P2 dan bea materai (Mardiasmo, 2009:6).

Untuk pengadministrasian yang berhubungan dengan pajak daerah, akan dilaksanakan di Kantor Dinas Pendapatan Daerah atau Kantor Pajak Daerah atau Kantor sejenisnya yang dibawah oleh Pemerintah Daerah setempat.

Pajak daerah, yaitu pajak dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas: Pajak propinsi, contoh: Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, Pajak Air Permukaan dan Pajak Rokok. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, Pajak Hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan-P2 dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan (Mardiasmo, 2009:6).

d. Peranan Pajak Bagi Negara dan Masyarakat

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak, sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah, rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang berasal dari pajak.

Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari pajak. Pajak juga digunakan untuk mensubsidi barang-barang yang sangat dibutuhkan masyarakat dan juga membayar utang negara ke luar negeri. Pajak juga digunakan untuk membantu UMKM baik dalam hal pembinaan dan modal. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan pembiayaan pembangunan.

2. Wajib Pajak

“Wajib Pajak (WP) adalah Orang Pribadi (OP) atau Badan, meliputi pembayaran pajak, pemotong pajak dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan” (Mardiasmo, 2009:21). Sehubungan

dengan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), WP OP yang menerima penghasilan di bawah PTKP tidak perlu mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. “NPWP adalah nomor yang diberikan kepada WP sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas WP dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya” (Mardiasmo, 2009:23).

Perbedaan yang penting antar WP dalam negeri dan WP luar negeri terletak dalam pemenuhan kewajiban pajaknya, antara lain (Penjelasan UU RI No. 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat (2) tentang Pajak Penghasilan):

- (a) WP dalam negeri dikenakan pajak atas penghasilan baik yang diterima atau diperoleh dari Indonesia dan dari luar Indonesia, sedangkan Wajib Pajak luar negeri dikenakan pajak hanya atas penghasilan yang berasal dari sumber penghasilan di Indonesia.
- (b) WP dalam negeri dikenakan pajak berdasarkan penghasilan neto dengan tarif umum, sedangkan WP luar negeri dikenakan pajak pada dasarnya berdasarkan penghasilan bruto dengan tarif pajak sepadan.
- (c) WP dalam negeri menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan sebagai sarana untuk menetapkan pajak yang terutang dalam suatu tahun pajak, sedangkan WP luar negeri tidak wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan, karena kewajiban pajaknya dipenuhi melalui pemotongan pajak yang bersifat final.

Pada prinsipnya Orang Pribadi (OP) yang menjadi Subjek Pajak dalam negeri adalah OP yang bertempat tinggal atau berada di Indonesia. Termasuk dalam pengertian OP yang bertempat tinggal di Indonesia adalah mereka yang mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Keberadaan OP di Indonesia lebih dari 183 hari tidaklah harus berturut-urut, tetapi ditentukan oleh jumlah hari orang tersebut berada di Indonesia dalam jangka waktu 12 bulan sejak kedatangannya di Indonesia.

3. Sosialisasi Perpajakan

a. Definisi Sosialisasi

“Sosialisasi adalah suatu proses dimana orang-orang mempelajari sistem nilai, norma dan pola perilaku yang diharapkan oleh kelompok sebagai bentuk transformasi dari orang tersebut sebagai orang luar menjadi organisasi yang efektif” (Basalamah, 2004:196).

“Sosialisasi adalah proses belajar yang dialami seseorang untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, nilai-nilai dan norma-norma agar ia dapat berpartisipasi sebagai anggota dalam kelompok masyarakatnya” (Goslin dalam Ihromi, 1999:30). Syarat penting berlangsungnya proses interaksi adalah interaksi sosial, karena tanpa interaksi sosial sosialisasi tidak mungkin berlangsung.

Dari definisi diatas, peneliti menyimpulkan bahwa sosialisasi merupakan suatu upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk memberikan suatu pemahaman, pengertian, informasi dan pembinaan kepada masyarakat mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan pengetahuan dan pemahaman masyarakat.

b. Tahapan Sosialisasi

Sosialisasi dialami oleh individu sebagai makhluk sosial sepanjang kehidupannya sejak dilahirkan sampai meninggal dunia. Karena interaksi merupakan kunci berlangsungnya proses sosialisasi maka diperlukan agen sosialisasi, yakni orang-orang disekitar individu tersebut yang mentransmisikan nilai-nilai atau norma-norma tertentu, baik secara

langsung maupun tidak langsung. Agen sosialisasi ini merupakan *significant others* (orang yang paling dekat) dengan individu, seperti orang tua, kakak-adik, saudara, teman sebaya, guru atau instruktur, dan lain sebagainya. Menurut tahapannya sosialisasi dibedakan menjadi dua tahap, yakni (Berger dan Luckman dalam Ihromi, 1999:32):

- (1) Sosialisasi primer sebagai sosialisasi yang pertama dijalani individu semasa kecil, melalui mana ia menjadi anggota masyarakat; dalam tahap ini proses sosialisasi primer membentuk kepribadian anak ke dalam dunia umum, dan keluarganya yang berperan sebagai agen sosialisasi.
- (2) Sosialisasi sekunder didefinisikan sebagai proses berikutnya yang memperkenalkan individu yang telah disosialisasi ke dalam sektor baru dari dunia objektif masyarakatnya, dalam tahap ini proses sosialisasi mengarah pada terwujudnya sikap profesionalisme (dunia yang lebih khusus) dan dalam hal ini yang menjadi agen sosialisasi adalah lembaga pendidikan, *peer group*, lembaga pekerjaan, dan lingkungan yang lebih luas dari keluarga.

Berdasarkan tempat berlangsungnya atau medianya, proses sosialisasi dibagi menjadi dua, yaitu:

- (1) Sosialisasi formal merupakan sosialisasi yang berlangsung melalui lembaga-lembaga yang berwenang menurut ketentuan yang berlaku dalam Negara seperti pendidikan di sekolah dan pendidikan militer.
- (2) Sosialisasi informal berlangsung melalui interaksi secara informal atau bersifat kekeluargaan seperti antara teman, sahabat dan kelompok sosial yang ada dalam masyarakat.

Sosialisasi bisa berlangsung secara tatap muka, tapi biasa juga dilakukan dalam jarak tertentu melalui sarana media, atau surat-menyurat, bisa berlangsung secara formal maupun informal, baik sengaja maupun tidak sengaja. Sosialisasi dapat dilakukan demi kepentingan orang yang

disosialisasikan atau orang yang melakukan sosialisasi, sehingga kedua kepentingan tersebut bisa sepadan ataupun bertentangan.

c. Sosialisasi Perpajakan

Sebelum era modernisasi, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mempunyai Direktorat Penyuluhan Perpajakan yang memiliki tugas pokok dan fungsi melakukan program penyuluhan atau sosialisasi perpajakan kepada pihak eksternal DJP dengan menggunakan berbagai media. Dengan adanya kesadaran bahwa salah satu kunci dalam meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak (WP) adalah meningkatnya pemahaman dan kesadaran masyarakat akan hak dan kewajiban perpajakannya, maka DJP memperluas fungsi penyuluhan dengan fungsi pelayanan dan kehumasan, sehingga pada awal tahun 2007 Direktorat tersebut berubah menjadi Direktorat Penyuluhan, Pelayanan dan Hubungan Masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Pemahaman dan kesadaran WP terhadap perpajakan perlu didukung dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi WP. Di samping kegiatan penyuluhan dan pelayanan, DJP juga berusaha untuk memberikan informasi yang tepat dan akurat kepada WP dengan adanya bagian kehumasan. Fungsi tersebut merupakan jembatan antara DJP dan WP dalam usahanya memenuhi tuntutan masyarakat atas kualitas pelayanan DJP yang tidak akan pernah berhenti. Penting untuk dicermati,

bahwa selain memberikan pelayanan dan informasi kepada WP, hal terutama yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia adalah penyebarluasan edukasi perpajakan (*tax education*) (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Berdasarkan hasil survei pada permulaan tahun 2007 yang dilaksanakan oleh *Polling Center* diketahui bahwa salah satu harapan WP terhadap DJP adalah penyuluhan mengenai manfaat pajak. Untuk memenuhi harapan itu, telah dicanangkan motto “Tiada Hari Tanpa Penyuluhan”. Hal ini sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan humas antara lain pemasaran atau *marketing relations* yang disebut juga *marketing communications* dan *costumer relations* yang khusus melayani khalayak konsumen dan pelanggan atau melayani masyarakat, WP maupun calon WP dan Warga Negara (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

DJP dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan dituntut menjadi institusi yang mampu memberikan pelayanan administrasi perpajakan yang baik kepada WP yang menerapkan administrasi dan sistem modern yang dapat menunjang pelaksanaan tugasnya dan mampu meningkatkan citra DJP sebagai institusi pelayanan publik yang mengedepankan pelayanan prima sehingga pada akhirnya dapat dipercaya dan dibanggakan masyarakat. Untuk mencapai hal itu pemerintah telah mempunyai Undang-Undang Perpajakan yang baru, dimana Undang-undang perpajakan yang baru memberikan pintu untuk menambah WP secara persuasif ataupun sistemik (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Salah satu contoh kegiatan edukasi terhadap WP adalah mensosialisasikan Sensus Pajak Nasional dan *Sunset Policy*. Sesuai dengan pasal 37 A ayat (1) dan pasal 37A ayat (2) Undang-Undang No 28 Tahun 2007 tentang Perubahan ketiga atas Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) disebutkan kepada WP yang menyampaikan pembetulan SPT PPh sebelum tahun pajak 2007, yang mengakibatkan pajak yang masih harus dibayar menjadi lebih besar dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi berupa bunga atas keterlambatan pelunasan kekurangan dan WP OP yang secara sukarela mendaftarkan diri untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib (NPWP) diberikan penghapusan sanksi administrasi atas pajak yang tidak atau kurang dibayar untuk tahun pajak sebelum memperoleh NPWP dan tidak dilakukan pemeriksaan. Kebijakan pemberian fasilitas ini dikenal dengan nama *sunset policy* (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Banyaknya WP yang belum mendaftarkan diri dan belum melaporkan SPT Tahunan secara benar, serta masih adanya kebingungan bahwa atas kekurangan pembayaran pajak akibat pembetulan SPT Tahunan akan dikenakan sanksi administrasi yang memberatkan WP, merupakan latar belakang diberikannya fasilitas *Sunset policy*. Untuk memasyarakatkan *Sunset policy* dibuat sebuah kegiatan besar berskala nasional yang merupakan suatu rangkaian kegiatan sosialisasi meliputi berbagai sarana dan media komunikasi seperti kampanye simpatik, himbauan dan ajakan pemanfaatan *sunset policy* melalui semua unit

penyuluhan dan unit pelayanan DJP, sosialisasi kepada pelaku usaha/bisnis, iklan, seminar dan lain-lain sehingga *sunset policy* diketahui dan dimanfaatkan semua masyarakat (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Sasaran yang ingin dicapai dengan sosialisasi secara serentak dan terus menerus mengenai fasilitas *Sunset policy* adalah agar WP bertambah, pembetulan SPT meningkat, Penerimaan Pajak meningkat dan kepatuhan WP juga meningkat. Umumnya kegiatan/program Sosialisasi Perpajakan dan Kampanye *Sunset policy* yang dilaksanakan meraih perhatian dari semua kalangan. Hal ini dapat dilihat dari antusias masyarakat yang berinteraksi baik dalam bentuk pertanyaan maupun pernyataan kritikan terhadap kinerja SDM dan kebijakan-kebijakan perpajakan. Kondisi tersebut merupakan tantangan bagi Tim penyuluh/narasumber khususnya dan DJP pada umumnya untuk melayani WP lebih baik lagi. Kegiatan/program Sosialisasi Perpajakan yang dilaksanakan pada umumnya meliputi (Direktorat Jenderal Pajak, 2009):

- (1) Sejak akhir Januari, dalam rangka menyongsong bulan SPT, DJP khususnya di Direktorat P2Humas mempunyai kegiatan melakukan sosialisasi SPT Tahunan PPh OP ke Departemen-Departemen, Badan dan Lembaga Tinggi Negara. Sosialisasi dan simulasi Pengisian SPT Tahunan PPh OP meliputi 1770S dan 1770SS,
- (2) Penyuluhan berbagai materi perpajakan yang dilakukan dalam seminar, workshop dan diskusi,
- (3) Penyuluhan materi Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU No 28 tahun 2007) bekerjasama dengan pihak DPR sebagai tim Perumus UU,
- (4) Mengkoordinasi dan mengatur permintaan narasumber sebagai pembicara dalam seminar, lokakarya, diskusi perpajakan,
- (5) Penyiaran Program Perpajakan Interaktif Radio,
- (6) Penyiaran Program Perpajakan di Televisi,
- (7) Penyuluhan Perpajakan di Mall (*Tax vaganza*),

- (8) *Introduction for Early Taxpayer*, Pengenalan perpajakan kepada para generasi muda, yaitu para murid-murid Sekolah Dasar dan kepada murid-murid Sekolah Menengah Atas (SMA) serta mahasiswa Perguruan Tinggi dengan program *High School Tax Road Show* dan *TAX GOES TO CAMPUS*. Mulai tahun 2008, program tersebut diinstruksikan untuk dilaksanakan oleh Kantor Wilayah.

d. Bentuk Kegiatan Sosialisasi Perpajakan

(1) Penyuluhan Dan Edukasi Perpajakan

Beberapa kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan yang telah dilakukan DJP antara lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2009):

(a) Penyuluhan

Kegiatan sosialisasi dan edukasi perpajakan yang telah dilaksanakan DJP dengan menggunakan berbagai media baik secara langsung maupun tidak langsung dengan memperhatikan segmentasi masyarakat dan juga cakupan masyarakat yang dapat dijangkau oleh media tersebut. Semakin digencarkannya motto “Tiada Hari Tanpa Penyuluhan” menunjukkan dilaksanakannya tekad, keinginan dan berbagai program sosialisasi perpajakan kepada para *stakeholders*, baik eksternal maupun internal. Penyuluhan Perpajakan dilakukan dengan berbagai kegiatan :

- (1) *Introduction for Early Taxpayer*, yaitu pengenalan perpajakan kepada para generasi muda, yaitu para murid-murid Sekolah Dasar dan kepada murid-murid Sekolah Menengah Atas dengan program *High School Tax Road Show*. Kegiatan ini dikemas dalam bentuk permainan dan hiburan untuk merangsang minat dan keingintahuan peserta tentang perpajakan.
- (2) *Tax Goes to Campus*, merupakan kegiatan sosialisasi perpajakan bagi mahasiswa dan para *civitas akademika* perguruan tinggi. Dalam kegiatan ini, bobot akademis semakin besar ditandai dengan kegiatan-kegiatan yang melibatkan wawasan dan pengetahuan di bidang perpajakan, misalnya kegiatan lomba debat dan lomba penyuluhan serta cerdas cermat.
- (3) *Tax Education for New Taxpayer*, adalah kegiatan penyuluhan bagi WP baru. Sejalan dengan kegiatan ekstensifikasi yang gencar dilaksanakan, disadari perlunya penyuluhan kepada para WP yang baru terdaftar untuk memberikan pemahaman tentang hak dan kewajiban perpajakan.

- (4) Pojok Pajak Bergerak, adalah kegiatan yang meliputi sosialisasi dan konsultasi perpajakan serta pendaftaran dan pencetakan Kartu NPWP bagi masyarakat umum yang dilaksanakan di pusat perbelanjaan atau mal dan pameran-pameran. Seperti diketahui bahwa masih banyak sekali masyarakat yang tidak paham dan mengerti mengenai masalah perpajakan sehingga diharapkan dengan pelaksanaan Pojok Pajak Bergerak ini pemahaman masyarakat tentang perpajakan semakin meningkat.

Pemahaman dan kesadaran WP terhadap perpajakan didukung dengan memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan dan pemenuhan kewajiban perpajakannya melalui penyediaan berbagai sarana dan prasarana dalam rangka meningkatkan pelayanan bagi WP.

(b) Multi Media

Penyuluhan juga dilakukan diberbagai multimedia yaitu

(Direktorat Jenderal Pajak, 2009):

- (1) Melalui Media elektronik yaitu penyuluhan perpajakan dalam bentuk *talkshow* interaktif, *built in* melalui televisi dan *talkshow* interaktif melalui radio,
- (2) Melalui Media Cetak yaitu penyuluhan perpajakan melalui media cetak nasional maupun regional, penyebarluasan informasi perpajakan melalui siaran pers, advertorial, navigasi dan klipng berita seputar perpajakan yang dilaksanakan setiap hari dan disampaikan kepada seluruh jajaran pimpinan DJP,
- (3) Melalui Media Luar Ruang yaitu sosialisasi perpajakan dengan menggunakan pemasangan *billboard*, videotron,
- (4) Membuat berbagai macam *Leaflet*, *Booklet* dan Buku perpajakan yang disesuaikan dengan ketentuan perpajakan terbaru sebagai sarana sosialisasi perpajakan.

(c) Website DJP

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) menyediakan website resmi DJP dengan alamat www.pajak.go.id yang berisi berbagai informasi tentang pajak seperti peraturan-peraturan, kurs Menteri Keuangan dan lain-lain. Ini juga merupakan bentuk lain dari pemberian penyuluhan dan edukasi perpajakan kepada masyarakat, memudahkan masyarakat untuk mendapatkan informasi tentang pajak. Melalui website DJP tersebut juga disediakan pendaftaran NPWP melalui *e-registration* (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

Tampilan website dibuat agar terlihat lebih *eye catching*, informasi disampaikan lebih update dan informatif diantaranya meliputi (www.pajak.go.id, 2013):

- (1) Peraturan perpajakan,
- (2) Tata cara daftar, bayar, lapor dan restitusi pajak
- (3) Kurs Pajak,
- (4) Berita moneter dan ekonomi serta perpajakan,
- (5) Aplikasi perpajakan (*e-registration, e-filling, e-spt, e-Billing, Kelas Pajak dan VAT refund*),
- (6) Download formulir perpajakan,
- (7) *Press Release*,
- (8) Agenda Kegiatan DJP, alamat KPP, Link situs,
- (9) Visi dan Misi, Selayang Pandang, Struktur Organisasi, Publikasi Pajak, Perpustakaan Pajak, *Whistleblowing System*, Statistik Pajak, *Dropbox Pajak*, Bank Persepsi, Tarif P3B dan *Time Test*.
- (10) Informasi mengenai perpajakan yang membahas (jenis WP, jenis pajak, prosedur administrasi perpajakan, hak dan kewajiban WP dll.)

(2) *Tax Center*

Tax Center adalah suatu lembaga dalam suatu perguruan tinggi yang berfungsi sebagai pusat pengkajian, penelitian, pelatihan dan sosialisasi perpajakan di lingkungan perguruan tinggi dan masyarakat yang dilakukan secara mandiri. Tujuan Pembentukan *Tax Center* adalah menciptakan keharmonisan antara Perguruan Tinggi dengan DJP sehingga diharapkan dapat mewujudkan kesadaran dan kepedulian WP khususnya di lingkungan Perguruan Tinggi dalam pemenuhan kewajiban dan haknya dibidang perpajakan. Keberadaan *Tax Center* diharapkan mampu mewujudkan kesadaran dan kepedulian WP untuk memenuhi hak dan kewajibannya dibidang perpajakan di lingkungan Perguruan Tinggi maupun masyarakat pada umumnya. *Tax Center* mempunyai tujuan antara lain (Direktorat Jenderal Pajak, 2009):

- (a) Memberikan informasi perpajakan kepada masyarakat melalui berbagai media informasi.
- (b) Membantu mencerdaskan masyarakat dan menghasilkan tenaga-tenaga profesional dalam bidang Perpajakan melalui pelatihan perpajakan yang berkualitas.
- (c) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui penyelenggaraan konsultasi, seminar dan workshop perpajakan.
- (d) Mengembangkan dan mengkaji masalah-masalah perpajakan melalui pembuatan berbagai tulisan ilmiah dalam bidang perpajakan.
- (e) Membantu menyiapkan Satuan Ajaran Perkuliahan (SAP) sebagai standar rumpun mata kuliah perpajakan.
- (f) Membantu dan mendorong mahasiswa maupun dosen dalam melakukan penelitian dibidang perpajakan dan menyediakan data dan informasi yang relevan bagi peneliti lainnya dibidang perpajakan.

- (g) Melakukan publikasi hasil-hasil penelitian dibidang perpajakan, misalnya menerbitkan buletin perpajakan.
- (h) Menyediakan sarana pemenuhan hak dan kewajiban perpajakan (formulir baku: SPT Masa, SPT Tahunan, Bukti Potong , SSP dsb.)
- (i) Menjalin kerjasama dengan DJP dalam rangka pelaksanaan kegiatan *Tax Center*.

(3) Kegiatan Penunjang Penyuluhan Dan Edukasi Perpajakan

Selain kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan yang telah dilaksanakan, DJP juga melaksanakan kegiatan yang menunjang kegiatan penyuluhan dan edukasi perpajakan, yaitu *Memorandum of Understanding* (MOU). “MOU adalah penyusunan perjanjian kerjasama, atau nota kesepahaman antara DJP dengan pihak ketiga untuk dapat memudahkan dan memperlancar kinerja DJP” (Direktorat Jenderal Pajak, 2009).

- (a) *Community Relations* : Kerjasama dan hubungan dengan komunitas yang berada disekitar tugas pokok DJP, misalnya hubungan kerjasama dengan KADIN, KADINDA, ASOSIASI, atau Lembaga lain yang berkaitan dengan tugas pokok DJP seperti lembaga pendidikan baik Universitas maupun Sekolah-sekolah.
- (b) *Government Relations* : Kerjasama dan Hubungan yang erat dengan institusi pemerintah, PEMDA seluruh Indonesia, Lembaga-lembaga Pemerintah yang bersinergi dalam penegakan hukum misalnya : POLRI, KEJAKSAAN, MA yang terus dilakukan peninjauan Perjanjian Kerjasama (MOU).
- (c) *Industrial Relations* : Dalam melaksanakan program ini DJP melakukan kerjasama dengan Asosiasi Buruh, Asosiasi Pekerja.

4. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

a. Definisi Persepsi

Persepsi merupakan proses dari pengamatan dan interaksi manusia dengan lingkungan sekitarnya yang diawali oleh proses pengindraan, yaitu proses diterimanya stimulus oleh alat indra, menerima informasi dari dunia luar, kemudian dimasukkan dan diolah dalam sistem pengolahan informasi dalam otak, hal ini manusia telah menyadari tentang sesuatu yang dinamakan persepsi. Dengan persepsi, manusia menyadari dapat mengerti tentang keadaan lingkungan yang ada disekitarnya maupun tentang suatu hal yang ada dalam dirinya.

Menurut hakikatnya, persepsi adalah proses yang dialami seseorang dalam memahami informasi tentang lingkungan baik melalui penglihatan, pendengaran, penerimaan dan penghayatan perasaan. Secara umum persepsi diartikan sebagai proses pemberian arti terhadap rangsangan yang datang dari luar. “Persepsi (*perception*) adalah proses dimana individu mengatur dan menginterpretasikan kesan-kesan sensoris mereka guna memberikan arti bagi lingkungan mereka” (Robbins dan Judge, 2008:175).

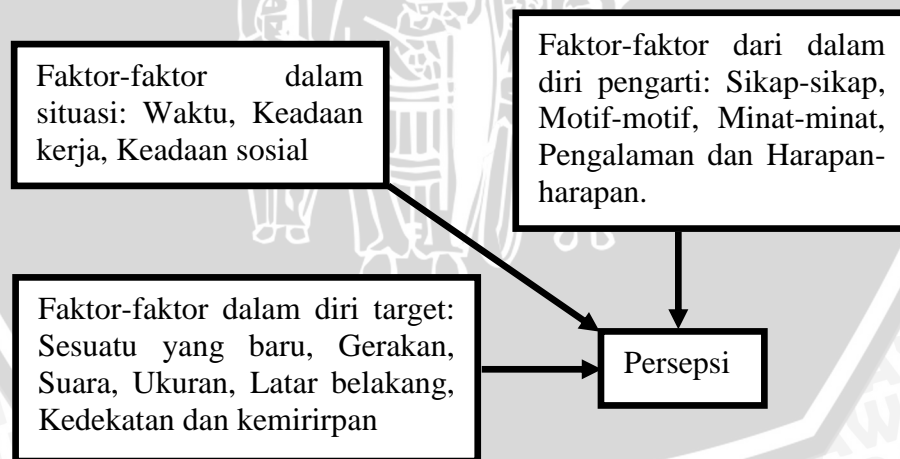
Berdasarkan pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa apa yang dipersepsikan oleh seseorang dengan orang lain dapat berbeda dalam pemaknaannya. Individu menangkap informasi (realitas) yang ada disekitar dengan menggunakan inderanya, kemudian dengan persepinya diolah dan menanggapinya. Berdasarkan hal itulah maka individu tersebut

bersikap terhadap suatu hal. Apapun yang ada di lingkungan sekitar dan ditangkap oleh indera tidak diartikan sama dengan realitasnya. Tanggapan tersebut tergantung pada orang yang mempersepsikan, objek yang dipersepsikan, serta sekelilingnya.

b. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi

Persepsi dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terletak dalam diri pembentuk persepsi, dalam diri objek atau target yang diartikan, atau dalam konteks situasi. Ketika seorang individu melihat sebuah target dan berusaha untuk menginterpretasikan apa yang dilihat, interpretasi itu sangat dipengaruhi oleh berbagai karakteristik pribadi dari pembuat persepsi individual tersebut. Karakteristik pribadi yang mempengaruhi persepsi meliputi sikap, kepribadian, motif, minat, pengalaman masa lalu dan harapan-harapan seseorang (Robbins dan Judge, 2008:175).

Berikut Gambar 2 akan memaparkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi persepsi.



Gambar 2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Persepsi
 Sumber: Robbins dan Judge, 2008:176

c. Sensus Pajak Nasional

Dalam rangka menggali potensi pajak yang sebesar-besarnya, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) berkerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berusaha mencari langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan Wajib Pajak (WP) terdaftar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan suatu program pemerintah yang sedang gencar diterapkan oleh DJP hingga saat ini adalah Sensus Pajak Nasional (SPN).

SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan dan pengamanan penerimaan negara dengan mendatangi subjek pajak (Orang Pribadi (OP) atau Badan) diseluruh indonesia, yang dilakukan oleh DJP bekerjasama dengan pihak lain (Sumarsan, 2012:1).

Pengertian SPN Menurut UU No 16 Tahun 2009, SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai kewajiban perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak (OP atau Badan). SPN mendata seluruh responden, termasuk responden yang telah menjadi WP dan bukan WP. Sehingga DJP akan memperoleh lebih banyak variasi data. Diperkirakan ada tiga kelompok kombinasi data yang akan diperoleh, yaitu data responden yang belum terdaftar sebagai WP, data responden yang sudah terdaftar sebagai WP tetapi belum sepenuhnya melaksanakan kewajiban perpajakan dan data responden yang sudah terdaftar sebagai WP dan sudah melaksanakan kewajiban pajaknya.

Setiap kelompok tersebut dapat diklasifikasikan per-sektor usahanya. Dengan demikian, kombinasi data yang diperoleh akan semakin

lengkap dan rinci, misalnya data para responden yang belum sepenuhnya membayar pajak dari sektor usaha kecil dan menengah. Menurut Peraturan DJP PER-30/PJ/2011 SPN diharapkan dapat menjaring banyak WP baru dan memperbaiki database WP lama. Pemerintah optimis kenaikan *tax ratio* bisa dicapai dengan memperluas basis pajak melalui SPN seiring dengan meningkatnya kelas menengah.

Perluasan basis perpajakan dapat diartikan sebagai penambahan subyek pajak dan/atau obyek pajak yang signifikan dalam basis data perpajakan nasional. Parameter yang dapat dikenali adalah Penambahan/pertumbuhan NPWP baru dan Penambahan obyek pajak sebagai landasan penerapan aturan perpajakan nasional. Dari FIS yang terdata dan terkumpul diharapkan akan didapatkan platform intensifikasi perpajakan nasional melalui identifikasi potensi pajak yang bersumber pada: Penjaringan/pendaftaran WP baru, Potensi Pajak Pertambahan Nilai Kegiatan Membangun Sendiri (PPN KMS), Potensi Pajak Penghasilan (PPH), Sinkronisasi dan equalisasi data perpajakan. Hal tersebut diharapkan mampu mendukung pencapaian target penerimaan dan pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak. Identifikasi subyek dan/atau obyek pajak dan potensi penerapan aturan perpajakan yang berujung pada penetapan pajak, yang idealnya mampu mengamankan target penerimaan Negara yang diemban oleh DJP.

d. Tujuan Sensus Pajak Nasional

SPN sesuai dengan landasan hukum, bertujuan untuk: Penggalian potensi perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak, pencapaian target penerimaan perpajakan, peningkatan jumlah penerimaan SPT tahunan PPh, pemutakhiran data WP dan pengamanan penerimaan negara. SPN juga ditujukan untuk menjaring seluruh potensi perpajakan dalam rangka Tri Dharma Perpajakan, yaitu: seluruh WP Terdaftar, seluruh Objek Pajak dipajaki, pelaksanaan kewajiban perpajakan tepat waktu dan tepat jumlah.

e. Fungsi Sensus Pajak Nasional

SPN akan memudahkan DJP dalam memutakhirkan basis data dari masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak, namun belum mendaftarkan diri. Setelah basis data terbentuk, pembinaan terhadap WP akan lebih mudah dilakukan oleh DJP melalui penyuluhan perpajakan, himbauan hingga penegakan hukum. Kegiatan ini diharapkan memberikan edukasi kepada WP, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.

Manfaat SPN antara lain: menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak, meningkatkan pelayanan yang berkeadilan bagi WP dalam pemenuhan dan kewajiban perpajakan dan meningkatkan peran serta WP dalam mendukung kelangsungan pembangunan sehingga bangga menjadi warga Negara. Melalui SPN, DJP melalui petugasnya memiliki kesempatan untuk

melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada WP. Petugas sensus dapat menyampaikan kepada subjek sensus tentang manfaat pajak dan pentingnya membayar pajak sehingga diharapkan timbul kesadaran untuk membayar pajak.

f. Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional

Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) dilakukan sesuai dengan pedoman teknis SPN Sesuai PER-31/PJ/2013 yang meliputi:

(1) Pedoman teknis persiapan

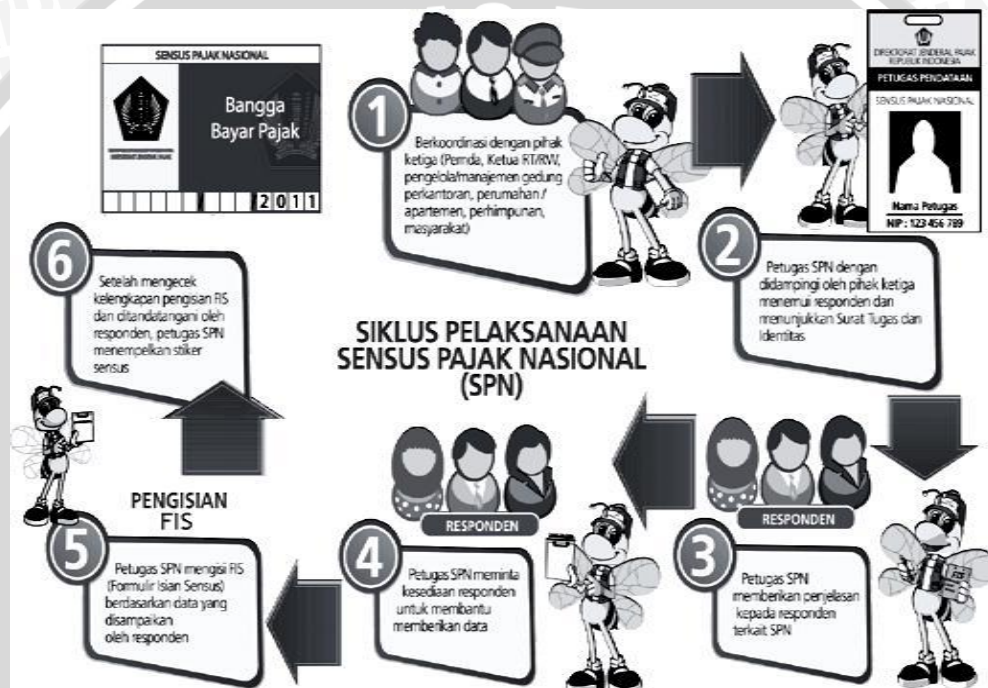
Pedoman teknis persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf a PER-31/PJ/2013 meliputi: proses pembentukan Tim SPN, proses pembuatan rencana kerja, proses penyediaan data dan proses koordinasi internal dan eksternal.

- (a) Proses pembentukan Tim Sensus Pajak Nasional
Proses pembentukan Tim SPN meliputi rangkaian kerja untuk mengalokasikan sumber daya manusia dan mendelegasikan kewenangan dalam pelaksanaan SPN.
- (b) Proses pembuatan rencana kerja
Proses pembuatan rencana kerja meliputi rangkaian kerja untuk membuat perencanaan atas pelaksanaan SPN sehingga dapat berjalan secara efektif dan efisien. Bahan penyusunan konsep rencana kerja SPN yaitu: penentuan prioritas lokasi, jumlah objek pajak yang akan disensus, sarana dan prasarana, sumber dan satuan biaya, jadwal pelaksanaan, dan struktur tim.
- (c) Proses penyediaan data
Proses ini dilakukan oleh Sub Tim Pengolahan Data dan Pelaporan di Tingkat KPP yang dibantu oleh Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan selaku Bidang Penyediaan Data dan Informasi dalam Tim SPN di Tingkat Pusat.
- (d) Proses koordinasi internal dan eksternal
Proses koordinasi meliputi proses koordinasi internal dan eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN di tingkat KPP. Koordinasi internal adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan antar anggota tim maupun sub tim untuk

menjamin efektifitas pelaksanaan. Sedangkan koordinasi eksternal adalah rangkaian kegiatan koordinasi dan sosialisasi dengan pihak eksternal yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat KPP.

(2) Pedoman teknis pelaksanaan

Adapun tahapan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional adalah sebagai berikut :



Gambar 3. Tahap Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional
 Sumber: Direktorat Jenderal Pajak, 2012

- (a) Petugas berdasarkan Surat Pemberitahuan Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) melakukan koordinasi lapangan dengan pihak ketiga (Pemerintah Daerah, Ketua RW, Ketua RT, pengelola/manajemen gedung perkantoran, perhimpunan, dan tokoh masyarakat).
- (b) Selanjutnya petugas SPN menemui responden dengan didampingi oleh petugas yang berasal dari lingkungan lokasi sensus.
- (c) Petugas SPN kemudian menunjukkan surat tugas dan identitas.
- (d) Petugas SPN memberikan penjelasan kepada responden terkait dengan SPN.
- (e) Untuk pengisian FIS, Petugas SPN melakukan hal-hal sebagai berikut :



- (1) Meminta kesediaan responden untuk membantu memberikan data dalam pengisian FIS oleh petugas SPN.
- (2) Menyampaikan surat himbuan umum pelaksanaan kewajiban perpajakan (dalam amplop tertutup).
- (f) Setelah selesai mengisi FIS berdasarkan data yang disampaikan oleh responden, petugas SPN mengecek kelengkapan pengisian FIS dan responden diminta untuk menandatangani FIS.
- (g) Selanjutnya Petugas SPN akan menempelkan stiker sensus di tempat yang mudah dilihat.

Pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf b PER-31/PJ/2013 meliputi: proses pencacahan, proses pelaporan dan proses asistensi.

- (a) Proses pencacahan
Proses pencacahan merupakan proses pengambilan dan pengumpulan data dari responden (subjek/objek sensus) yang dilakukan oleh petugas lapangan. Kegiatan pencacahan dilakukan secara bertahap berdasarkan rencana kerja yang telah disetujui.
 - (b) Proses pelaporan
Pelaporan merupakan proses rekapitulasi dan perekaman Formulir Isian Sensus (FIS) sebagai alat pertanggungjawaban pelaksanaan lapangan SPN dalam bentuk Laporan Harian Rekapitulasi dan Laporan Harian Perkaman FIS.
 - (c) Proses asistensi
Proses asistensi merupakan proses yang dilakukan oleh Tim SPN Tingkat Kanwil dan Koordinator lapangan (Tim SPN Tingkat Pusat) dalam mengawasi pelaksanaan SPN.
- (3) Pedoman teknis Pemanfaatan Data Hasil Sensus

Pedoman teknis pemanfaatan data hasil sensus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) huruf c ditetapkan dalam Lampiran III PER-31/PJ/2013 adalah sebagai berikut:

Pedoman teknis pemanfaatan data hasil sensus berisi panduan dalam memproses data yang diperoleh dari kegiatan SPN. Sebelum masuk ke dalam proses pemanfaatan data, dokumen hasil kegiatan sensus (Formulir Isian Sensus, Formulir Pengamatan, DPS/DKHS, Berita

Acara dan Surat Pernyataan) ditindaklanjuti melalui Proses Tindak Lanjut yang terdiri dari Proses Perekaman, Proses Validasi, dan Proses Klasifikasi melalui sistem aplikasi.

Setelah melalui Proses Tindak Lanjut, data yang diperoleh kemudian diproses lebih lanjut melalui Proses Bisnis Utama DJP. Secara keseluruhan pemanfaatan data hasil sensus melibatkan 4 (empat) Proses Bisnis Utama DJP, dimana data hasil Proses Tindak Lanjut dimanfaatkan oleh Proses Ekstensifikasi dan Proses Pengawasan untuk selanjutnya ditindaklanjuti melalui Proses Registrasi dan Proses Pemeriksaan.

(4) Pedoman teknis monitoring dan evaluasi

(a) Monitoring

Kegiatan monitoring dimaksudkan untuk mengetahui kecocokan dan ketepatan kegiatan yang dilaksanakan dengan rencana yang telah disusun. Monitoring pelaksanaan SPN dilakukan dengan melakukan pengawasan dari hasil perekaman FIS. Pengawasan dilakukan terhadap kegiatan pelaksanaan SPN dan kegiatan tindak lanjut dan akan dituangkan dalam format tabel monitoring. Tabel-tabel pengawasan tersebut di-*generate* melalui sistem aplikasi SPN.

Kegiatan monitoring merupakan rangkaian kegiatan untuk memantau secara rutin pelaksanaan kegiatan SPN secara keseluruhan yang mencakup tahap persiapan, pelaksanaan dan tindak lanjut (*back office*) SPN. Input dalam kegiatan monitoring ini berasal dari hasil perekaman FIS. Secara umum, keseluruhan proses pelaporan dalam SPN akan di-*generate* melalui sistem aplikasi SPN. Berdasarkan hal tersebut, setiap pengguna maupun manajemen akan dapat melihat laporan monitoring pelaksanaan SPN secara *real time* sesuai dengan kewenangannya.

Kegiatan monitoring dilakukan terhadap seluruh tahapan SPN, yang meliputi tahap persiapan, pelaksanaan, perekaman, validasi serta kegiatan tindak lanjut. Dari kegiatan monitoring akan diperoleh gambaran tentang kegiatan sensus yang meliputi :

- (1) Aspek kuantitas, seperti jumlah perolehan dan perekaman FIS,
- (2) Aspek waktu, seperti lamanya pelaksanaan sensus pada suatu cluster dan waktu yang digunakan dalam perekaman FIS,
- (3) Kinerja Petugas, seperti kinerja AR, petugas perekam dan petugas validasi.

Kegiatan monitoring dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP dan KPP Pratama. Untuk memudahkan kegiatan monitoring, aplikasi yang dibangun telah disesuaikan dengan kewenangan masing-masing unit kerja. Tujuan kegiatan monitoring adalah

mengukur setiap tahapan dalam kegiatan SPN sehingga dapat diketahui capaian dari pelaksanaan Sensus, waktu yang digunakan dan kinerja petugas pelaksana sensus.

(b) Evaluasi

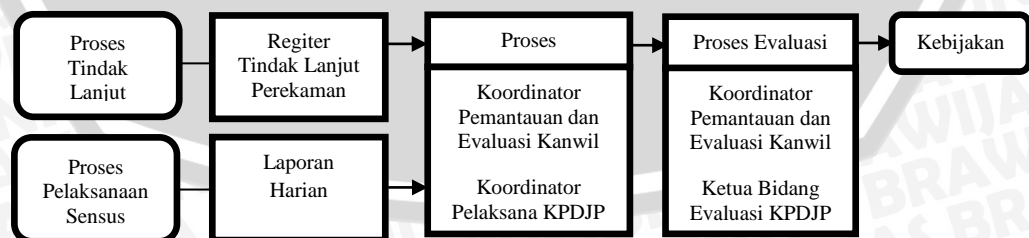
Kegiatan evaluasi merupakan upaya pengumpulan, pengolahan, analisa, deskripsi dan penyajian data atau informasi sebagai masukan untuk pengambilan keputusan (*decision making*) dan *feed back* untuk penyempurnaan. Kegiatan evaluasi juga dilakukan di tingkat KPDJP, Kanwil DJP dan KPP Pratama. Output yang dihasilkan dari proses bisnis ini berupa kebijakan baik di tingkat KPP, Kanwil DJP maupun Kantor Pusat. Tujuan dari kegiatan evaluasi adalah menilai dan menganalisa proses pelaksanaan SPN dan hasil yang telah diperoleh. Hasil penilaian dan analisa ini akan dijadikan masukan untuk pelaksanaan sensus berikutnya.

Pelaksanaan Evaluasi kegiatan SPN 2012 dilaksanakan setiap triwulan. Output dari kegiatan monitoring baik dari monitoring pelaksanaan SPN maupun monitoring tindak lanjut SPN merupakan input untuk kegiatan evaluasi. Oleh karena itu, kegiatan evaluasi SPN mencakup 2 (dua) hal sebagai berikut :

- (1) Mengevaluasi tingkat pencapaian perolehan dan perekaman FIS dari target perolehan dan perekaman FIS yang telah direncanakan. Untuk melakukan evaluasi ini diperlukan analisa bila tingkat perolehan dan perekaman FIS tidak mencapai target yang sudah direncanakan.
- (2) Mengevaluasi tingkat realisasi pemanfaatan data yang sudah dilakukan dengan pemanfaatan data yang seharusnya dilakukan berdasarkan output dari monitoring tindak lanjut SPN.

Tahapan proses monitoring dan evaluasi dapat dilihat

pada Gambar 4.



Gambar 4. Tahapan Proses Monitoring dan Evaluasi



g. Landasan Hukum Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN)

Landasan hukum pelaksanaan SPN adalah sebagai berikut:

- (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009,
- (2) Peraturan Menteri Keuangan RI No. 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional,
- (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. Per-30/PJ/2011 tanggal 27 September 2011 tentang Pedoman Teknis Sensus Pajak Nasional,
- (4) Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak nomor SE-76/PJ/2011 tanggal 28 September 2011. SE-20/PJ/2012 tanggal 18 April 2012 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

5. Kesadaran Wajib Pajak

a. Definisi Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak memiliki arti keadaan dimana seseorang mengetahui, memahami dan mengerti tentang cara menghitung, membayar dan melapor pajak serta mentaati hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak. Apabila Wajib Pajak (WP) memiliki pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan serta pelayanan yang berkualitas terhadap WP maka akan timbul kesadaran untuk membayar pajak.

Irianto (2005) dalam Rohman (2013), menguraikan beberapa bentuk kesadaran membayar pajak. Pertama, kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, WP mau membayar pajak karena tidak dirugikan dari pemungutan pajak

yang dilakukan. Kedua, kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan Negara. WP mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumberdaya finansial yang dapat mengakibatkan terhambatnya pembangunan negara. Ketiga, kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan undang-undang dan dapat dipaksakan. WP akan membayar karena pembayaran pajak disadari memiliki landasan hukum yang kuat dan merupakan kewajiban mutlak setiap WP.

Pemahaman masyarakat terhadap pajak sangat penting karena sistem perpajakan di Indonesia menggunakan *self assessment system*, dimana perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak terutang harus dilakukan secara mandiri oleh WP. Setiap WP harus mengetahui dasar-dasar perpajakan agar mereka dapat melaksanakan kewajiban perpajakannya. Oleh karena itu, WP harus memiliki kesadaran perpajakan agar mereka secara sukarela membayar pajak dengan benar sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

b. Faktor yang mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Suryadi (2006), Kesadaran WP dapat dibentuk oleh dimensi persepsi WP, pengetahuan WP, karakteristik WP dan sosialisasi perpajakan. Kesadaran WP akan meningkat apabila dalam WP muncul persepsi positif terhadap pajak. Begitu juga dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan WP melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif terhadap kesadaran WP untuk membayar pajak. Karakteristik WP yang dicerminkan oleh kondisi budaya, sosial dan ekonomi akan dominan membentuk perilaku WP yang tergambar dalam tingkat kesadaran mereka dalam membayar pajak. Dengan sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara intensif, akan dapat meningkatkan pemahaman WP tentang kewajiban membayar pajak sebagai wujud kegotongroyongan nasional dalam menghimpun dana untuk kepentingan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan nasional.

Tinggi-rendahnya tingkat kesadaran WP tergantung pada dua Faktor. Pertama, apakah WP sudah memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara. Hal ini mendorong WP untuk membayar pajak. Kedua, peran dari pemerintah dalam penggunaan dari pendapatan pajak tersebut. Ketika WP melihat pemanfaatan pajak tersebut betul-betul berdampak pada rakyat, maka mereka akan sangat sadar untuk membayar pajak. Sebaliknya jika WP melihat pajak ternyata dikorupsi, maka hal ini akan menambah keengananan WP dalam kewajiban membayar pajaknya.

Berdasarkan hal tersebut perlu dilakukan upaya meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara dalam membayar pajak. Pemerintah harus bersih dan efektif dalam penggunaan dan pemanfaatan penerimaan pajak untuk kesejahteraan masyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah lebih mengencarkan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP).

C. Hubungan Sosialisai Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Kesadaran Wajib Pajak

Penelitian yang dilakukan oleh Suryadi (2006) memaparkan bahwa dimensi kesadaran Wajib Pajak (WP) dibentuk oleh pengetahuan perpajakan, karakteristik WP, penyuluhan perpajakan dan persepsi WP. Peneliti mengambil penyuluhan perpajakan dan persepsi WP sebagai variabel penelitian yang mempengaruhi kesadaran WP. Peneliti memperluas penyuluhan perpajakan yang saat ini termasuk kedalam program Sosialisasi Perpajakan. Sosialisasi Perpajakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan untuk membentuk suatu pemahaman kepada masyarakat dan intensif dilakukan hingga menjadi suatu pengetahuan mengenai perpajakan yang dapat dijadikan pedoman dalam memenuhi kewajiban

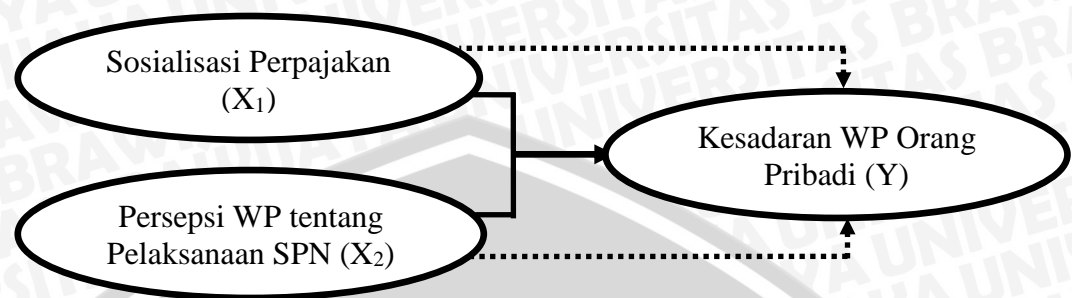
perpajakannya. Dengan kata lain tingkat pengetahuan masyarakat mengenai perpajakan akan terbentuk melalui sosialisasi perpajakan yang di lakukan oleh DJP.

Persepsi WP, menurut peneliti merupakan variabel yang dapat membentuk berbagai karakter dalam masyarakat yang dapat menganggap positif atau negatif mengenai pajak dan kebijakan yang diimplementasikan oleh DJP. Peneliti mengambil persepsi WP mengenai pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) sebagai program yang membutuhkan partisipasi dari masyarakat secara langsung. Disamping itu, peneliti juga menentukan bahwa Sosialisasi Perpajakan terlihat lebih dominan, karena dalam pelaksanaan SPN, pegawai pajak juga melakukan sosialisasi sebelum dan ketika berlangsungnya pelaksanaan SPN tersebut. Ketika pegawai pajak akan melakukan SPN pegawai pajak akan menggelar sebuah sosialisasi dengan membagikan banyak pamflet kepada masyarakat. Selain itu, ketika pelaksanaan SPN, pegawai pajak juga akan mensosialisasikan hak dan kewajiban masyarakat setelah terdaftar sebagai WP.

D. Hipotesis

“Hipotesis adalah alternatif dengan jawaban yang dibuat oleh peneliti bagi problematika yang dijadikan dalam penelitiannya” (Arikunto, 2009:55). Berdasarkan dari penjelasan yang telah dikemukakan sebelumnya maka dapat digambarkan hipotesis dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Model Hipotesis



Keterangan :  Secara Bersama – sama
 Secara Parsial
Gambar 5. Model Hipotesis

2. Rumusan Hipotesis

Adapun rumusan hipotesis penelitian ini adalah sebagai berikut:

- H₁ : Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₂ : Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.
- H₃ : Sosialisasi Perpajakan berpengaruh dominan terhadap kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam jenis penelitian eksplanatori (*eksplanatory research*) dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian eksplanatori adalah penelitian yang menyoroti hubungan kausal antara variabel-variabel penelitian dan menguji hipotesis yang telah dirumuskan sebelumnya. Pendekatan kuantitatif adalah pendekatan penelitian yang digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data yang bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode survei berupa angket.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan oleh peneliti di Wilayah Banyuwangi pada Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang telah disensus pajak dan terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Banyuwangi. Berikut berbagai faktor-faktor dari iklim perekonomian yang terjadi di wilayah Banyuwangi yang dapat dijadikan alasan peneliti memilih wilayah Banyuwangi sebagai lokasi penelitian:

1. Banyuwangi mengalami peningkatan pertumbuhan ekonomi yang terus meningkat, simpanan masyarakat (dana pihak ketiga) pada 2012 di

perbankan Banyuwangi mengalami peningkatan 23,5 persen atau Rp 4,2 triliun (data BI).

2. Potensi komoditas hulu sumber daya alam (SDA) yang melimpah dari sektor pertanian, perkebunan, hingga sektor energi dan pertambangan.
3. Dilihat dari sisi transportasi, Banyuwangi juga ditunjang oleh Bandara penerbangan Blimbingsari dan Pelabuhan Tanjungwangi yang dapat menjadi alternatif tumpuan di kawasan timur Pulau Jawa, sehingga memudahkan jangkauan akses bagi para pengusaha yang ingin berinvestasi di Banyuwangi.
4. Standarisasi regulasi dan perizinan investasi Melalui Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPPT) yang modern dan menggunakan sistem online, memudahkan investor untuk menanamkan modalnya.
5. Banyuwangi memiliki berbagai karakter budaya dan suku masyarakat yang berbeda-beda sehingga pegawai yang akan melakukan pendekatan ke masyarakat dituntut untuk memiliki ketrampilan dalam berkomunikasi sesuai dengan budaya masyarakat tersebut agar program yang diimplementasikan ke masyarakat dapat berjalan efektif.

C. Variabel Penelitian, Definisi Operasional Variabel, dan Skala Pengukuran

1. Variabel Penelitian

“Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang berbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya” (sugiyono, 2011:38).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan dua variabel, yaitu variabel dependen dan variabel independen. “Variabel dependen adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lainnya (variabel independen)” (Sekaran, 2006:116). Berdasarkan definisi diatas dapat dijelaskan bahwa variabel dependen (terikat) merupakan variabel yang dijelaskan, yang menjadi suatu akibat atau dipengaruhi, karena adanya variabel independen (bebas). Variabel dependen yang digunakan adalah Kesadaran WP.

“Variabel independen adalah variabel yang menjelaskan/mempengaruhi variabel yang lain” (Indriantoro dan Supomo, 2002:63). Dapat dijelaskan lagi bahwa variabel independen (bebas) merupakan variabel yang menjelaskan, yang menjadi sebab atau mempengaruhi timbulnya variabel dependen (terikat). Penelitian ini menggunakan variabel independen yang terdiri dari dimensi Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

2. Definisi Operasional Variabel

a. Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah suatu program/kegiatan yang diimplementasikan oleh Direktorat Jederal Pajak (DJP) untuk meningkatkan pemahaman dan pengetahuan masyarakat mengenai pajak. Sosialisasi Perpajakan terdiri dari 3 indikator yaitu Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$), Metode Sosialisasi Pepajakan ($X_{1.2}$), dan Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$). Sosialisasi Perpajakan memiliki peran yaitu untuk memberikan kesadaran perpajakan, menciptakan pengetahuan dan

meningkatkan ketertarikan Wajib Pajak terhadap pajak. Metode Pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan harus dilakukan dengan intensif, jelas dan terarah. Media Sosialisasi Perpajakan harus mengandung Informasi perpajakan yang tepat dan akurat dan mudah untuk memperolehnya.

b. Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Persepsi WP tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) merupakan pola pemikiran atau cara menanggapi WP mengenai pelaksanaan kegiatan SPN. SPN adalah kegiatan pengumpulan data mengenai informasi yang berkaitan dengan perpajakan dalam rangka memperluas basis pajak dengan mendatangi subjek pajak di seluruh Indonesia. Variabel Persepsi Wajib Pajak (WP) tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terdiri dari 2 indikator yaitu Peranan Sensus Pajak Nasional ($X_{2,1}$), dan Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2,2}$). Sensus Pajak Nasional memiliki peran untuk menyadarkan Wajib Pajak mengenai pajak, menjangkau Wajib Pajak baru, memutakhirkan basis data, pembinaan Wajib Pajak semakin mudah, dan memberikan edukasi kepada Wajib Pajak. Sensus Pajak Nasional memiliki sasaran yaitu menciptakan keadilan dalam kewajiban perpajakan, pemerataan pembangunan, mendukung pencapaian target penerimaan, menyiapkan data yang akurat, meningkatkan pelayanan DJP dan pelaksanaan sosialisasi perpajakan secara langsung.

c. Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak adalah suatu kondisi dimana Wajib Pajak mengetahui, memahami, dan mentaati ketentuan perpajakan yang berlaku

serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Variabel Kesadaran Wajib Pajak (WP) terdiri dari 2 indikator yaitu Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$), dan Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$). Kesadaran Perpajakan terdiri dari inisiatif Wajib Pajak untuk membayar pajak, kewajiban Wajib Pajak sebagai Warga Negara, Wajib Pajak harus membayar pajak dengan Sukarela, dan partisipasi Wajib Pajak dalam pembangunan. Di dalam Variabel Kesadaran Wajib Pajak peneliti juga menyertakan Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional yang terkait dengan pelaporan kewajiban perpajakan tepat waktu, pelaporan seluruh penghasilan ketika pelaksanaan sensus, Wajib Pajak memiliki tanggungjawab menyetor pajak, Wajib Pajak wajib melapor kewajiban pajaknya, dan mengetahui fungsi dan manfaat pajak setelah berpartisipasi mengikuti sosialisasi perpajakan dan sensus pajak nasional.

Berikut beberapa item dari variabel yang akan dijadikan peneliti sebagai pernyataan yang akan diajukan kepada responden:

Tabel 4. Variabel, Indikator dan Item

Variabel	Indikator	Item	Simbol
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$)	Memberikan kesadaran WP mengenai pajak.	$X_{1.1.1}$
		Tercipta pengetahuan mengenai pajak.	$X_{1.1.2}$
		Meningkatkan ketertarikan WP terhadap pajak.	$X_{1.1.3}$
	Metode Sosialisasi Pepajakan ($X_{1.2}$)	Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang intensif.	$X_{1.2.1}$
		Kemudahan untuk dipahami.	$X_{1.2.2}$

Lanjutan Tabel 4.

Variabel	Indikator	Item	Simbol			
Sosialisasi Perpajakan (X_1)	Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$)	Informasi perpajakan yang tepat dan akurat.	$X_{1.3.1}$			
		Kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan.	$X_{1.3.2}$			
Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2)	Peranan Sensus Pajak Nasional ($X_{2.1}$)	Menyadarkan WP untuk membayar pajak.	$X_{2.1.1}$			
		Menjaring WP baru.	$X_{2.1.2}$			
		Memutakhirkan basis data masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak.	$X_{2.1.3}$			
		Pembinaan terhadap WP akan semakin mudah.	$X_{2.1.4}$			
		Memberikan edukasi kepada WP, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.	$X_{2.1.5}$			
	Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$)	Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$)	Tercipta keadilan kewajiban perpajakan.	$X_{2.2.1}$		
			Pemerataan pembangunan.	$X_{2.2.2}$		
			Mendukung pencapaian target dan pengamanan penerimaan Negara.	$X_{2.2.3}$		
			Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak.	$X_{2.2.4}$		
			Meningkatkan pelayanan DJP kepada WP yang berkeadilan.	$X_{2.2.5}$		
			Melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada WP.	$X_{2.2.6}$		
			Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$)	Inisiatif untuk membayar pajak.	$Y_{1.1.1}$
					Kewajiban WP sebagai warga negara.	$Y_{1.1.2}$
					Membayar Pajak dengan Sukarela	$Y_{1.1.3}$
Partisipasi WP dalam pembangunan dan pendanaan pengeluaran umum pemerintah.	$Y_{1.1.4}$					
Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$)	Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$)	Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu.		$Y_{1.2.1}$		
		Melaporkan seluruh penghasilan.	$Y_{1.2.2}$			
		WP memiliki tanggungjawab dalam menyetor pajak.	$Y_{1.2.3}$			
		WP yang sudah memiliki NPWP wajib melapor kewajiban pajaknya.	$Y_{1.2.4}$			
		Mengetahui fungsi dan manfaat pajak.	$Y_{1.2.5}$			

3. Skala Pengukuran

“Skala pengukuran merupakan ketepatan yang digunakan sebagai acuan untuk menentukan panjang pendeknya interval yang ada dalam alat ukur, alat ukur tersebut digunakan dalam pengukuran yang akan menghasilkan data kuantitatif” (Sugiyono, 2011:92). Penelitian ini menggunakan skala *Likert* 5 poin.

Skala *Likert* digunakan untuk mengukur sikap, pendapat, dan persepsi seseorang atau sekelompok orang tentang fenomena sosial. Dengan skala *Likert*, maka variabel yang akan diukur dijabarkan menjadi indikator variabel. Kemudian indikator tersebut dijadikan sebagai titik tolak untuk menyusun item-item instrumen yang dapat berupa pernyataan atau pertanyaan (Sugiyono, 2011:92-93).

Untuk mengukur pendapat responden peneliti menggunakan skala ordinal dengan teknik pengukuran skala *Likert* lima angka yaitu dengan gradasi skala angka 5 untuk pendapat sangat setuju (SS) hingga angka 1 untuk sangat tidak setuju (STS). Perinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 5. Skala Pengukuran

No.	Gradasi Skala	Skor
1.	Sangat Setuju (SS)	5
2.	Setuju (S)	4
3.	Ragu-ragu (R)	3
4.	Tidak Setuju (TS)	2
5.	Sangat Tidak setuju (STS)	1

Sumber : Sugiyono (2011:94)

D. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas, dan lengkap yang akan diteliti. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam populasi disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis dapat berupa orang, perusahaan, media dan sebagainya (Hasan, 2002:58).

Populasi dalam penelitian ini adalah WP OP yang terdaftar dan telah di Sensus Pajak periode 2011, 2012 dan/atau 2013 oleh KPP Pratama Banyuwangi. Tercatat hingga periode 31 Desember 2013 jumlah WP OP terdaftar sebanyak 92.667 WP.

2. Sampel

“Sampel adalah bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi” (Hasan, 2002:58). Penentuan sampel penelitian ini, tidak semua WP dalam populasi menjadi objek penelitian karena jumlahnya yang besar. Penentuan ukuran sampel dengan menggunakan rumus Slovin (dalam Dewinta, 2012) adalah sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

e = persen kelonggaran ketidaktelitian karena kesalahan pengambilan sampel yang masih dapat ditolerir atau diinginkan, peneliti menggunakan 10 % atau 0,1 untuk menentukan ukuran sampel.

Perhitungan ukuran sampel :

$$\begin{aligned} n &= \frac{92.667}{1 + 92.667 (0.1^2)} \\ &= \frac{92.667}{927,67} = 99,892 \approx 100 \end{aligned}$$

Menurut hasil perhitungan yang diperoleh, ukuran sampel sejumlah 100 WP OP yang telah disensus pajak yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi.

3. Teknik *Sampling*

“Teknik *Sampling* merupakan cara yang digunakan dalam pengambilan sampel penelitian” (Hasan, 2002:64). Teknik pengambilan sampel yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. “*purposive sampling* adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu” (Sugiyono, 2011:85). Alasan peneliti mengambil sampel dengan metode *purposive sampling* adalah karena peneliti ingin mencari data dengan informasi atau kriteria khusus dari responden dengan jumlah populasi penelitian yang cukup besar, misalnya responden yang telah terdaftar sebagai WP OP dan telah disensus oleh pegawai atau petugas pajak KPP Pratama Banyuwangi.

Berdasarkan proses pelaksanaannya, peneliti menanyakan terlebih dahulu kepada responden apakah responden terdaftar sebagai WP OP KPP Pratama Banyuwangi dan telah disensus oleh pegawai pajak KPP Pratama Banyuwangi atau belum. Berikut kriteria sampel yang akan dijadikan responden oleh peneliti:

- a. Responden memiliki NPWP OP yang terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi.
- b. Responden memiliki stiker Sensus Pajak Nasional yang merupakan salah satu bukti bahwa WP telah disensus oleh petugas pajak.

E. Jenis Data

“Data merupakan keterangan-keterangan tentang suatu hal yang dapat berupa sesuatu yang diketahui atau yang dianggap atau anggapan atau suatu fakta yang digambarkan melalui angka, simbol, kode dan lain-lain” (Hasan, 2002:82).

Jenis data penelitian adalah data primer yang diperoleh secara langsung dari jawaban responden. Jawaban terhadap serangkaian pernyataan dengan menggunakan angket yang diajukan oleh peneliti dengan melibatkan sejumlah pernyataan yang berhubungan dengan sosialisasi perpajakan, Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN, dan kesadaran WP mengenai pajak. Pengumpulan data primer yang dilakukan dalam penelitian ini bertujuan untuk memperoleh data dan informasi yang diperlukan dengan mengisi angket, yaitu dengan cara menyebarkan atau mengajukan angket yang berisi pernyataan-pernyataan kepada WP OP.

F. Metode Pengumpulan Data

“Metode pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data” (Arikunto, 2009:100). Metode pengumpulan data yang dilakukan adalah metode survei dengan menggunakan angket kepada WP OP. “Metode penelitian survei adalah penelitian yang mengambil sampel dari satu populasi dan menggunakan angket sebagai alat pengumpulan data yang pokok” (Singarimbun dan Effendi, 1989:3). Sedangkan instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan angket dengan menggunakan skala *Likert* yang diajukan kepada 100 responden WP OP di KPP Pratama Banyuwangi.

“Angket adalah kumpulan dari pernyataan yang digunakan secara tertulis kepada seseorang (responden) dan cara menjawab juga dilakukan dengan tertulis” (Arikunto, 2009:100). Angket disusun berdasarkan sub-sub indikator dari variabel-variabel yang diteliti kemudian disajikan dalam bentuk pernyataan. Angket yang tersedia diisi dengan memberikan tanda *check list* pada setiap pernyataan yang diajukan. Jawaban dari angket penelitian ini bersifat tertutup dan dijamin kerahasiaanya, agar responden yang mengisi angket dapat menjawab dengan sukarela dan tidak ada pengaruh dari pihak manapun.

G. Uji Instrumen Penelitian

“Instrumen merupakan alat bantu bagi peneliti didalam menggunakan metode pengumpulan data” (Arikunto, 2009:101). “Validitas menunjukkan sejauh mana suatu instrumen itu mengukur apa yang ingin diukur. Sedangkan, Reliabilitas adalah istilah yang dipakai untuk menunjukkan sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran diulangi dua kali atau lebih” (Singarimbun dan Effendi, 1989:122). Untuk menguji apakah konstruk yang telah dirumuskan reliabel dan valid, maka perlu dilakukan pengujian reliabilitas dan validitas.

1. Uji Validitas

Uji validitas angket dengan menggunakan teknik korelasi *Product Moment Pearson* yaitu mengkorelasikan skor item dengan skor total. Jumlah anggota sampel yang digunakan sekitar 30 orang setelah data ditabulasikan.

Validitas merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi pada obyek penelitian dengan daya yang dapat dilaporkan oleh peneliti. Dengan demikian data yang valid adalah data yang tidak

berbeda antar data yang dilaporkan oleh peneliti dengan data yang sesungguhnya terjadi pada obyek penelitian (Sugiyono, 2011:267).

“Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid yaitu jika nilai $r_{hitung} \geq r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5%. Dan begitu juga sebaliknya jika nilai $r_{hitung} < r_{tabel}$ pada taraf signifikan 5% maka instrumen yang dimaksud dinyatakan tidak valid” (Sujarweni, 2014:192).

2. Uji Reliabilitas

“Reliabilitas (keandalan) merupakan ukuran suatu kestabilan dan konsistensi responden dalam menjawab hal yang berkaitan dengan konstruk-konstruk pertanyaan yang merupakan dimensi suatu variabel dan disusun dalam suatu bentuk angket” (Sujarweni, 2014:192). Reliabilitas Menurut Susan Stainback dalam Sugiyono (2011:268),

Reliabilitas berkenaan dengan derajat konsistensi dan stabilitas data atau temuan. Dalam pandangan positivistik (kuantitatif), suatu data dinyatakan reliabel apabila dua atau lebih peneliti dalam obyek yang sama menghasilkan data yang sama, atau peneliti dalam waktu yang berbeda menghasilkan data yang sama, atau sekelompok data bila dipecah menjadi dua menunjukkan data yang tidak berbeda.

“Pengukuran reliabilitas dalam penelitian ini dilakukan dengan cara *one shot* (pengukuran sekali saja) dan dilakukan secara bersama-sama terhadap seluruh butir pernyataan. Suatu konstruk atau variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* $> 0,600$ ” (Sujarweni, 2014:192).

3. Rekapitulasi Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas

a. Uji Validitas

Pengujian validitas merupakan pengujian terhadap tingkat ketepatan instrumen penelitian yang digunakan, maksudnya adalah pernyataan yang diajukan merupakan pernyataan yang sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Adapun kriteria pengambilan keputusan untuk menentukan valid yaitu jika nilai $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$ pada taraf signifikan 5%. Dan begitu juga sebaliknya jika nilai $r_{\text{hitung}} < r_{\text{tabel}}$ pada taraf signifikan 5% maka instrumen yang dimaksud dinyatakan tidak valid. Dengan menggunakan jumlah responden sebanyak 30 maka nilai r_{tabel} dapat diperoleh melalui tabel r *Product Moment Pearson* dengan df (*degree of freedom*) = $n - 2$, sehingga $df = 30 - 2 = 28$, maka $r_{\text{tabel}} = 0,306$. Setiap pernyataan dinyatakan valid jika nilai $r_{\text{hitung}} \geq r_{\text{tabel}}$. Dapat dilihat dari *corrected item total correlation*. Hasil dari analisis outputnya adalah sebagai berikut:

(1) Hasil Uji Validitas Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Variabel Sosialisasi Perpajakan terdiri dari 3 indikator yaitu Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$), Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$), dan Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$). Indikator Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$) terdiri dari 3 item yaitu Memberikan kesadaran WP mengenai pajak ($X_{1.1.1}$), Tercipta pengetahuan mengenai pajak ($X_{1.1.2}$), dan Meningkatkan ketertarikan WP terhadap pajak ($X_{1.1.3}$). Indikator Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$) terdiri

dari 2 item yaitu Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang intensif ($X_{1.2.1}$), dan Kemudahan untuk dipahami ($X_{1.2.2}$). indikator Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$) terdiri dari 2 item yaitu Informasi perpajakan yang tepat dan akurat ($X_{1.3.1}$), dan Kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan ($X_{1.3.2}$). Dengan membandingkan r hitung dan r tabel satu per satu dapat diketahui bahwa semua r hitung pada Tabel 6 lebih besar dari r tabel. Hal ini dapat diartikan bahwa setiap item dari pernyataan pada variabel sosialisasi perpajakan telah valid.

Tabel 6. Pengujian Validitas Angket Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

No.	Indikator	Item X_1	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	$X_{1.1}$	$X_{1.1.1}$	0,825	0,306	Valid
2.		$X_{1.1.2}$	0,634	0,306	Valid
3.		$X_{1.1.3}$	0,635	0,306	Valid
4.	$X_{1.2}$	$X_{1.2.1}$	0,597	0,306	Valid
5.		$X_{1.2.2}$	0,580	0,306	Valid
6.	$X_{1.3}$	$X_{1.3.1}$	0,574	0,306	Valid
7.		$X_{1.3.2}$	0,513	0,306	Valid

Sumber: Lampiran 5.

Keterangan:

- $X_{1.1}$: Peranan Sosialisasi
- $X_{1.1.1}$: Memberikan kesadaran
- $X_{1.1.2}$: Tercipta pengetahuan
- $X_{1.1.3}$: Meningkatkan ketertarikan WP
- $X_{1.2}$: Metode Sosialisasi
- $X_{1.2.1}$: Sosialisasi Perpajakan yang Intensif
- $X_{1.2.2}$: Sosialisasi Perpajakan yang Jelas dan terarah
- $X_{1.3}$: Media Sosialisasi Perpajakan
- $X_{1.3.1}$: Informasi perpajakan yang tepat dan akurat
- $X_{1.3.2}$: Kemudahan memperoleh informasi

(2) Hasil Uji Validitas Variabel Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2)

Variabel Persepsi Wajib Pajak (WP) tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terdiri dari 2 indikator yaitu Peranan Sensus

Pajak Nasional ($X_{2.1}$), dan Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$). Indikator Peranan Sensus Pajak Nasional ($X_{2.1}$) terdiri dari 5 item yaitu Menyadarkan WP untuk membayar pajak ($X_{2.1.1}$), Menjaring WP baru ($X_{2.1.2}$), Memutakhirkan basis data masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak ($X_{2.1.3}$), Pembinaan terhadap WP akan semakin mudah ($X_{2.1.4}$), dan Memberikan edukasi kepada WP, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya ($X_{2.1.5}$). Indikator Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$) terdiri dari 6 item yaitu Tercipta keadilan kewajiban perpajakan ($X_{2.2.1}$), Pemerataan pembangunan ($X_{2.2.2}$), Mendukung pencapaian target dan pengamanan penerimaan Negara ($X_{2.2.3}$), Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak ($X_{2.2.4}$), Meningkatkan pelayanan DJP kepada WP yang berkeadilan ($X_{2.2.5}$), dan Melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada WP ($X_{2.2.6}$).

Tabel 7 dapat dilihat bahwa pada seluruh item variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, nilai r hitung-nya lebih besar dari r tabel. Hal ini menunjukkan bahwa item-item pada variabel ini telah valid sehingga dapat digunakan untuk mengukur dan mendefinisikan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional. Nilai r hitung untuk ke 11 item pernyataan variabel ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7. Pengujian Validitas Angket Sensus Pajak Nasional (X_2)

No.	Indikator	Item X_2	r hitung	r tabel	Keterangan
1.	$X_{2.1}$	$X_{2.1.1}$	0,703	0,306	Valid
2.		$X_{2.1.2}$	0,568	0,306	Valid
3.		$X_{2.1.3}$	0,627	0,306	Valid
4.		$X_{2.1.4}$	0,619	0,306	Valid
5.		$X_{2.1.5}$	0,758	0,306	Valid
6.	$X_{2.2}$	$X_{2.2.1}$	0,498	0,306	Valid
7.		$X_{2.2.2}$	0,678	0,306	Valid
8.		$X_{2.2.3}$	0,684	0,306	Valid
9.		$X_{2.2.4}$	0,678	0,306	Valid
10.		$X_{2.2.5}$	0,841	0,306	Valid
11.		$X_{2.2.6}$	0,779	0,306	Valid

Sumber: Lampiran 5.

Keterangan:

$X_{2.1}$: Peranan Sensus Pajak Nasional

$X_{2.1.1}$: Menyadarkan WP

$X_{2.1.2}$: Menjaring WP baru.

$X_{2.1.3}$: Memutakhirkan basis data

$X_{2.1.4}$: Pembinaan semakin mudah

$X_{2.1.5}$: Memberikan edukasi kepada WP

$X_{2.2}$: Sasaran Sensus Pajak Nasional

$X_{2.2.1}$: Tercipta keadilan

$X_{2.2.2}$: Pemerataan pembangunan.

$X_{2.2.3}$: Mendukung pencapaian target

$X_{2.2.4}$: Menyiapkan data yang akurat

$X_{2.2.5}$: Meningkatkan pelayanan DJP

$X_{2.2.6}$: Sosialisasi perpajakan secara langsung

(3) Hasil Uji Validitas Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Variabel Kesadaran Wajib Pajak (WP) terdiri dari 2 indikator yaitu Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$), dan Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$). Indikator Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$) terdiri dari 4 item yaitu Inisiatif untuk membayar pajak ($Y_{1.1.1}$), Kewajiban WP sebagai warga negara ($Y_{1.1.2}$), Membayar Pajak dengan Sukarela ($Y_{1.1.3}$), dan Partisipasi WP dalam pembangunan dan pendanaan pengeluaran umum pemerintah ($Y_{1.1.4}$). Indikator Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$)

terdiri dari 5 item yaitu Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu ($Y_{1.2.1}$), Melaporkan seluruh penghasilan ($Y_{1.2.2}$), WP memiliki tanggungjawab dalam menyetor pajak ($Y_{1.2.3}$), WP yang sudah memiliki NPWP wajib melapor kewajiban pajaknya ($Y_{1.2.4}$), dan Mengetahui fungsi dan manfaat pajak ($Y_{1.2.5}$).

Hasil uji validitas pada variabel Kesadaran WP menunjukkan hasil yang sama, sebagaimana variabel-variabel sebelumnya. Dari 9 item pernyataan variabel Kesadaran WP, secara keseluruhan semua item dapat disimpulkan valid dengan seluruh besaran r_{hitung} lebih besar dari r_{tabel} . Hal ini juga dapat diartikan bahwa seluruh item dalam variabel ini telah mampu mendefinisikan Kesadaran WP sebagai variabel dependen dalam penelitian. Tabel 8 mengilustrasikan perbandingan besaran r_{hitung} dari setiap pernyataan variabel Kesadaran WP dan r_{tabel} .

Tabel 8. Pengujian Validitas Angket Variabel Kesadaran WP (Y)

No.	Indikator	Item Y	r_{hitung}	r_{tabel}	Keterangan
1.	Y _{1.1}	Y _{1.1.1}	0,532	0,306	Valid
2.		Y _{1.1.2}	0,667	0,306	Valid
3.		Y _{1.1.3}	0,631	0,306	Valid
4.		Y _{1.1.4}	0,613	0,306	Valid
5.	Y _{1.2}	Y _{1.2.1}	0,527	0,306	Valid
6.		Y _{1.2.2}	0,591	0,306	Valid
7.		Y _{1.2.3}	0,717	0,306	Valid
8.		Y _{1.2.4}	0,639	0,306	Valid
9.		Y _{1.2.5}	0,626	0,306	Valid

Sumber: Lampiran 5.

Keterangan:

Y_{1.1} : Kesadaran Perpajakan

Y_{1.1.1} : Inisiatif membayar pajak

Y_{1.1.2} : Kewajiban WP

Y_{1.1.3} : Membayar dengan Sukarela

- Y_{1.1.4} : Partisipasi WP dalam pembangunan
- Y_{1.2} : Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional
- Y_{1.2.1} : Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu
- Y_{1.2.2} : Melaporkan seluruh penghasilan
- Y_{1.2.3} : WP memiliki tanggungjawab menyetor pajak
- Y_{1.2.4} : WP wajib melapor kewajiban pajaknya
- Y_{1.2.5} : Mengetahui fungsi dan manfaat pajak

b. Uji Reliabilitas

Reliabilitas diartikan sebagai syarat konsistensi suatu alat ukur. Angket bisa dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan yang ada bersifat konsisten/stabil dari waktu ke waktu. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh item pernyataan dalam angket dinyatakan valid. Langkah selanjutnya yang harus dilakukan adalah menguji reliabilitas instrumen. Uji reliabilitas pada penelitian ini menggunakan metode *Cronbach's Alpha*. Jika pada uji validitas dilakukan pada setiap item pernyataan, maka uji reliabilitas dilakukan pada setiap variabel.

Tabel 9 menunjukkan seluruh nilai *Cronbach's Alpha* dari keempat variabel berada diatas nilai 0,600 sehingga dapat dikatakan ketiga variabel tersebut reliabel. Ini dapat diartikan bahwa jika pengukuran diulang maka hasilnya akan tetap konsisten dan dapat diandalkan. Uji reliabilitas secara rinci diuraikan pada Tabel 9. Dalam Uji reliabilitas ini peneliti memakai 30 orang responden dengan uji statistik *Cronbach Alpha*. Uji reliabilitas dalam penelitian ini yaitu variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1), Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) dan kesadaran WP (Y). Hasil dari pengujian dapat dilihat pada Tabel 9.

Tabel 9. Pengujian Reliabilitas Variabel

No	Item	Cronbach Alpha	Kriteria Min.	Keterangan
1.	X ₁	0,862	0,600	Reliabel
2.	X ₂	0,916	0,600	Reliabel
3.	Y	0,874	0,600	Reliabel

Sumber: Lampiran 5.

Keterangan:

X₁ : Sosialisasi Perpajakan

X₂ : Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

Y : Kesadaran WP

Dapat disimpulkan bahwa berdasarkan uji coba instrumen validitas dan reliabilitas diatas sudah valid dan reliabel seluruh itemnya, maka instrumen dapat digunakan untuk pengukuran dalam rangka pengumpulan data.

H. Analisis Data

1. Analisis Deskriptif

“Analisis deskriptif merupakan prosedur statistik untuk menguji generalisasi hasil penelitian yang didasarkan atas suatu variabel” (Hasan, 2002:136). Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan penjelasan gambaran umum demografi responden penelitian dan deskripsi mengenai variabel-variabel penelitian untuk mengetahui distribusi frekuensi dari masing-masing variabel penelitian.

2. Analisis Regresi Linier Berganda

“Model regresi berganda adalah model regresi yang lebih dari satu variabel penjelas. Disebut berganda karena banyaknya faktor (variabel) yang mungkin mempengaruhi variabel tak bebas” (Gujarati, 2006:180). Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengolah dan membahas data yang

telah diperoleh dan untuk menguji hipotesis yang telah dirumuskan. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda dengan menggunakan program *application IBM SPSS 22.0 for Windows* dan *software Microsoft Excel 2013*. Analisis regresi linier berganda dipilih pada penelitian ini karena teknik regresi linier berganda dapat menyimpulkan secara langsung mengenai pengaruh masing-masing variabel independen (bebas) yang digunakan secara parsial maupun secara bersama-sama terhadap variabel dependen (terikat).

a. Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik dalam penelitian ini terdiri dari uji normalitas, uji multikolonieritas, dan uji heteroskedastisitas. Uji asumsi klasik merupakan persyaratan yang harus dipenuhi dalam suatu model analisis. Adapun uji persyaratan yang digunakan dalam penelitian model analisis regresi linear berganda adalah sebagai berikut:

(1) Uji Normalitas

“Uji Normalitas bertujuan untuk mengetahui distribusi data dalam variabel yang akan digunakan dalam penelitian” (Sujarweni, 2014:52). Seperti diketahui bahwa uji F dan t mengasumsikan bahwa nilai residual mengikuti distribusi normal. Jika asumsi ini dilanggar maka uji statistik menjadi tidak valid untuk jumlah sampel. Untuk menguji normalitas peneliti menggunakan metode dengan melihat *normal probability plot*.

Kriteria pengambilan keputusan dengan menggunakan *normal probability plot* (Priyatno, 2013:58) adalah sebagai berikut:

- (a) Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas.
- (b) Jika data menyebar jauh dari garis diagonal atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas.

(2) Uji Multikolinieritas

“Multikolinieritas adalah keadaan antara dua variabel independen atau lebih pada model regresi terjadi hubungan linier yang sempurna atau mendekati sempurna” (Priyatno, 2013:59). Dampak yang diakibatkan dengan adanya multikolinieritas antara lain:

- (a) Nilai *standard error* untuk masing-masing koefisien menjadi tinggi, sehingga t_{hitung} menjadi rendah,
- (b) *Standard error of estimate* akan semakin tinggi dengan bertambahnya variabel independen,
- (c) Pengaruh masing-masing variabel independen sulit dideteksi.

“Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen)” (Santoso, 2001:203). Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolinieritas di dalam model regresi adalah sebagai berikut:

- (a) Nilai R^2 yang dihasilkan oleh suatu estimasi model regresi empiris sangat tinggi, tetapi secara individual variabel-variabel independen banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel dependen.
- (b) Multikolinieritas dapat juga dilihat dari nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factor* (VIF).

Kedua ukuran ini menunjukkan setiap variabel independen manakah yang dijelaskan oleh variabel independen lainnya. Dalam pengertian sederhana setiap variabel independen menjadi variabel dependen (terikat) dan diregres terhadap variabel independen lainnya. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolinieritas dengan melihat nilai *Tolerance* dan VIF (*variance Inflating Factor*). “Semakin kecil nilai *Tolerance* dan semakin besar nilai VIF maka semakin mendekati terjadinya masalah multikolinieritas” (Priyatno, 2013:60). Pada penelitian ini nilai yang dipakai untuk menunjukkan adanya multikolinieritas adalah nilai *Tolerance* $< 0,10$ atau sama dengan nilai VIF > 10 . Pada penelitian ini, multikolinieritas diuji dengan menghitung nilai *Tolerance* dan VIF, bila nilai *Tolerance* $> 0,10$ dan nilai VIF < 10 , maka tidak terjadi multikolinieritas atau non multikolinieritas.

(3) Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah keadaan dimana terjadinya ketidaksamaan varian dari residual pada model regresi. Heteroskedastisitas menyebabkan penaksir atau estimator menjadi tidak efisien dan nilai koefisien determinasi akan menjadi sangat tinggi (Priyatno, 2013:60).

Uji yang digunakan untuk mendeteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan uji grafik *Scatter Plot*. Uji Heteroskedastisitas dengan cara melihat ada tidaknya suatu pola tertentu pada grafik *Scatter Plot* antara ZRESID dan ZPRED.

b. Model Regresi

Penelitian ini merupakan abstraksi dari fenomena-fenomena yang sedang diteliti. Dalam hal ini sesuai dengan judul skripsi yang penulis kemukakan maka analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda yaitu dengan melihat pengaruh Sosialisasi Perpajakan dan Persepsi WP tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap kesadaran WP OP. Menurut Gujarati (2006:185), secara umum model regresi yang digunakan dapat dirumuskan dengan persamaan sebagai berikut :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

Y = Variabel dependen (Kesadaran WP)

β_0 = Bilangan konstanta/penaksir

β_1, β_2 = Koefisien arah regresi masing-masing variabel

X_1 = Variabel Independen (Sosialisasi Perpajakan)

X_2 = Variabel Independen (Persepsi WP tentang pelaksanaan SPN)

e = Faktor Residu (Residu)

c. Pengujian Hipotesis

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih dan untuk menunjukkan arah hubungan antara variabel dependen dengan variabel independen. Secara statistik, setidaknya dapat diukur dari nilai statistik koefisien determinasi, uji F, dan nilai statistik uji t. Perhitungan statistik disebut signifikan secara statistik apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah kritis (daerah dimana H_0 ditolak). Sebaliknya disebut tidak signifikan apabila nilai uji statistiknya berada dalam daerah dimana H_0 diterima.

Adapun pengujian yang dilakukan dalam analisis regresi linier berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Koefisien Determinasi (R^2)

“Koefisien determinasi (R^2) digunakan untuk mengetahui seberapa besar persentase sumbangan pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen” (Priyatno, 2013:56). Nilai koefisien determinasi antara nol dan satu. Jika nilai R^2 kecil, maka kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen terbatas. Nilai yang mendekati angka satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi R^2 (*adjusted R Square*) berguna untuk mengukur besarnya sumbangan variabel independen secara keseluruhan terhadap variabel dependen.

Adjusted R Square dipilih karena variabel yang digunakan dalam penelitian ini lebih dari 2 dan kemungkinan adanya variabel lain yang dapat mempengaruhi dalam model persamaan dan tidak disinggung oleh peneliti, koefisien determinasi *adjusted R Square* memiliki nilai antara 0 dan 1 ($0 < \text{adjusted R Square} < 1$), dimana semakin tinggi nilai *adjusted R Square* suatu regresi, maka akan semakin baik, yang berarti bahwa keseluruhan variabel independen (bebas) secara bersama-sama mampu menjelaskan variabel dependen (terikat).

2. Uji Signifikansi Parameter secara Bersama - sama (Uji Statistik F)

“Uji F atau uji koefisien regresi secara bersama-sama yaitu uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara bersama-sama terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh signifikan atau tidak” (Priyatno, 2013:48). Untuk menguji pengaruh bersama-sama, digunakan hipotesis operasional yang bersifat obyektif dan netral atau disebut juga hipotesis nol (H_0) dan hipotesis penelitian (H_1).

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya secara bersama-sama tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_1) adalah tidak semua parameter secara bersama-sama sama dengan nol.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya secara bersama-sama ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Untuk mendapatkan nilai F_{hitung} dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2006:195):

$$F_{hitung} = \frac{MSR}{MSE}$$

Keterangan:

MSR : *Mean Square Regression*

MSE : *Mean Square Error*

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- (a) Jika nilai signifikansi $F \leq 0,05$, maka H_0 ditolak, yang berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen.

(b) Apabila nilai tingkat signifikansi $F > 0.05$, maka H_0 diterima, berarti bahwa secara bersama-sama variabel independen tersebut mempunyai pengaruh yang tidak signifikan terhadap variabel dependen.

3. Uji Signifikansi Parameter secara Parsial (Uji Statistik t)

“Uji t atau uji koefisien regresi secara parsial yaitu uji untuk mengetahui pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen, apakah berpengaruh signifikan atau tidak” (Priyatno, 2013:50). Hasil uji ini dapat dilihat pada output *Coefficients* dari analisis regresi linier berganda. Untuk menguji pengaruh parsial, digunakan hipotesis operasional yang bersifat obyektif dan netral atau disebut juga hipotesis nol (H_0) dan hipotesis penelitian (H_1).

$H_0 : \beta_1 = 0$, artinya secara parsial tidak ada pengaruh signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.

Hipotesis alternatifnya (H_1) adalah tidak semua parameter secara bersama-sama sama dengan nol.

$H_1 : \beta_1 \neq 0$, artinya secara parsial ada pengaruh signifikan dari variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji t dilakukan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh variabel independen (bebas) secara individual terhadap variabel dependen (terikat), dengan tingkat signifikansi 0,05 atau 5%. Untuk mendapatkan nilai t_{hitung} dapat dicari dengan menggunakan rumus sebagai berikut (Gujarati, 2006):

$$t_{\text{hitung}} = \frac{\beta_1}{s\beta_1}$$

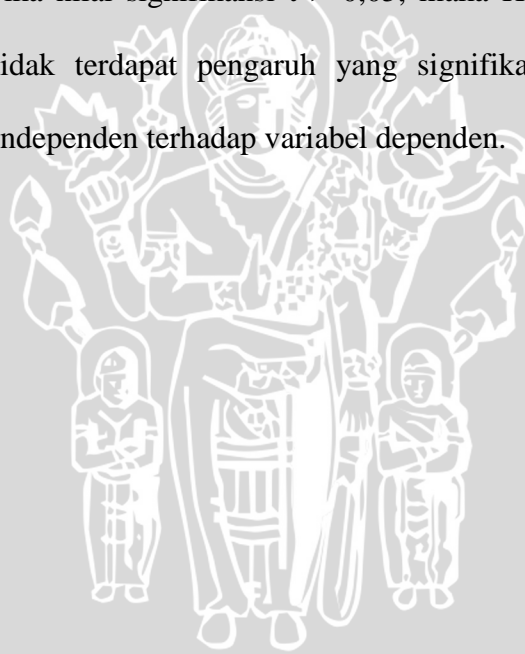
keterangan:

β_1 : Koefisien regresi

$s\beta_1$: Standar error koefisien regresi

Kriteria pengambilan keputusan adalah sebagai berikut:

- (a) Jika nilai signifikansi $t \leq 0,05$, maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.
- (b) Jika nilai signifikansi $t > 0,05$, maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara variabel independen terhadap variabel dependen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum KPP Pratama Banyuwangi

Kabupaten Banyuwangi terletak di ujung timur Pulau Jawa yang berbatasan dengan tiga kabupaten lainnya, di sebelah utara dengan Kabupaten Situbondo, sedangkan di sebelah barat dengan Kabupaten Jember dan Bondowoso. Peta wilayah Kabupaten Banyuwangi yang merupakan wilayah kerja KPP Pratama Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 6.



Gambar 6. Peta Lokasi Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi
 Sumber : www.banyuwangikab.go.id, 2013

Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi adalah 5.782,5 Km². Wilayah ini terdiri dari 31,72% area hutan, 11,44% area persawahan, 14,21% area perkebunan, 22,04% area permukiman dan sisanya 20,59% digunakan untuk jalan dan lain-lain. Sehubungan dengan wilayah Kabupaten Banyuwangi yang sangat luas dan topografi yang bervariasi, hal ini merupakan tantangan bagi KPP Pratama Banyuwangi untuk melayani masyarakat dan menggali potensi pajak semaksimal mungkin.

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unit kerja dari Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang melaksanakan pelayanan kepada masyarakat di bidang perpajakan. KPP adalah instansi vertikal DJP yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah. KPP Banyuwangi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1989. KPP Banyuwangi adalah pecahan dari KPP Jember sedangkan Kantor Perpajakan di Kabupaten Banyuwangi sebelumnya adalah Kantor Dinas Luar Pajak yang berlokasi di jalan Kartini Banyuwangi dan KPP Bumi dan Bangunan yang berlokasi di jalan Adi Sucipto. Maka mulai tanggal 10 Oktober 1989 berdirilah KPP Banyuwangi yang menempati gedung kantor yang setatusnya menyewa berlokasi di jalan Brawijaya Banyuwangi.

Perjuangan pejabat, sejak tanggal 1 Agustus 1999 KPP Banyuwangi dan KPP Bumi dan Bangunan menempati satu gedung kantor baru yang strategis di jantung kota Banyuwangi yang memudahkan bagi Wajib Pajak (WP) untuk melakukan administrasi perpajakan yang berlokasi di Jalan Adi Sucipto Nomor 27 A Banyuwangi. Sejak tanggal 31 Mei 2007 bertepatan dengan modernisasi DJP, melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 55/PMK.01/2007 KPP Banyuwangi

dan KPP Bumi dan Bangunan dilebur menjadi KPP Pratama Banyuwangi. KPP Pratama Banyuwangi mulai beroperasi sejak tanggal 4 Desember 2007 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor 158/PJ./2007.

1. Lokasi KPP Pratama Banyuwangi

KPP (KPP) Pratama Banyuwangi terletak di Jalan Adi Sucipto No. 27 A Kelurahan Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Berikut peta lokasi KPP Pratama Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 7.



Gambar 7. Peta Lokasi KPP Pratama Banyuwangi
Sumber: maps.google.com, 2014

Secara umum KPP Pratama Banyuwangi memiliki batasan-batasan

yang meliputi:

Sebelah timur : Lahan Pertanian Penduduk
 Sebelah Barat : Kantor Peradilan Negeri Banyuwangi
 Sebelah Utara : Kantor Bupati Banyuwangi, Kantor DPRD, KPPN
 Sebelah Selatan : Universitas 17 Agustus 1945 Banyuwangi
 Telepon : 0333-428451,416897
 Fax : 0333-428452
 POS : 68416

2. Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi

Banyuwangi merupakan daerah administrasi pemerintahan kabupaten yang terbagi dalam 24 kecamatan dan 217 Desa/Kelurahan. Geografis Kabupaten Banyuwangi merupakan dataran tinggi, dataran rendah dan pantai dan dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, perkebunan, perhutanan, pertambangan, perikanan, perdagangan dan industri. Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi yang meliputi 24 kecamatan yang berada di Kab. Banyuwangi. Wilayah kerja KPP Pratama Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 10.

Tabel 10. Wilayah Kerja KPP Pratama Banyuwangi

NO	Kecamatan	Desa/Kelurahan
1.	Bangorejo	Bangorejo, Kebondalem, Ringintelu, Sambimulyo, Sambirejo, Sukorejo, Temurejo.
2.	Banyuwangi	Karangrejo, Kepatihan, Kampung Melayu, Temenggungan, Lateng, Pengantigan, Singotrunan, Panderejo, Singonegaran, Penganjuran, Tamanbaru, Tukangkayu, Kebalenan, Kertosari, Sobo, Kampung Mandar, Pakis, Sumberejo.
3.	Cluring	Benciluk, Cluring, Kaliploso, Plampangrejo, Sarimulyo, Sembulung, Sraten, Tampo, Tamanagung.
4.	Gambiran	Gambiran, Jajag, Purwodadi, Wringin Agung, Wringinrejo, Yosomulyo.
5.	Genteng	Genteng Kulon, Genteng Wetan, Kaligondo, Kembiritan, Setail.

Lanjutan Tabel 10.

NO	Kecamatan	Desa/Kelurahan
6.	Giri	Penataban, Giri, Boyolangu, Grogol, Jambesari, Mojopanggung
7.	Glagah	Bakungan, Banjarsari, Glagah, Kampunganyar, Kemiren, Kenjo, Olehsari, Paspan, Rejosari, Tamansuruh.
8.	Glenmore	Bumiharjo, Karangharjo, Margomulyo, Sepanjang, Sumbergondo, Tegalharjo, Tulungrejo
9.	Kabat	Badean, Bareng, Benelan Lor, Bunder, Dadapan, Gombolirang, Kabat, Kalirejo, Kedayunan, Labanasem, Macan Putih, Pakistaji, Pendarungan, Pondoknongko, Sukojadi, Tambong.
10.	Kalibaru	Banyuanyar, Kajarharjo, Kalibaru Kulon, Kalibaru Manis, Kalibaru Wetan, Kebonrejo.
11.	Kalipuro	Klatak, Bulusan, Bulusari, Gombongsari, Kalipuro, Kelir, Ketapang, Pesucen, Telemung.
12.	Licin	Banjar, Gumuk, Jelun, Kluncing, Licin, Pakel, Segobang, Tamansari.
13.	Muncar	Blambangan, Kedungrejo, Kedungringin (Kedungpringin), Kumendung, Sumberberas, Sumbersewu, Tambakrejo, Tapanrejo, Tembokrejo, Wringin Putih.
14.	Pesanggaran	Kandangan, Pesanggaran, Sarongan, Sumberagung, Sumbermulyo.
15.	Purwoharjo	Bulurejo, Glagahagung, Grajagan, Karetan, Kradenan, Purwoharjo, Sidorejo, Sumberasri.
16.	Rogojampi	Aliyan, Blimbing Sari, Bomo, Bubuk, Gintangan, Gitik, Gladag, Kaligung, Kaotan, Karang Bendo, Karangrejo, Kedaleman, Lemahbang Dewo, Mangir, Patoman, Rogojampi, Watu Kebo.
17.	Sempu	Gendoh, Jambewangi, Karangsari, Sempu, Tegalarum, Temuasri, Temuguruh.
18.	Siliragung	Barurejo, Buluagung, Kesilir, Seneporejo, Siliragung.
19.	Singojuruh	Alas Malang, Benelan Kidul, Cantuk, Gabor, Gumirih, Kemiri, Lemahbang Kulon, Padang, Singojuruh, Singolatre, Sumber Baru.
20.	Songgon	Balak, Bangunsari, Bayu, Bedewang, Parangharjo, Songgon, Sragi, Sumber Arum, Sumber Bulu.
21.	Srono	Bagorejo, Kebaman, Kepundungan, Parijatah Kulon, Parijatah Wetan, Rejoagung, Sukomaju, Sukonatar, Sumpersari, Wonosobo.
22.	Tegaldlimo	Kalipait, Kedungasri, Kedunggebang, Kedungwungu, Kendalrejo, Purwoagung, Purwoasri, Tegaldlimo, Wringinpitu.

Lanjutan Tabel 10.

NO	Kecamatan	Desa/Kelurahan
23.	Tegalsari	Dasri, Karangdoro, Karangmulyo, Tamansari, Tegalrejo, Tegalsari.
24.	Wongsorejo	Alasbulu, Alasrejo, Bajulmati, Bangsring, Bengkak, Bimorejo, Sidodadi, Sidowangi, Sumberanyar, Sumberkencono, Watukebo, Wongsorejo.

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi, 2013

Jumlah penduduk, kepala keluarga dan jumlah WP OP yang terdaftar di Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Banyuwangi terbesar diantara Kecamatan lain di KPP Pratama Banyuwangi. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah jangkauan atau jarak dengan KPP Pratama Banyuwangi yang cukup dekat. Masyarakat yang bertempat tinggal dengan jarak yang jauh dari lokasi KPP Pratama Banyuwangi memiliki peluang untuk menghindar dari kewajibannya membayar pajaknya. Perbandingan jumlah kepala keluarga dan jumlah WP OP KPP Pratama Banyuwangi dapat dilihat pada Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Jumlah Kepala Keluarga dan Jumlah WP OP KPP Pratama Banyuwangi

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah WP OP	Persentase (%)
1	2	3	4	5	$5 : 4 \times 100$
1.	Bangorejo	64.338	28.493	2.648	9,293
2.	Banyuwangi	115.313	46.752	20.661	44,193
3.	Cluring	70.072	29.384	4.016	13,667
4.	Gambiran	59.515	24.338	4.337	17,82
5.	Genteng	86.109	33.671	6.873	20,412
6.	Giri	26.604	11.917	3.159	26,508
7.	Glagah	30.739	14.882	2.594	17,43
8.	Glenmore	76.267	30.655	3.418	11,15
9.	Kabat	68.889	30.315	3.022	9,969
10.	Kalibaru	73.804	29.920	2.807	9,382
11.	Kalipuro	90.454	41.467	3.860	9,309
12.	Licin	27.517	13.375	446	3,335
13.	Muncar	126.713	51.600	5.444	10,55

Lanjutan Tabel 11.

NO	Kecamatan	Jumlah Penduduk	Jumlah Kepala Keluarga	Jumlah WP OP	Persentase (%)
1	2	3	4	5	5 : 4 x 100
14.	Pesanggaran	51.030	24.036	3.389	14,1
15.	Purwoharjo	67.693	29.512	3.442	11,663
16.	Rogojampi	91.395	41.268	5.837	14,144
17.	Sempu	76.678	31.929	1.755	5,497
18.	Siliragung	47.041	19.443	843	4,336
19.	Singojuhur	46.071	20.474	1.969	9,617
20.	Songgon	51.395	22.521	1.714	7,611
21.	Srono	89.394	39.255	4.462	11,367
22.	Tegaldlimo	59.646	24.839	2.537	10,214
23.	Tegalsari	45.496	18.291	865	4,729
24.	Wongsorejo	84.957	37.360	2.569	6,876
Jumlah		1.627.130	695.697	92.667	13,32

Sumber : KPP Pratama Banyuwangi dan Dinas Capil Banyuwangi, 2013

3. Visi dan Misi Direktorat Jenderal Pajak

Visi : Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara.

Misi : Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat.

4. Nilai-nilai Kementerian Keuangan

Integritas : Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral.

Profesionalisme : Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi.

Sinergi : Membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas.

Pelayanan : Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat, dan aman.

Kesempurnaan : Senantiasa melakukan upaya perbaikan disegala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik.

B. Bidang-bidang Kegiatan

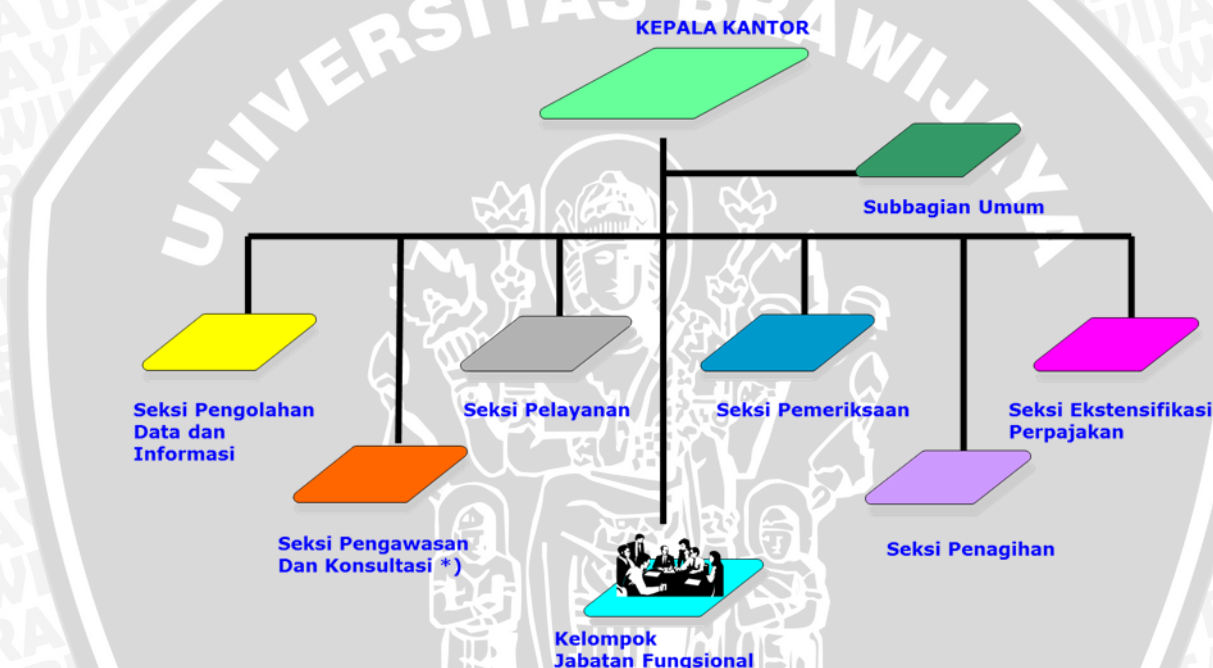
Kantor Pelayanan Pajak (KPP) pada Tahun 2002 telah mengalami modernisasi sistem dan struktur organisasi menjadi instansi yang berorientasi pada fungsi, bukan lagi pada jenis pajak. KPP modern juga merupakan penggabungan dari KPP konvensional dan Kantor Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak. Pada Tahun 2002 tersebut, dibentuk 2 KPP WP Besar atau LTO (*Large Tax Office*). KPP ini menangani 300 WP Badan Terbesar di seluruh Indonesia dan hanya mengadministrasikan jenis pajak PPh dan PPN.

Tahun 2003 dibentuk 10 KPP Khusus yang meliputi KPP BUMN, Perusahaan PMA, WP Badan dan Orang Asing, dan Perusahaan Masuk Bursa. Kemudian pada tahun 2004 dibentuk pula KPP Madya atau MTO (*Medium Tax Office*). Sedangkan KPP Modern yang menangani WP terbanyak adalah KPP Pratama atau STO (*Small Tax Office*). KPP Pratama baru dibentuk pada tahun 2006 s.d 2008. Perbedaan utama antara KPP STO dengan KPP LTO maupun MTO antara lain adalah dengan adanya Seksi Ekstensifikasi pada KPP STO, sehingga dapat dikatakan pula KPP STO merupakan ujung tombak bagi DJP untuk menambah rasio perpajakan di Indonesia.

Pembagian Seksi dan Jabatan Fungsional pada KPP Pratama adalah sebagai berikut : Sub bagian Umum, Seksi Pelayanan, Seksi Pengolahan Data dan Informasi, Seksi Ekstensifikasi, Seksi Pengawasan dan Konsultasi (maksimal 4 Seksi Waskon), Seksi Penagihan, Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal, Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksa Pajak dan Kelompok Jabatan Fungsional Penilai.

1. Bagan struktur organisasi KPP Pratama Banyuwangi.

Sebuah KPP Pratama dipimpin oleh seorang kepala kantor yang membawahi jabatan struktural dan fungsional. Jabatan struktural terdiri dari beberapa seksi dan dipimpin oleh seorang kepala seksi, sedangkan jabatan fungsional terdiri dari beberapa tim yang dipimpin oleh ketua tim. Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama dapat dilihat pada Gambar 8.



Gambar 8. Bagan Struktur Organisasi KPP Pratama Banyuwangi
Sumber: Diolah dari Peraturan Menteri Keuangan No. 62/PMK.01/2009

KPP Pratama Banyuwangi di bawah pimpinan Bapak Dadang Suwangsa sebagai Kepala Kantor mempunyai 8 seksi (jabatan struktural) dan 1 kelompok jabatan fungsional. Pelaksanaan tugas sehari-hari KPP Pratama Banyuwangi didukung oleh pegawai dengan jumlah sebanyak 63 orang. Para pegawai ditempatkan di subbagian/seksi berdasarkan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan data kepegawaian Sub Bagian Umum per April

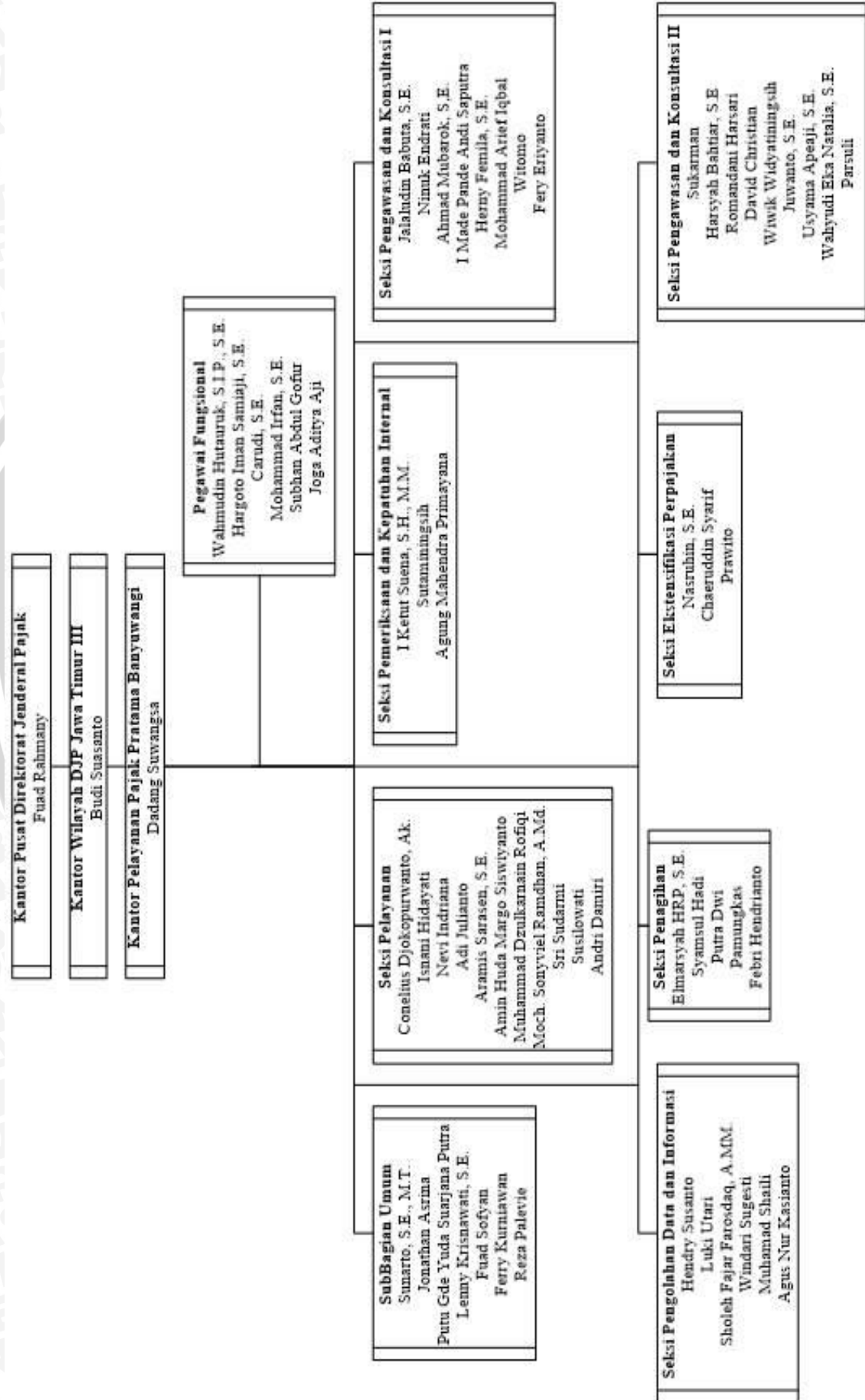
2014 daftar jumlah pegawai untuk masing-masing seksi berdasarkan jabatan dapat dilihat pada Tabel 12.

Tabel 12. Daftar Jumlah Pegawai berdasarkan jabatan pada KPP Pratama Banyuwangi

No	Jabatan	Jumlah					
		Kepala	Pelaksana	AR	OC	Juru Sita	Lainnya
1.	Kepala Kantor	1					
2.	Sub Bagian Umum	1	6				
3.	Seksi PDI	1	3		2		
4.	Seksi Pelayanan	1	10				
5.	Seksi Penagihan	1	2			2	
6.	Seksi Pemeriksaan dan Kepatuhan Internal	1	2				
7.	Seksi Ekstensifikasi	1	2				
8.	Seksi Waskon I	1		7			
9.	Seksi Waskon II	1		8			
10.	Supervisor						1
11.	Ketua Tim						3
12.	Anggota Tim						6
Jumlah per Jabatan		9	25	15	2	2	10
Jumlah Keseluruhan		63					

Sumber : Sub Bagian Umum KPP Pratama Banyuwangi, 2014

Berdasarkan Tabel 12 peneliti juga menyajikan daftar nama pegawai berdasarkan masing-masing seksi atau Divisi pada KPP Pratama Banyuwangi. Para pegawai ditempatkan di subbagian/seksi berdasarkan jabatan dan kompetensi yang dimiliki. Berdasarkan data kepegawaian Sub Bagian Umum per-April 2014 daftar nama pegawai KPP Pratama Banyuwangi dapat dilihat pada Gambar 9.



Gambar 9. Daftar Pegawai KPP Pratama Banyuwangi
Sumber: Sub Bagian Umum KPP Pratama Banyuwangi, 2014

2. Tugas Organisasi KPP Pratama Banyuwangi

Struktur organisasi KPP Pratama Banyuwangi dipimpin oleh satu orang Pejabat Eselon III yang jabatannya disebut Kepala Kantor, dimana kedudukannya membawahi satu subbagian dan delapan seksi yang dipimpin oleh masing-masing satu orang Pejabat Eselon IV, ditambah dengan satu kelompok Fungsional Pemeriksa Pajak. Adapun nama dan tugas masing-masing subbagian/seksi-seksi berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62/PMK.01/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal DJP adalah sebagai berikut:

(a) Kepala Kantor

Menugaskan Kepala Subbagian umum untuk menyusun konsep rencana kerja berdasarkan penerimaan tahun anggaran, menugaskan Kepala Bidang Pengolaan Data dan Informasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengelolaan Data dan Informasi, menugaskan Kepala Seksi Bidang Pelayanan untuk melakukan rencana kerja Pelayanan, menugaskan Kepala Bidang Pemeriksaan untuk melakukan rencana kerja Bidang Pemeriksaan, menugaskan Kepala Bidang Pengawasan dan Konsultasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Pengawasan dan Konsultasi, menugaskan Kepala Bidang Ekstensifikasi untuk melakukan rencana kerja Bidang Ekstensifikasi.

(b) SubBagian Umum

Memiliki tugas pelayanan kesekretariatan dengan mengatur kegiatan kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan perlengkapan untuk menunjang tugas KPP.

(c) Seksi Pengolahan Data dan Informasi

Memiliki tugas melakukan pengumpulan, pencarian, pengolahan data, pengamatan potensi perpajakan, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pelayanan dukungan teknis komputer, pelaksanaan i-SISMIOP dan SIG, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling, serta penyiapan laporan kinerja.

(d) Seksi Pelayanan

Seksi Pelayanan mempunyai tugas penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan, serta

penerimaan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi WP, dan kerjasama perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(e) Seksi Penagihan

Seksi Penagihan mempunyai tugas melakukan urusan penatausahaan piutang pajak, penundaan dan angsuran tunggakan pajak, penagihan aktif, usulan penghapusan piutang pajak serta penyimpanan dokumen-dokumen penagihan sesuai ketentuan yang berlaku.

(f) Seksi Pemeriksaan

Seksi Pemeriksaan mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan penyaluran Surat Perintah Pemeriksaan Pajak serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

(g) Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

Seksi Ekstensifikasi Perpajakan mempunyai tugas melaksanakan pengamatan potensi perpajakan, pencarian data dari pihak ketiga, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak dalam rangka ekstensifikasi perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku.

(h) Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon)

Seksi Pengawasan dan Konsultasi I dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi II masing-masing mempunyai tugas yang sama yaitu melakukan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan WP, bimbingan/himbauan kepada WP dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan profil WP, analisis kinerja WP, melakukan rekonsiliasi data WP dalam rangka melakukan intensifikasi, usulan pembetulan penetapan pajak, serta melakukan evaluasi hasil banding berdasarkan ketentuan yang berlaku.

(i) Kelompok Jabatan Fungsional

Memiliki tugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

C. Gambaran Umum Responden

Responden dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak (WP) Orang Pribadi (OP) yang terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (DJP) Pajak Jawa Timur III. Dalam penelitian ini, peneliti dibantu oleh petugas pajak yang memberikan satu per satu angket kepada masing-

masing responden, dengan terlebih dahulu memastikan bahwa responden telah memenuhi kriteria sebagai WP OP yang dimaksud oleh peneliti. Peneliti juga menjelaskan tujuan penyebaran angket kepada setiap responden.

Data KPP Pratama Banyuwangi hingga periode 31 Desember 2013 mencatat jumlah WP OP yang terdaftar dan ber-NPWP sebanyak 92.667 orang. Penelitian ini menggunakan sampel yang berjumlah 100 orang dengan perhitungan sampel dengan menggunakan rumus Slovin. Pengambilan anggota sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *nonprobability sampling* dengan metode *purposive sampling*. Data Primer berupa angket yang terkumpul selanjutnya diinput ke dalam *software Microsoft Excell 2013* yang selanjutnya dilakukan pengolahan analisis statistik deskriptif yang terdiri dari data identitas (profil) responden dan data jawaban variabel penelitian.

1. Profil Responden

Profil responden dalam penelitian ini meliputi: jenis kelamin, usia, jenis pekerjaan, tingkat pendidikan dan tahun sensus.

a. Jenis Kelamin

Tabel 13 menunjukkan mayoritas responden berjenis kelamin laki-laki 63%. Sebanyak 37% responden berjenis kelamin perempuan.

Tabel 13. Komposisi Responden berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Laki-laki	63	63
2.	Perempuan	37	37
Jumlah		100	100

Sumber: Lampiran 1.

b. Usia

Data responden berdasarkan usia, dideskripsikan untuk menentukan rentang usia responden yang terlihat dominan. Hal ini dilakukan dengan menggunakan distribusi frekuensi atau tabel frekuensi.

Berikut penghitungan distribusi frekuensi usia responden.

$$I = \frac{\text{nilai tertinggi} - \text{nilai terendah}}{\text{Interval kelas}} = \frac{R}{k}$$

Berdasarkan banyaknya data, dalam perhitungan interval kelas peneliti menggunakan formula Struges.

$$k = 1 + 3,322 \log n$$

$$k = 1 + 3,322 \log 100$$

$$k = 1 + 6,644$$

$$k = 7,644$$

Diketahui usia tertinggi 61 tahun dan terendah 19 tahun.

$$R = 61 - 19 = 42$$

$$I = 42/7,644$$

$$I = 5,49$$

Distribusi frekuensi kategori usia dari 100 responden dapat dilihat pada Tabel 14.

Tabel 14. Distribusi Frekuensi Usia Responden

No.	Usia (Tahun)	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	19 – 24	11	11
2.	25 – 30	32	32
3.	31 – 36	15	15
4.	37 – 42	21	21
5.	43 – 48	9	9
6.	49 – 54	9	9
7.	55 – 60	2	2
8.	> 60	1	1
Jumlah		100	100

Sumber: Lampiran 1.

Peneliti mengkategorikan usia responden menjadi delapan kategori umur. Berdasarkan pengolahan data yang telah dilakukan, dapat diketahui bahwa mayoritas responden berusia pada rentang usia 25 - 30 tahun, yaitu sebanyak 32 orang. Selanjutnya responden dengan rentang usia 37 - 42 tahun sebanyak 21 orang. Responden dengan usia di atas 60 tahun paling sedikit yaitu hanya 1 orang. Hal ini dapat diartikan bahwa mayoritas WP OP terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi yang menjadi responden penelitian berada pada usia produktif.

c. Jenis Pekerjaan

WP OP yang menjadi responden dikelompokkan juga berdasarkan jenis pekerjaan yang pengelompokkannya dibagi menjadi enam kelompok jenis pekerjaan. Berdasarkan pengolahan data, diketahui bahwa mayoritas responden yang memiliki jenis pekerjaan sebagai Wiraswasta dengan persentase sebanyak 41%. Sementara itu, responden dengan jenis pekerjaan di LSM dan Buruh paling sedikit yaitu sebanyak 3 orang. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Komposisi Responden Berdasarkan Jenis Pekerjaan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	Peagawai Negeri	13	13
2.	Peagawai Swasta	33	33
3.	Wiraswasta	41	41
4.	LSM, dan Buruh	3	3
5.	Tidak Ada Informasi	10	10
Jumlah		100	100

Sumber: Lampiran 1.

d. Tingkat Pendidikan

Latar belakang pendidikan responden dibagi menjadi 9 kategori, dari SD/MI hingga S-3 dapat dilihat pada Tabel 16.

Tabel 16. Komposisi Responden Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	SD/MI	2	2
2.	SMA/SMK	37	37
3.	D-1	8	8
4.	D-2	2	2
5.	D-3	12	12
6.	S-1	24	24
7.	S-2	2	2
8.	S-3	1	1
9.	Tidak Ada Informasi	12	12
Jumlah		100	100

Sumber: Lampiran 1.

Mayoritas responden memiliki latar belakang jenjang terakhir SMA/SMK sejumlah 37 orang responden (37%). Sementara itu, diketahui bahwa responden yang memiliki latar belakang jenjang terakhir S-3 hanya 1 orang dan ada 12 responden yang tidak memberi informasi mengenai pendidikannya.

e. Tahun Sensus

Tahun sensus responden dibagi menjadi 3 kategori, dari tahun 2011 hingga 2013. Ilustrasi tersebut dapat dilihat pada Tabel 17.

Tabel 17. Komposisi Tahun Sensus

No	Tahun Sensus	Jumlah (Orang)	Persentase (%)
1.	2011	38	38
2.	2012	43	43
3.	2013	19	19
Jumlah		100	100

Sumber: Lampiran 1.

Mayoritas jumlah tahun sensus responden kebanyakan pada tahun 2012 yaitu sejumlah 43 orang responden (43%). Selain itu, diketahui juga bahwa jumlah terbanyak kedua terjadi pada periode 2011 dengan jumlah 38 orang responden.

2. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif yang peneliti sajikan memaparkan jumlah rata-rata (*mean*) indikator dan *item* dari variabel penelitian dengan menggunakan tabel distribusi frekuensi. Proses pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *Software Microsoft Excel 2013*. Masing-masing tabel distribusi frekuensi beserta penjelasannya adalah sebagai berikut:

a. Distribusi Frekuensi Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Variabel pertama yang diukur adalah variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) yang terdiri dari 3 indikator yaitu Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$), Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$), dan Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$). Indikator Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$) terdiri dari 3 *item* yaitu Memberikan kesadaran WP mengenai pajak ($X_{1.1.1}$), Tercipta pengetahuan mengenai pajak ($X_{1.1.2}$), dan Meningkatkan ketertarikan WP terhadap pajak ($X_{1.1.3}$). Indikator Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$) terdiri dari 2 *item* yaitu Pelaksanaan sosialisasi perpajakan yang intensif ($X_{1.2.1}$), dan Kemudahan untuk dipahami ($X_{1.2.2}$). Indikator Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$) terdiri dari 2 *item* yaitu Informasi perpajakan yang tepat dan akurat ($X_{1.3.1}$), dan Kemudahan dalam memperoleh informasi perpajakan ($X_{1.3.2}$). Distribusi

Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan berdasarkan jawaban 100 orang responden dapat dilihat pada Tabel 18.

Tabel 18. Distribusi Frekuensi Variabel Sosialisasi Perpajakan

No	Indikator	Item	Alternatif Jawaban					Mean	
			SS	S	R	TS	STS	Item	Indikator
1.	Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$)	$X_{1.1.1}$	38	46	14	2	0	4,18	4,15
2.		$X_{1.1.2}$	41	50	9	0	0	4,34	
3.		$X_{1.1.3}$	28	44	22	6	0	3,94	
4.	Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$)	$X_{1.2.1}$	40	44	15	1	0	4,23	4,21
5.		$X_{1.2.2}$	37	46	15	2	0	4,18	
6.	Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$)	$X_{1.3.1}$	28	51	16	4	1	4,01	4,04
7.		$X_{1.3.2}$	30	52	13	4	1	4,06	
Mean Variabel Sosialisasi Perpajakan							4,13		

Sumber: Lampiran 2 dan 6.

Keterangan:

$X_{1.1.1}$: Memberikan kesadaran

$X_{1.1.2}$: Tercipta pengetahuan

$X_{1.1.3}$: Meningkatkan ketertarikan WP

$X_{1.2.1}$: Sosialisasi Perpajakan yang Intensif

$X_{1.2.2}$: Sosialisasi Perpajakan yang Jelas dan terarah

$X_{1.3.1}$: Informasi perpajakan yang tepat dan akurat

$X_{1.3.2}$: Kemudahan memperoleh informasi

Berdasarkan Tabel 18 diketahui bahwa pada indikator Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$) mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dilihat dengan *mean* indikator Peranan Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.1}$) sebesar 4,15. Berdasarkan pada indikator tersebut KPP telah memberikan sosialisasi yang mampu memberikan pemahaman bagi WP mengenai perpajakan. Hal ini dibuktikan dengan 46 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 4,18 pada *item* Memberikan kesadaran ($X_{1.1.1}$). Berdasarkan pada indikator tersebut juga dapat diketahui bahwa KPP telah memberikan sosialisasi kepada WP yang mampu memberikan pengetahuan mengenai pajak ($X_{1.1.2}$). Hal ini dibuktikan dengan 50 orang responden yang menyatakan setuju dan

mean sebesar 4,34 pada *item* Tercipta pengetahuan ($X_{1.1.2}$). Selain itu, pada indikator tersebut KPP telah memberikan sosialisasi kepada WP yang mampu memberikan pengetahuan mengenai pajak ($X_{1.1.3}$). Hal ini dibuktikan dengan 44 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 3,94 pada *item* Meningkatkan ketertarikan WP ($X_{1.1.3}$). Namun ada 22 orang responden yang menyatakan ragu-ragu atas pernyataan pada *item* Meningkatkan ketertarikan WP ($X_{1.1.3}$) mengenai sosialisasi dapat meningkatkan ketertarikan WP.

Selanjutnya pada indikator Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$) mayoritas responden juga menyatakan setuju. Dibuktikan dengan nilai *mean* sebesar 4,21 pada indikator Metode Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.2}$). Berdasarkan indikator tersebut responden menganggap bahwa sosialisasi yang diberikan oleh KPP secara intensif ($X_{1.2.1}$) telah sesuai dengan kebutuhan WP karena mayoritas responden menyatakan setuju. Dibuktikan dengan 40 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 4,23 pada *item* Sosialisasi Perpajakan yang Intensif ($X_{1.2.1}$). Selanjutnya pada *item* Sosialisasi Perpajakan yang Jelas dan terarah ($X_{1.2.2}$) mengenai sosialisasi perpajakan yang jelas dan terarah, diketahui bahwa mayoritas responden juga menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan 46 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 4,18 pada *item* Sosialisasi Perpajakan yang Jelas dan terarah ($X_{1.2.2}$).

Selanjutnya pada indikator Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$) mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan nilai

mean sebesar 4,04 pada indikator Media Sosialisasi Perpajakan ($X_{1.3}$). berdasarkan indikator tersebut KPP dianggap WP telah memberikan informasi perpajakan yang tepat dan akurat mengenai sosialisasi yang disampaikan, seperti yang terpapar pada *item* Informasi perpajakan yang tepat dan akurat ($X_{1.3.1}$) dalam hal ini mayoritas responden mengatakan setuju sebanyak 51 orang responden dengan *mean* sebesar 4,01. Sementara itu, pada *item* Kemudahan memperoleh informasi ($X_{1.3.2}$) sebanyak 52 orang responden mayoritas menyatakan setuju, yang berarti bahwa KPP telah memberikan kemudahan bagi responden untuk meminta atau mendapatkan informasi terkait perpajakan. Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan setuju dengan pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan oleh KPP, hal ini dapat di buktikan dengan *Mean* Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) sebesar 4,13.

b. Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (SPN) (X_2)

Variabel kedua yang diukur adalah Variabel Persepsi Wajib Pajak (WP) tentang Pelaksanaan SPN yang terdiri dari 2 indikator yaitu Peranan SPN ($X_{2.1}$), dan Sasaran SPN ($X_{2.2}$). Indikator Peranan SPN ($X_{2.1}$) terdiri dari 5 *item* yaitu Menyadarkan WP untuk membayar pajak ($X_{2.1.1}$), Menjaring WP baru ($X_{2.1.2}$), Memutakhirkan basis data masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak ($X_{2.1.3}$), Pembinaan terhadap WP akan semakin mudah ($X_{2.1.4}$), dan Memberikan edukasi kepada WP, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya ($X_{2.1.5}$). Indikator Sasaran SPN ($X_{2.2}$) terdiri dari 6 *item*

yaitu Tercipta keadilan kewajiban perpajakan ($X_{2.2.1}$), Pemerataan pembangunan ($X_{2.2.2}$), Mendukung pencapaian target dan pengamanan penerimaan Negara ($X_{2.2.3}$), Menyiapkan data yang akurat atas potensi pajak ($X_{2.2.4}$), Meningkatkan pelayanan DJP kepada WP yang berkeadilan ($X_{2.2.5}$), dan Melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada WP ($X_{2.2.6}$). Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN berdasarkan jawaban 100 orang responden dapat dilihat pada Tabel 19.

Tabel 19. Distribusi Frekuensi Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN

No	Indikator	Item	Alternatif Jawaban					Mean	
			SS	S	R	TS	STS	Item	Indikator
1.	Peranan Sensus Pajak Nasional ($X_{2.1}$)	$X_{2.1.1}$	28	49	21	2	0	4,03	4,06
2.		$X_{2.1.2}$	16	64	18	2	0	3,94	
3.		$X_{2.1.3}$	24	56	19	1	0	4,03	
4.		$X_{2.1.4}$	20	61	17	1	1	3,97	
5.		$X_{2.1.5}$	47	40	11	2	0	4,32	
6.	Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$)	$X_{2.2.1}$	33	53	12	2	0	4,17	4,12
7.		$X_{2.2.2}$	29	50	15	5	1	4,01	
8.		$X_{2.2.3}$	29	56	12	3	0	4,11	
9.		$X_{2.2.4}$	30	56	12	2	0	4,14	
10.		$X_{2.2.5}$	33	44	19	4	0	4,06	
11.		$X_{2.2.6}$	44	41	10	5	0	4,24	
Mean Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN								4,09	

Sumber: Lampiran 3 dan 6.

Keterangan:

$X_{2.1.1}$: Menyadarkan WP

$X_{2.1.2}$: Menjaring WP baru

$X_{2.1.3}$: Memutakhirkan basis data

$X_{2.1.4}$: Pembinaan semakin mudah

$X_{2.1.5}$: Memberikan edukasi kepada WP

$X_{2.2.1}$: Tercipta keadilan

$X_{2.2.2}$: Pemerataan pembangunan

$X_{2.2.3}$: Mendukung pencapaian target

$X_{2.2.4}$: Menyiapkan data yang akurat

$X_{2.2.5}$: Meningkatkan pelayanan DJP

$X_{2.2.6}$: Sosialisasi perpajakan secara langsung

Berdasarkan Tabel 19 diketahui bahwa pada indikator Peranan Sensus Pajak Nasional ($X_{2.1}$) mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dilihat dengan *mean* pada indikator Peranan Sensus Pajak Nasional ($X_{2.1}$) sebesar 4,06. Berdasarkan pada indikator tersebut pada *item* Menyadarkan WP ($X_{2.1.1}$) mengenai pernyataan menyadarkan WP untuk membayar pajak, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan 49 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 4,03 pada *item* Menyadarkan WP ($X_{2.1.1}$). Pada *item* Menjaring WP baru ($X_{2.1.2}$) dapat diketahui bahwa sensus pajak nasional telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjaring WP baru. Hal ini dibuktikan dengan 64 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 3,94 pada *item* Menjaring WP baru ($X_{2.1.2}$).

Berdasarkan indikator tersebut, pada *item* Memutakhirkan basis data ($X_{2.1.3}$) mengenai pernyataan tentang pemutakhiran basis data masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan 56 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 4,03 pada *item* Memutakhirkan basis data ($X_{2.1.3}$) yang berarti bahwa WP percaya bahwa sensus pajak nasional juga dilakukan untuk memutakhirkan basis data masyarakat yang sudah berkewajiban membayar pajak. Selanjutnya sensus pajak nasional juga dianggap telah memberikan kemudahan dalam pengarahannya dan pembinaan bagi WP karena mayoritas sebanyak 61 orang responden menyatakan setuju dan

nilai *mean* sebesar 3,97 pada *item* Pembinaan semakin mudah ($X_{2.1.4}$). Selanjutnya pada *item* Memberikan edukasi kepada WP ($X_{2.1.5}$) pernyataan tentang memberikan edukasi kepada WP, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya mayoritas responden menyatakan sangat setuju. Hal ini dibuktikan dengan 47 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan nilai *mean* sebesar 4,32 pada *item* Memberikan edukasi kepada WP ($X_{2.1.5}$).

Selanjutnya pada indikator Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$), mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* sebesar 4,12 pada indikator Sasaran Sensus Pajak Nasional ($X_{2.2}$). Berdasar indikator tersebut pada *item* tercipta keadilan ($X_{2.2.1}$) mengenai pernyataan terciptanya keadilan kewajiban perpajakan, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan dengan 53 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 4,17 pada *item* tercipta keadilan ($X_{2.2.1}$). Selanjutnya pada *item* Pemerataan pembangunan ($X_{2.2.2}$) mengenai pernyataan mewujudkan pemerataan pembangunan, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan dengan 50 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 4,01 pada *item* Pemerataan pembangunan ($X_{2.2.2}$). Berikutnya pada *item* Mendukung pencapaian target ($X_{2.2.3}$) mengenai pernyataan dukungan pencapaian target dan pengamanan penerimaan Negara, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan dengan 56 orang responden yang menyatakan setuju

dan nilai *mean* sebesar 4,11 pada *item* Mendukung pencapaian target (X_{2.2.3}).

Mayoritas responden menyatakan setuju pada *item* Menyiapkan data yang akurat (X_{2.2.4}), hal ini dibuktikan dengan dengan 56 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 4,14 pada *item* Menyiapkan data yang akurat (X_{2.2.4}) yang berarti bahwa WP percaya bahwa data dari sensus pajak nasional juga dipersiapkan untuk memetakan daerah-daerah lain yang berpotensi pajak. Selanjutnya responden menganggap bahwa sensus pajak nasional yang dilakukan oleh KPP mampu meningkatkan pelayanan kepada WP yang berkeadilan sesuai dengan kebutuhan mereka karena responden rata-rata mengatakan setuju sebanyak 44 orang responden dan nilai *mean* sebesar 4,06 pada *item* Meningkatkan pelayanan DJP (X_{2.2.5}). Selanjutnya pada *item* Sosialisasi perpajakan secara langsung (X_{2.2.6}) pernyataan tentang melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada WP, mayoritas responden menyatakan sangat setuju. Hal ini dibuktikan dengan 44 orang responden yang menyatakan sangat setuju dan nilai *mean* sebesar 4,24 pada *item* Sosialisasi perpajakan secara langsung (X_{2.2.6}). Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan setuju dengan pelaksanaan Sensus Pajak Nasional yang dilakukan oleh KPP, hal ini dapat dibuktikan dengan *Mean* pada Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X₂) sebesar 4,09.

c. Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (WP OP) (Y)

Variabel ketiga yang diukur adalah Variabel Kesadaran Wajib Pajak (WP) terdiri dari 2 indikator yaitu Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$), dan Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$). Indikator Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$) terdiri dari 4 *item* yaitu Inisiatif untuk membayar pajak ($Y_{1.1.1}$), Kewajiban Wajib Pajak sebagai warga negara ($Y_{1.1.2}$), Membayar Pajak dengan Sukarela ($Y_{1.1.3}$), dan Partisipasi WP dalam pembangunan dan pendanaan pengeluaran umum pemerintah ($Y_{1.1.4}$). Indikator Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$) terdiri dari 5 *item* yaitu Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu ($Y_{1.2.1}$), Melaporkan seluruh penghasilan ($Y_{1.2.2}$), WP memiliki tanggungjawab dalam menyetor pajak ($Y_{1.2.3}$), WP yang sudah memiliki NPWP wajib melapor kewajiban pajaknya ($Y_{1.2.4}$), dan Mengetahui fungsi dan manfaat pajak ($Y_{1.2.5}$). Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran Wajib Pajak berdasarkan jawaban 100 orang responden dapat dilihat pada Tabel 20.

Tabel 20. Distribusi Frekuensi Variabel Kesadaran WP.

No	Indikator	Item	Alternatif Jawaban					Mean	
			SS	S	R	TS	STS	Item	Indikator
1.	Kesadaran Perpajakan ($Y_{1.1}$)	$Y_{1.1.1}$	28	48	20	4	0	4,00	4,00
2.		$Y_{1.1.2}$	27	44	24	5	0	4,02	
3.		$Y_{1.1.3}$	27	50	15	7	1	3,95	
4.		$Y_{1.1.4}$	28	51	18	3	0	4,04	
5.	Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional ($Y_{1.2}$)	$Y_{1.2.1}$	36	44	18	2	0	4,14	4,04
6.		$Y_{1.2.2}$	20	46	28	6	0	3,80	
7.		$Y_{1.2.3}$	27	50	17	6	0	3,98	
8.		$Y_{1.2.4}$	21	59	17	3	0	3,98	
9.		$Y_{1.2.5}$	43	42	14	1	0	4,27	
Mean Variabel Kesadaran Wajib Pajak							4,02		

Sumber: Lampiran 4 dan 6.

Keterangan:

Y_{1.1.1} : Inisiatif membayar pajak

Y_{1.1.2} : Kewajiban WP sebagai Warga Negara

Y_{1.1.3} : Membayar dengan Sukarela

Y_{1.1.4} : Partisipasi WP dalam pembangunan

Y_{1.2.1} : Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu

Y_{1.2.2} : Melaporkan seluruh penghasilan

Y_{1.2.3} : WP memiliki tanggungjawab menyetor pajak

Y_{1.2.4} : WP wajib melapor kewajiban pajaknya

Y_{1.2.5} : Mengetahui fungsi dan manfaat pajak

Berdasarkan Tabel 20 diketahui bahwa pada indikator Kesadaran Perpajakan (Y_{1.1}) mayoritas responden menyatakan setuju.

Hal ini dapat dilihat dengan *mean* indikator Kesadaran Perpajakan (Y_{1.1}) sebesar 4,00. Berdasarkan indikator tersebut dapat diketahui bahwa sosialisasi perpajakan dan sensus pajak nasional telah memberikan kesadaran bagi WP untuk berinisiatif membayar pajak. Hal ini dibuktikan dengan 48 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 4,00 pada *item* Inisiatif membayar pajak (Y_{1.1.1}).

Selanjutnya pada *item* Kewajiban WP sebagai Warga Negara (Y_{1.1.2}) pernyataan tentang pajak merupakan kewajiban WP sebagai Warga Negara, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan 44 orang responden yang menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 4,02 pada *item* Kewajiban WP sebagai Warga Negara (Y_{1.1.2}) yang berarti bahwa mereka memahami kewajiban WP sebagai warga negara. Akan tetapi beberapa responden menganggap bahwa kewajiban dalam membayar pajak mungkin masih menjadi suatu hal yang cenderung dihindari oleh WP. Hal ini terbukti sebanyak 24 orang

responden yang menyatakan ragu-ragu pada *item* Kewajiban WP sebagai Warga Negara (Y_{1.1.2}).

Berikutnya sebanyak 50 orang responden mayoritas menyatakan setuju dan nilai *mean* sebesar 3,95 pada *item* Membayar dengan Sukarela (Y_{1.1.3}) tentang pernyataan membayar pajak dengan sukarela, responden menganggap telah memenuhi kewajiban perpajakannya. Sementara pada *item* Partisipasi WP dalam pembangunan (Y_{1.1.4}), sebanyak 51 orang responden menyatakan setuju dengan nilai *mean* sebesar 4,04, yang berarti bahwa dalam melakukan kewajiban perpajakannya di KPP responden telah ikut berpartisipasi dalam pendanaan dan pengeluaran umum pemerintah.

Selanjutnya pada indikator Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional (Y_{1.2}), mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dibuktikan dengan nilai *mean* sebesar 4,04 pada indikator Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional (Y_{1.2}). Pada *item* Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu (Y_{1.2.1}) pernyataan tentang pelaporan kewajiban perpajakan tepat waktu, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dibuktikan dengan 44 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 4,14 pada *item* Melaporkan kewajiban perpajakan tepat waktu (Y_{1.2.1}). Pada *item* Melaporkan seluruh penghasilan (Y_{1.2.2}) sebanyak 46 orang responden menyatakan setuju dengan nilai *mean* sebesar 3,80, yang berarti bahwa mereka setuju untuk melaporkan seluruh penghasilan ketika ikut berpartisipasi langsung

dalam pelaksanaan sensus pajak nasional. Namun, beberapa responden menyatakan bahwa mereka masih ragu-ragu untuk menyampaikan seluruh penghasilan mereka ketika mengikuti atau berpartisipasi langsung dalam pelaksanaan sensus pajak nasional. Hal ini dapat dibuktikan sebanyak 28 orang responden yang menyatakan ragu-ragu pada *item* Melaporkan seluruh penghasilan (Y_{1.2.2}).

Berdasarkan pada indikator Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional (Y_{1.2}) pada *item* WP memiliki tanggungjawab menyetor pajak (Y_{1.2.3}) dengan pernyataan tentang WP memiliki tanggungjawab dalam menyetor pajak, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dibuktikan dengan 50 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 3,98 pada *item* WP memiliki tanggungjawab menyetor pajak (Y_{1.2.3}). Selanjutnya pada *item* WP wajib melapor kewajiban pajaknya (Y_{1.2.4}) dengan pernyataan tentang WP yang sudah memiliki NPWP wajib melapor kewajiban pajaknya, mayoritas responden menyatakan setuju. Hal ini dapat dibuktikan dengan 59 orang responden yang menyatakan setuju dan *mean* sebesar 3,98 pada *item* WP wajib melapor kewajiban pajaknya (Y_{1.2.4}).

Responden menganggap bahwa dengan mengikuti sosialisasi perpajakan dan sensus pajak nasional yang dilakukan oleh KPP responden semakin mengetahui fungsi dan manfaat pajak, responden mayoritas menyatakan sangat setuju dalam *item* Mengetahui fungsi dan manfaat pajak (Y_{1.2.5}) dengan 43 orang responden dengan nilai *mean*

sebesar 4,27. Hasil ini dapat diartikan bahwa sosialisasi perpajakan dan kebijakan sensus pajak nasional yang diimplementasikan ke masyarakat dapat dijadikan sebagai program yang mendukung peningkatan kesadaran perpajakan dari WP. Secara keseluruhan responden mayoritas menyatakan setuju berdasarkan indikator kesadaran perpajakan, sosialisasi perpajakan dan sensus pajak nasional, hal ini dapat di buktikan *Mean Variabel Kesadaran Wajib Pajak (Y)* sebesar 4,02.

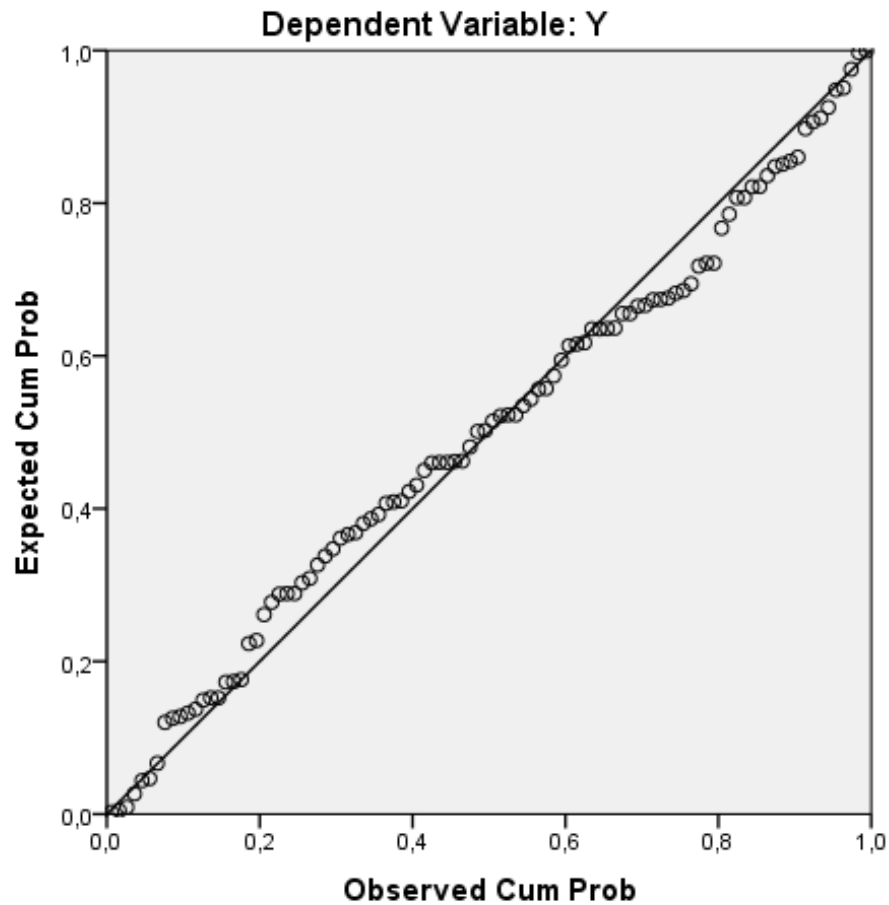
D. Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis

1. Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji Normalitas

Uji Normalitas merupakan salah satu prasyarat sebelum dilakukan analisis regresi linier berganda. Penulis melakukan uji normalitas dengan menggunakan metode grafik *normal probability plot*. Metode *normal probability plot* merupakan metode yang mudah dipahami, namun dapat memberikan hasil yang subyektif. Gambar 10 menunjukkan hasil uji normalitas dengan metode *normal probability plot*. Hasil uji normalitas dari metode ini menggambarkan bahwa titik-titik mengikuti dan merapat di sekitar garis diagonal. Berdasarkan gambar tersebut dapat disimpulkan bahwa data berdistribusi normal dan persyaratan normalitas pada model regresi ini telah terpenuhi. Hasil pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 10.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Gambar 10. Grafik *Normal Probability Plot*

Sumber: Lampiran 7.

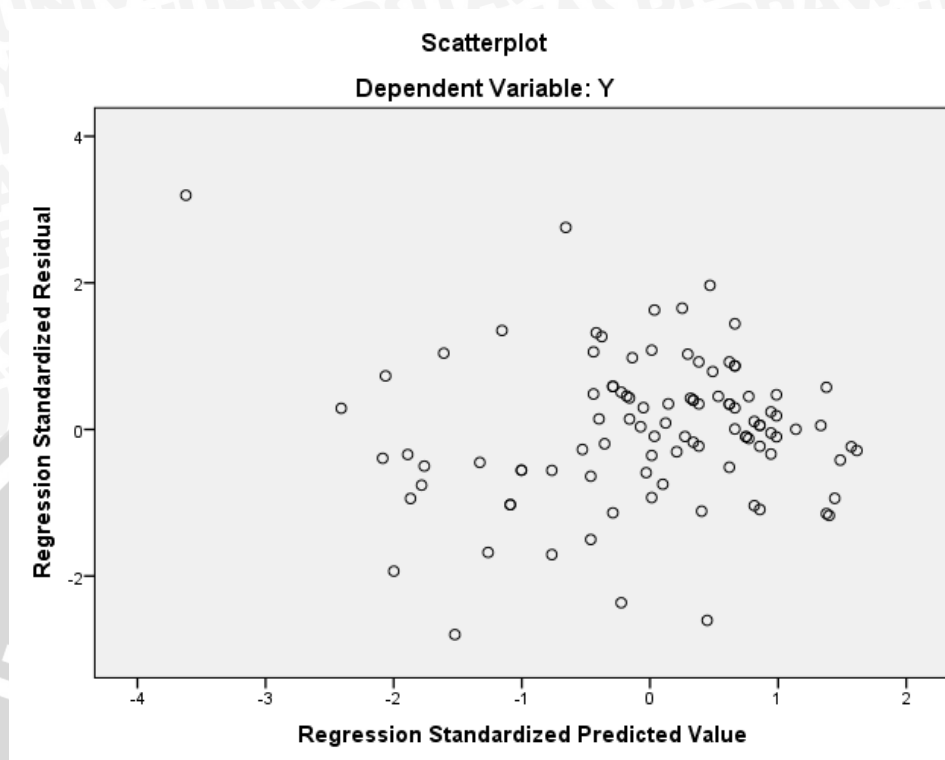
b. Uji Multikolinearitas

Uji asumsi klasik selanjutnya adalah uji multikolinearitas. Syarat untuk melakukan analisis regresi adalah tidak adanya gejala multikolinearitas. Pengujian multikolinearitas dalam penelitian ini menggunakan dengan melihat nilai *Tolerance* dan *Variance Inflating Factors* (VIF). Indikasi bahwa pada model regresi yang terbentuk tidak terjadi gejala multikolinearitas adalah apabila nilai *Tolerance* $> 0,1$ dan nilai VIF < 10 .

Hasil perhitungannya dapat dilihat pada Lampiran 7 dengan gambaran nilai VIF dari setiap variabel independen yakni Sosialisasi Perpajakan (X_1), dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2). Dapat diketahui bahwa pada kolom *Collinearity Statistics* nilai VIF dari kedua variabel independen berturut-turut sama yaitu 1,166. Selain itu nilai *Tolerance* pada dua variabel independen $> 0,1$ yaitu masing-masing 0,858. Karena seluruh nilai VIF < 10 dan nilai *Tolerance* $> 0,1$ maka disimpulkan tidak terjadi gejala multikolinearitas dalam model regresi antara variabel-variabel independen dalam penelitian.

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas merupakan uji prasyarat ketiga untuk melakukan analisis regresi. Hasil yang diharapkan untuk dapat melakukan analisis regresi adalah tidak adanya gejala heteroskedastisitas. Pengujian heteroskedastisitas yang dilakukan menggunakan metode analisis grafik *scatterplot*. Gambaran grafik *scatterplot* pada Gambar 11 menunjukkan bahwa titik-titik menyebar secara acak dan tidak membentuk pola tertentu. Hal ini dapat diartikan bahwa tidak terjadi masalah heteroskedastisitas pada model regresi yang dibentuk, maka prasyarat tidak adanya heteroskedastisitas dengan menggunakan grafik *scatterplot* pada penelitian ini dapat terpenuhi. Adapun hasil pengujian ini dapat dilihat pada Gambar 11.



Gambar 11. Grafik *Scatterplot*

Sumber: Lampiran 7.

2. Hasil Uji Hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi linear berganda. Analisis ini digunakan karena penulis ingin mengetahui pengaruh dari dua variabel independen yakni Sosialisasi Perpajakan (X_1), dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) terhadap variabel dependennya yakni Kesadaran WP (Y). Hubungan dari pengaruh ini ditampilkan dalam bentuk persamaan regresi. Uji hipotesis yang dilakukan dengan menggunakan *software* IBM SPSS versi 22.0 terdiri dari:

a. Analisis Regresi Linear Berganda

Hasil pengujian hipotesis dengan model analisis regresi berganda menghasilkan suatu persamaan yang menunjukkan hubungan

antara variabel-variabel independen dengan variabel dependennya. Untuk membentuk persamaan regresi linear berganda dibutuhkan nilai-nilai koefisien untuk mengganti variabel β_0 , β_1 , β_2 dan e. Nilai-nilai koefisien ini dapat dilihat pada Tabel 21 kolom *unstandardized coefficients*. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Linier Berganda dapat dilihat pada Tabel 21.

Tabel 21. Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi Berganda

Variabel Dependen	Variabel Independen	Unstandardized Coefficients		t hitung	Sig. t
		β	Std. Error		
Konstanta		-1,157	3,388	-0,342	0,733
Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Y)	Sosialisasi Perpajakan (X ₁)	1,006	0,101	9,912	0,000
	Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X ₂)	0,183	0,069	2,656	0,009
N	100				
R ²	0,593				
F hitung	72,974				
Sig. F	0,000				

Sumber: Lampiran 7.

Berdasarkan Tabel 21 tersebut dapat dibentuk persamaan sebagai berikut:

$$Y = -1,157 + 1,006X_1 + 0,183X_2$$

Hasil persamaan analisis regresi berganda dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Koefisien regresi variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) bernilai positif (1,006), artinya semakin banyak WP mengikuti Sosialisasi Perpajakan, maka Kesadaran WP juga akan semakin tinggi, dengan asumsi variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN bernilai tetap.
- (2) Koefisien regresi variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) bernilai positif (0,183), artinya semakin tinggi Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional, maka Kesadaran WP akan semakin tinggi dengan asumsi variabel Sosialisasi Perpajakan bernilai tetap.

b. Analisis koefisien determinasi (*adjusted R²*)

Tabel 21 hasil pengujian koefisien determinasi menunjukkan bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1), dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) secara bersama-sama memberikan pengaruh sebanyak 59,3% terhadap variabel Kesadaran WP (Y). Sedangkan 40,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

c. Uji F

Uji F digunakan untuk menguji pengaruh secara bersama-sama variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1), dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) terhadap Kesadaran WP (Y).

Langkah pertama dari uji F adalah dengan menyusun hipotesis. Hipotesis penelitian secara umum sudah disampaikan pada Bab II. Untuk menguji pengaruh secara bersama-sama, digunakan hipotesis pembandingan yang bersifat obyektif dan netral atau disebut juga hipotesis nol (H_0). Uji signifikansi dilihat dengan melihat nilai Signifikansi jika nilai Sig. F \leq 0,05, maka hubungan variabel tersebut signifikan.

Tabel 21 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 72,974 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y).

d. Uji t

Uji t dilakukan untuk menguji pengaruh setiap variabel independen terhadap variabel dependen secara parsial. Langkah pertama dari uji t adalah dengan menyusun hipotesis. Hipotesis penelitian secara umum sudah disampaikan pada bab II. Untuk menguji pengaruh parsial, digunakan hipotesis pembandingan yang bersifat obyektif dan netral atau disebut juga hipotesis nol (H_0).

Berikut adalah analisis uji t pada masing-masing variabel.

(1) Pengujian koefisien regresi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1)

Tabel 21 menunjukkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 1,006 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) secara parsial

berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) dengan asumsi variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) Konstan.

(2) Pengujian koefisien regresi Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2)

Tabel 21 menunjukkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,183 dengan probabilitas sebesar 0,009 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y) dengan asumsi variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) Konstan.

E. Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini merupakan gabungan penelitian-penelitian terdahulu yang mempelajari kedua unsur variabel independen tersebut secara terpisah maupun bersama-sama terhadap Kesadaran WP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh antara Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional terhadap Kesadaran WP baik secara parsial maupun bersama-sama. Peneliti tertarik untuk menggabungkan kedua variabel independen tersebut dalam satu penelitian untuk mengetahui apakah kedua variabel independen tersebut cukup kuat mempengaruhi Kesadaran WP.

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis diperoleh jawaban bahwa variabel Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus

Pajak Nasional berpengaruh terhadap Kesadaran WP. Adapun pembahasannya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) terhadap Kesadarn WP (Y).

Berdasarkan analisis koefisien determinasi, *adjusted* R^2 yang dihasilkan adalah 0,593 atau 59,3 %. Pengaruh sejumlah variabel lainnya yang tidak dijelaskan dalam penelitian ini mengambil porsi yang cukup besar yaitu 40,7%. Berdasarkan analisis hipotesis uji F, Tabel 21 menunjukkan nilai F_{hitung} sebesar 72,974 dengan probabilitas sebesar 0,000 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) dan Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y).

2. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan (X_1) terhadap Kesadaran WP (Y)

Tabel 21 menunjukkan nilai signifikansi Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) adalah 0,000 ($p < 0,05$), sehingga dapat disimpulkan Sosialisasi Perpajakan (X_1) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y). Hasil pengujian ini sesuai dengan beberapa penelitian sebelumnya, seperti pada penelitian Rahmawati, Prasetyono, dan Rimawati, (2013) yang dalam hasil penelitiannya mereka mempunyai kesimpulan bahwa Sosialisasi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesadaran WP dalam membayar pajak. Objek dalam penelitian ini sama dengan yang diteliti Rahmawati, Prasetyono, dan Rimawati, (2013)

yang meneliti WP OP hasil yang diperoleh adalah sama, yakni Sosialisasi Perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran WP.

Penelitian di KPP Pratama Banyuwangi di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III menghasilkan adanya hubungan pengaruh antara sosialisasi terhadap kesadaran WP. Menurut penulis terdapat beberapa analisis yang menyebabkan faktor ini dapat mempengaruhi kesadaran WP khususnya di KPP Pratama Banyuwangi. Analisis ini akan dijelaskan pada pembahasan berikut:

a. Penerapan Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kesadaran WP

Analisis mengenai Sosialisasi Perpajakan terhadap tingkat kesadaran WP banyak berkaitan dengan jumlah responden yang mayoritas adalah WP OP yang sudah tanggap dan paham mengenai perpajakan. Berdasarkan profil responden pada Tabel 15 tentang komposisi responden berdasarkan jenis pekerjaan, mayoritas responden yang menjadi sampel penelitian berasal dari kalangan wiraswasta yakni sebesar 41%. Dalam pemenuhan kewajiban perpajakan wiraswasta mempunyai pekerjaan dan tugas yang relatif lebih kompleks dari jenis pekerjaan lain. Wiraswasta dalam memenuhi kewajiban perpajakannya antara lain melakukan penghitungan, penyetoran dan pelaporan sendiri (*self assesment*). Dapat dibandingkan dengan pegawai negeri, swasta dan karyawan perusahaan yang dalam pelaporan pajaknya masih dilakukan oleh pemungut atau bendahara (*witholding system*). dapat dikatakan bahwa sosialisasi perpajakan dalam hal ini memiliki peran yang dominan

untuk meningkatkan kesadaran WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

- b. Sosialisasi berupa pelaksanaan yang intensif menjamin meningkatkan kesadaran WP.

Hal ini menunjukkan bahwa WP sudah merasakan sosialisasi perpajakan yang memadai dan mudah dipahami yang dilakukan KPP. Sosialisasi perpajakan yang diterapkan secara berkesinambungan akan memberikan peningkatan pengetahuan bagi WP. Hal ini dapat diartikan bahwa implementasi sosialisasi perpajakan sudah diterapkan dengan baik dan benar yang terbukti mampu memberikan dorongan pada WP untuk lebih baik dalam menyelesaikan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi diketahui terdiri dari sosialisasi langsung dan tidak langsung. Jika perbandingan kedua sosialisasi diterapkan berdasarkan suatu kebijakan yang ditujukan kepada WP atau masyarakat secara umum, maka tingkat keasadaran WP akan berkembang lebih baik. Dalam meningkatkan pengetahuan perpajakan kepada WP atau masyarakat secara umum, langkah-langkah yang telah dilakukan DJP antara lain adalah:

- (1) mengadakan perlombaan cerdas cermat (secara umum ditujukan untuk pelajar).
- (2) mengadakan seminar perpajakan (secara umum berkerjasama dengan instansi pendidikan).
- (3) Sosialisasi perpajakan yang dilakukan di berbagai media (Televisi, Radio, Media Cetak dan Internet).

- (4) Penyediaan website atau situs internet yang disediakan oleh DJP sebagai sarana yang dapat dimanfaatkan untuk mencari informasi dan pemenuhan kewajiban perpajakan oleh WP.
- (5) Kring pajak, salah satu layanan *call center* dari DJP untuk membantu WP atau masyarakat yang ingin mencari informasi atau sekedar ingin bertanya seputar pajak.

3. Pengaruh Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional

(X₂) terhadap Kesadaran WP (Y)

Tabel 21 menunjukkan nilai koefisien regresi (β) sebesar 0,183 dengan probabilitas sebesar 0,009 ($p < 0,05$), maka dapat disimpulkan bahwa Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X₂) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak (Y). Skor rata-rata persepsi WP tentang pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dari data responden juga menunjukkan bahwa persepsi WP terhadap Sensus Pajak Nasional pada wilayah responden tinggal cukup tinggi, dengan nilai *mean* sebesar 4,09. Hal ini menunjukkan secara umum Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional sudah dapat diterima dan mendapat respon yang baik di lingkungan masyarakat.

Sasaran Sensus Pajak Nasional dalam persepsi responden memiliki pengaruh yang baik mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan yang berkeadilan. WP menganggap Peranan Sensus Pajak Nasional dapat menuntun WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dan menambah wawasan perpajakan secara merata, karena dalam pelaksanaannya pegawai

pajak melakukan sensus secara langsung ke masyarakat berdasarkan area atau *cluster* yang telah ditentukan.

Dalam penelitian ini diketahui bahwa Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh signifikan secara parsial terhadap Kesadaran WP yang terdaftar pada KPP Pratama Banyuwangi di lingkungan Kanwil DJP Jawa Timur III. Terciptanya kebijakan yang mempunyai peranan yang diterapkan turun langsung kepada WP yang terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi, peneliti berasumsi bahwa para WP memiliki anggapan positif dari kebijakan yang diterapkan salah satunya kebijakan Sensus Pajak Nasional tersebut.

4. Variabel yang berpengaruh dominan terhadap Kesadaran WP (Y).

Dari hasil analisis regresi berganda, variabel yang lebih dominan adalah variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1). Nilai t_{hitung} pada Tabel 21 Variabel Sosialisasi Perpajakan (X_1) yaitu 9,912, sedangkan nilai t_{hitung} Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2) adalah 2,656. Telah dirumuskan sebelumnya pada bab II bahwa peneliti mengambil dugaan sementara pada hipotesis ketiga (H_3) yang menyatakan bahwa Sosialisasi Perpajakan (X_1) berpengaruh dominan terhadap Kesadaran WP (Y). Berdasarkan hasil tersebut maka hipotesis ketiga (H_3) diterima, karena nilai t_{hitung} dari Sosialisasi Perpajakan (X_1) lebih besar dari Persepsi WP tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X_2).

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya, terdapat beberapa hal yang menjadi kesimpulan dalam penelitian ini, antara lain:

1. Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
2. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
3. Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.
4. Sosialisasi Perpajakan berpengaruh dominan terhadap Kesadaran Wajib Pajak.

B. Saran

Penelitian menyimpulkan bahwa Sosialisasi Perpajakan, dan Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional secara bersama-sama maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Kesadaran Wajib Pajak. Berdasarkan hal tersebut, penulis menyumbangkan beberapa saran yang dapat dijadikan bahan masukan bagi beberapa pihak.

1. Saran bagi penelitian selanjutnya:

- a. Sampel penelitian hendaknya diperluas ruang lingkup penelitian agar dapat memberikan gambaran yang mewakili populasi KPP yang diteliti.
- b. Dalam metode analisis sebaiknya menggunakan analisis faktor untuk mencari faktor-faktor yang benar-benar mempengaruhi kesadaran Wajib Pajak secara komprehensif dan berdasarkan teori yang relevan.
- c. Peneliti yang tertarik untuk melakukan kajian di bidang yang sama dapat mencoba menganalisis pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dengan menambahkan variabel Independen berbeda yang tidak disinggung pada model persamaan disini misalnya: Karakteristik Wajib Pajak dan/atau Pengetahuan Wajib Pajak. Hal ini dapat dilakukan karena nilai koefisien determinasi dalam penelitian ini masih dapat ditingkatkan dengan adanya penambahan variabel Independen (bebas).
- d. Bagi peneliti selanjutnya yang tertarik mengkaji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak juga bisa menggunakan teknik analisis yang lebih berkembang lagi seperti analisis jalur (*path analysis*). Peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel Kepatuhan Wajib Pajak sebagai variabel endogenus sedangkan Sosialisasi Perpajakan, Persepsi dan Kesadaran Wajib Pajak disini sebagai variabel eksogenus agar memperoleh hasil yang berbeda dan lebih bermanfaat.

2. Saran bagi Instansi terkait:

- a. Dari analisis yang telah dilakukan maka peneliti menyarankan bahwa untuk meningkatkan Kesadaran Wajib Pajak, DJP dapat meningkatkan melalui program Sosialisasi Perpajakan yang dilakukan secara intensif dan Sensus Pajak Nasional yang dilaksanakan secara lebih merata.
- b. Membuka lembaga yang dapat menunjang pelaksanaan pelayanan di bidang perpajakan di wilayah Wajib Pajak yang jangkauannya cukup jauh dan waktu yang tidak sedikit untuk menuju lokasi KPP dalam melapor pajak, contoh: membuka *Tax Center* di wilayah – wilayah tertentu yang memiliki jangkauan cukup jauh dari KPP.
- c. DJP hendaknya tetap konsisten dalam melakukan Sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perpajakan sehingga tingkat Kesadaran masyarakat mengenai Perpajakan dapat lebih meningkat.
- d. Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan evaluasi, strategi dan prediksi kedepan bagi DJP apakah Sosialisasi Perpajakan dan Sensus Pajak Nasional yang telah diimplementasikan sudah berjalan efektif atau belum.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2009). *Manajemen Penelitian*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Basalamah, A. S. (2004). *Perilaku Organisasi Memahami dan Mengelola Aspek Humaniora dalam Organisasi. Edisi Tiga*. Depok: Usaha Kami.
- Gujarati, D. (2006). *Ekometrika Dasar. Edisi 3. Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga. Terjemahan, alih bahasa Julius A. Mulyadi S.E.
- Hasan, I. (2002). *Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ihromi, T. (1999). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Indriantoro, N. d. dan Supomo. (2002). *Metodologi penelitian bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*. Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Mardiasmo. (2010). *Perpajakan. Edisi Revisi 2010*. Yogyakarta: ANDI.
- Nugoho, B. A. (2005). *Strategi Jitu Memilih Metode Statistik Penelitian Dengan SPSS. Edisi Pertama*. Yogyakarta: ANDI.
- Priyatno, D. (2013). *Analisis Korelasi, Regresi dan Multivariate Dengan SPSS. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Gava Media.
- Resmi, S. (2009). *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Jakarta: Penerbit salemba Empat.
- Robbins, S. P. (2008). *Perilaku Organisasi. Ed.12*. Jakarta: Salemba Empat.
- Santoso, S. (2001). *Buku Latihan SPSS Statistik Parametrik*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Sekaran, U. (2006). *Research Methods for Business Terjemahan Edisi 4 Buku 2*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.
- Singarimbun, M. dan Effendi, S. (1989). *Metode Penelitian Survei. Edisi Revisi*. Jakarta: LP3ES.
- Suandy, E. (2009). *Hukum Pajak. Ed.4*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiyono. (2010). *Statistika untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- _____. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

Sujarweni, V. W. (2014). *SPSS Untuk Penelitian. Cetakan Pertama*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.

Sumarsan, T. (2012). *Sensus Pajak Nasional Siapa Takut?.* Jakarta: Penerbit PT. Indeks.

Artikel dan Jurnal

Direktorat Jenderal Pajak. 2009. *Reformasi DJP: Silent Revolution*, Jakarta.

Rohmawati, Prasetyono, Rimawati. 2013. *Pengaruh Sosialisasi Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Tingkat Kesadaran Dan Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Kegiatan Usaha dan Pekerjaan Bebas pada KPP Pratama Gresik Utara)*. Madura: Program Studi Akuntansi Universitas Trunojoyo Madura.

Dewinta, Rinta Mulia. 2012. *Pengaruh Persepsi Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional dan Kesadaran Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta*. *Diponegoro Journal of Accounting* Vol. 1, No. 2 Tahun 2012. Hal. 1-9.

Rohman, M. Farid Nor. 2013. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Persepsi Wajib Pajak Tentang Sanksi Perpajakan, Dan Kualitas Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. Yogyakarta: Fakultas Bisnis Dan Teknologi Informasi Universitas Teknologi Yogyakarta.

Shofia, 2013. *Pengaruh Program Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kota Malang*. Malang: Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya Malang

Suryadi, 2006. *Model Hubungan Kausal Kesadaran, Pelayanan, Kepatuhan Wajib Pajak dan Pengaruhnya terhadap kinerja Penerimaan Pajak (survei diwilayah jawa timur)*. *Jurnal Keuangan Publik* Volume 4 No. 1, April 2006, halaman 105-121.

Peraturan-peraturan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 149/PMK.03/2011 tanggal 12 September 2011 tentang Sensus Pajak Nasional.

Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-31/PJ/2013 tentang pedoman teknis Sensus Pajak Nasional.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Dan Intensifikasi Pajak.

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak: SE-44/PJ/2013 tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional.

Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan.

Surat Kabar dan Internet

Radar Genteng. 2012. *Jaring 15.000 WP baru, Kantor Pajak gelar Sensus*, Hal:31. Banyuwangi, terbit: Rabu 2 mei 2012.

Anonim. 2013. *Daya pikat banyuwangi*. <http://www.menpan.go.id/cerita-sukses-rb/1677-7-daya-pikat-banyuwangi>. Diakses pada Januari 2014.

Anonim. 2013. *Sensus Pajak Digiatkan Lagi*. <http://www.bisniskeuangan.kompas.com/read/2013/02/11/02171978/Sensus.Pajak.Digiatkan.Lagi>. Diakses pada Agustus 2013.

Anonim. 2013. *kepedulian kita untuk kemakmuran bersama*. <http://news.detik.com/read/2013/08/26/010002/2339949/727/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>. diakses pada Agustus 2013.

Direktorat Jenderal Pajak. 2012. *Strategi meningkatkan kepatuhan wajib pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/strategi-meningkatkan-kepatuhan-wajib-pajak>. Diakses pada Januari 2014.

_____. 2012. *Mari sukseskan sensus pajak nasional wujud ketaatan kita membayar pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/mari-sukseskan-sensus-pajak-nasional-wujud-ketaatan-kita-membayar-pajak>. Diakses pada Januari 2014.

_____. 2012. *Sensus pajak nasional*. <http://www.pajak.go.id/content/sensus-pajak-nasional>, Diakses pada Agustus 2013.

_____. 2013. *Memaknai hari kemerdekaan wujudkan kesadaran bayar pajak*. <http://www.pajak.go.id/content/memaknai-hari-kemerdekaan-wujudkan-kesadaran-bayar-pajak>, diakses pada Januari 2014.

_____. 2013. *Bimbingan Teknis Sensus Pajak Nasional 2013 Kanwil DJP Jawa Timur II*. <http://www.pajak.go.id/node/8417?lang=en>. Diakses pada Januari 2014.

Wijaya, Erikson. 2012. *Mengapresiasi kinerja ditjen pajak kiprah tantangan dan arah kebijakan*. <http://www.pajak.go.id/content/article/mengapresiasi-kinerja-ditjen-pajak-kiprah-tantangan-dan-arrah-kebijakan>. diakses pada Agustus 2013.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Identitas Responden

No.	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jenis Pekerjaan	Alamat	Tahun Sensus
1.	27	Laki-laki	TAI*	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2013
2.	30	Perempuan	SMA	TAI*	Mojopanggung - Banyuwangi	2012
3.	27	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Kalipuro - Banyuwangi	2011
4.	25	Perempuan	TAI*	TAI*	Banyuwangi	2012
5.	27	Laki-laki	D-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
6.	20	Perempuan	D-1	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2011
7.	25	Perempuan	D-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
8.	30	Laki-laki	D-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
9.	38	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Genteng - Banyuwangi	2012
10.	39	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2013
11.	48	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2011
12.	42	Perempuan	S-1	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2013
13.	50	Perempuan	S-2	TAI*	Banyuwangi	2012
14.	42	Perempuan	TAI*	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2011
15.	40	Laki-laki	SMA	TAI*	Singojuruh - Banyuwangi	2011
16.	50	Laki-laki	SD	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2013
17.	32	Laki-laki	S-3	Wiraswasta	Giri - Banyuwangi	2012
18.	53	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2011
19.	30	Laki-laki	S-2	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2011
20.	43	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2011
21.	35	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2012
22.	37	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Singojuruh - Banyuwangi	2012
23.	42	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2012
24.	43	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Kepatihan - Banyuwangi	2013
25.	43	Laki-laki	TAI*	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2012
26.	47	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Singojuruh - Banyuwangi	2012
27.	42	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Giri - Banyuwangi	2012
28.	54	Laki-laki	TAI*	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2013
29.	32	Laki-laki	TAI*	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
30.	35	Laki-laki	TAI*	TAI*	Banyuwangi	2012
31.	24	Laki-laki	S-1	Wiraswasta	Banyuwangi	2012
32.	37	Laki-laki	TAI*	TAI*	Rogojampi Banyuwangi	2011
33.	51	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Tegaldlimo - Banyuwangi	2013
34.	39	Laki-laki	S-1	LSM	Banyuwangi	2012
35.	31	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Cluring - Banyuwangi	2011
36.	39	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Banyuwangi	2013

Lanjutan Lampiran 1.

No.	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jenis Pekerjaan	Alamat	Tahun Sensus
37.	35	Laki-laki	TAI*	TAI*	Banyuwangi	2012
38.	28	Laki-laki	S-1	Wiraswasta	Selorejo - Banyuwangi	2011
39.	27	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Gambiran - Banyuwangi	2013
40.	30	Laki-laki	D-3	Wiraswasta	Krajan - Bayuwangi	2011
41.	40	Perempuan	SMA	Pegawai Swasta	Muncar - Banyuwangi	2011
42.	24	Perempuan	S-1	Wiraswasta	Cluring - Banyuwangi	2011
43.	33	Perempuan	SMA	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2011
44.	24	Perempuan	D-3	Pegawai Swasta	Srono - Banyuwangi	2011
45.	27	Laki-laki	D-1	Pegawai Swasta	Rogojampi Banyuwangi	2012
46.	29	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Srono - Banyuwangi	2012
47.	26	Laki-laki	D-3	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
48.	54	Perempuan	TAI*	Wiraswasta	Banyuwangi	2012
49.	54	Laki-laki	TAI*	Wiraswasta	Cluring - Banyuwangi	2012
50.	30	Perempuan	D-2	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
51.	32	Laki-laki	D-3	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
52.	29	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Kalibaru - Banyuwangi	2011
53.	45	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Genteng - Banyuwangi	2012
54.	32	Perempuan	D-2	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
55.	26	Laki-laki	S-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
56.	37	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
57.	41	Laki-laki	SD	Buruh	Songgon - Banyuwangi	2012
58.	39	Laki-laki	S-1	Wiraswasta	Genteng - Banyuwangi	2012
59.	21	Laki-laki	SMK	Pelajar	Srono - Banyuwangi	2013
60.	37	Perempuan	D-3	Pegawai Negeri	Muncar - Banyuwangi	2011
61.	43	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Kalipuro - Banyuwangi	2011
62.	32	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Licin - Banyuwangi	2011
63.	27	Perempuan	S-1	Wiraswasta	Muncar - Banyuwangi	2011
64.	32	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Genteng - Banyuwangi	2013
65.	41	Perempuan	SMA	TAI*	Karangrejo - Banyuwangi	2013
66.	28	Laki-laki	D-3	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
67.	22	Perempuan	SMA	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
68.	26	Perempuan	S-1	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2012
69.	25	Perempuan	D-3	Wiraswasta	Purwoharjo - Banyuwangi	2011
70.	24	Laki-laki	S-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
71.	23	Perempuan	S-1	TAI*	Banyuwangi	2011
72.	44	Perempuan	TAI*	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2012
73.	31	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
74.	54	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Gambiran - Banyuwangi	2012

Lanjutan Lampiran 1.

No.	Umur	Jenis Kelamin	Pendidikan Terakhir	Jenis Pekerjaan	Alamat	Tahun Sensus
75.	25	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Kalipuro - Banyuwangi	2011
76.	22	Perempuan	SMA	Wiraswasta	Kalibendo - Banyuwangi	2011
77.	19	Laki-laki	SMK	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2013
78.	34	Laki-laki	D-3	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2011
79.	25	Laki-laki	S-1	TAI*	Banyuwangi	2013
80.	38	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Genteng - Banyuwangi	2013
81.	29	Perempuan	S-1	Wiraswasta	Bangorejo - Banyuwangi	2013
82.	40	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Kalibaru - Banyuwangi	2012
83.	44	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
84.	27	Perempuan	D-3	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
85.	23	Laki-laki	D-3	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
86.	40	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Banyuwangi	2012
87.	32	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
88.	25	Perempuan	S-1	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
89.	39	Laki-laki	S-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012
90.	25	Perempuan	D-1	Wiraswasta	Banyuwangi	2011
91.	28	Perempuan	S-1	Pegawai Swasta	Kalipuro - Banyuwangi	2011
92.	59	Laki-laki	D-1	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2012
93.	27	Laki-laki	D-3	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2013
94.	32	Laki-laki	S-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2013
95.	50	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Genteng - Banyuwangi	2011
96.	58	Laki-laki	SMA	Wiraswasta	Genteng - Banyuwangi	2011
97.	26	Laki-laki	D-3	Wiraswasta	Kabat - Banyuwangi	2013
98.	61	Laki-laki	SMA	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2011
99.	29	Perempuan	S-1	Pegawai Negeri	Banyuwangi	2012
100.	29	Laki-laki	D-1	Pegawai Swasta	Banyuwangi	2012

Lampiran 2. Tabulasi Variabel Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan (X ₁)											
No.	X _{1.1.1}	X _{1.1.2}	X _{1.1.3}	X _{1.1}	X _{1.2.1}	X _{1.2.2}	X _{1.2}	X _{1.3.1}	X _{1.3.2}	X _{1.3}	X ₁
1.	5	5	3	13	5	5	10	5	5	10	33
2.	4	5	5	14	4	3	7	4	5	9	30
3.	4	4	5	13	4	5	9	4	3	7	29
4.	4	5	4	13	4	5	9	5	4	9	31
5.	3	4	3	10	3	4	7	4	3	7	24
6.	4	5	4	13	5	4	9	5	4	9	31
7.	2	3	2	7	3	3	6	2	2	4	17
8.	3	4	3	10	3	4	7	3	3	6	23
9.	5	5	5	15	4	4	8	4	4	8	31
10.	4	4	4	12	5	4	9	4	4	8	29
11.	5	5	5	15	4	5	9	5	5	10	34
12.	4	4	4	12	4	4	8	5	5	10	30
13.	3	4	4	11	5	3	8	3	2	5	24
14.	5	5	5	15	5	5	10	5	5	10	35
15.	4	5	4	13	4	5	9	5	5	10	32
16.	2	3	2	7	3	3	6	4	4	8	21
17.	4	5	5	14	4	3	7	2	5	7	28
18.	4	4	5	13	5	5	10	5	4	9	32
19.	5	5	5	15	5	5	10	5	5	10	35
20.	5	5	5	15	4	4	8	4	5	9	32
21.	5	5	4	14	5	4	9	5	4	9	32
22.	4	4	5	13	5	4	9	5	5	10	32
23.	5	5	4	14	5	4	9	4	4	8	31
24.	4	4	5	13	5	5	10	5	5	10	33
25.	4	4	4	12	4	5	9	4	5	9	30
26.	4	4	4	12	5	4	9	4	5	9	30
27.	4	3	4	11	3	3	6	5	3	8	25
28.	4	4	4	12	4	4	8	4	5	9	29
29.	4	5	5	14	5	4	9	5	4	9	32
30.	4	5	4	13	4	4	8	4	4	8	29
31.	4	4	4	12	5	5	10	4	4	8	30
32.	4	4	4	12	5	4	9	4	4	8	29
33.	4	4	5	13	5	3	8	3	4	7	28
34.	5	5	4	14	5	5	10	4	4	8	32
35.	4	4	4	12	4	5	9	5	5	10	31
36.	4	5	3	12	4	4	8	5	4	9	29
37.	4	4	4	12	4	2	6	2	4	6	24
38.	3	4	3	10	5	4	9	4	4	8	27

Lanjutan Lampiran 2.

Sosialisasi Perpajakan (X ₁)											
No.	X _{1.1.1}	X _{1.1.2}	X _{1.1.3}	X _{1.1}	X _{1.2.1}	X _{1.2.2}	X _{1.2}	X _{1.3.1}	X _{1.3.2}	X _{1.3}	X ₁
39.	5	5	3	13	4	5	9	4	4	8	30
40.	4	5	4	13	5	5	10	4	4	8	31
41.	5	4	4	13	4	4	8	4	4	8	29
42.	4	5	3	12	4	4	8	4	5	9	29
43.	5	4	4	13	4	5	9	3	3	6	28
44.	5	5	3	13	5	4	9	3	4	7	29
45.	4	4	4	12	4	5	9	5	5	10	31
46.	4	5	4	13	3	4	7	4	4	8	28
47.	3	4	3	10	4	4	8	4	5	9	27
48.	5	5	5	15	5	4	9	4	4	8	32
49.	5	5	5	15	5	5	10	4	5	9	34
50.	4	3	2	9	3	2	5	4	3	7	21
51.	3	4	3	10	3	3	6	3	3	6	22
52.	4	5	4	13	5	5	10	5	4	9	32
53.	4	4	5	13	4	5	9	4	4	8	30
54.	4	4	3	11	3	3	6	3	4	7	24
55.	3	4	2	9	3	4	7	3	4	7	23
56.	3	3	4	10	4	3	7	3	4	7	24
57.	3	3	3	9	3	3	6	3	2	5	20
58.	4	4	5	13	5	4	9	4	4	8	30
59.	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	28
60.	4	5	4	13	3	4	7	4	4	8	28
61.	5	4	4	13	4	5	9	4	4	8	30
62.	5	5	4	14	4	5	9	4	4	8	31
63.	3	4	3	10	5	4	9	4	4	8	27
64.	3	4	3	10	5	5	10	4	4	8	28
65.	5	5	4	14	4	4	8	5	4	9	31
66.	4	4	4	12	4	4	8	4	4	8	28
67.	4	5	4	13	4	4	8	4	4	8	29
68.	5	4	4	13	4	4	8	4	3	7	28
69.	4	4	3	11	5	4	9	4	4	8	28
70.	5	4	4	13	4	5	9	5	5	10	32
71.	5	4	3	12	4	4	8	3	4	7	27
72.	5	4	5	14	4	4	8	4	5	9	31
73.	4	5	4	13	5	5	10	4	4	8	31
74.	5	4	4	13	5	5	10	4	5	9	32
75.	5	5	5	15	5	5	10	5	5	10	35
76.	5	5	4	14	4	4	8	4	5	9	31

Lanjutan Lampiran 2.

Sosialisasi Perpajakan (X ₁)											
No.	X _{1.1.1}	X _{1.1.2}	X _{1.1.3}	X _{1.1}	X _{1.2.1}	X _{1.2.2}	X _{1.2}	X _{1.3.1}	X _{1.3.2}	X _{1.3}	X ₁
77.	3	5	4	12	5	5	10	5	5	10	32
78.	5	5	5	15	5	5	10	5	4	9	34
79.	5	5	5	15	4	4	8	4	4	8	31
80.	5	5	3	13	4	5	9	1	1	2	24
81.	4	4	5	13	4	4	8	5	5	10	31
82.	5	5	5	15	5	5	10	5	5	10	35
83.	4	4	3	11	4	4	8	5	4	9	28
84.	4	4	3	11	5	4	9	4	5	9	29
85.	5	5	5	15	5	4	9	4	4	8	32
86.	4	4	3	11	4	3	7	3	4	7	25
87.	4	3	2	9	2	3	5	4	3	7	21
88.	4	4	5	13	5	5	10	5	4	9	32
89.	4	3	2	9	3	3	6	3	2	5	20
90.	4	4	4	12	5	5	10	4	4	8	30
91.	5	5	5	15	5	5	10	3	4	7	32
92.	3	4	3	10	3	4	7	4	3	7	24
93.	5	5	4	14	5	5	10	5	4	9	33
94.	5	5	5	15	4	4	8	3	3	6	29
95.	4	4	4	12	5	5	10	4	4	8	30
96.	5	5	4	14	4	5	9	4	5	9	32
97.	5	4	3	12	4	4	8	4	5	9	29
98.	5	5	5	15	4	4	8	3	3	6	29
99.	3	3	4	10	3	3	6	4	4	8	24
100.	4	4	4	12	4	4	8	2	3	5	25
Jml.	418	434	394	1246	423	418	841	401	406	807	2894

	X _{1.1.1}	X _{1.1.2}	X _{1.1.3}	X _{1.1}	X _{1.2.1}	X _{1.2.2}	X _{1.2}	X _{1.3.1}	X _{1.3.2}	X _{1.3}	Jumlah
SS	38	41	28	107	40	37	77	28	30	58	242
S	46	50	44	140	44	46	90	51	52	103	333
RG	14	9	22	45	15	15	30	16	13	29	104
TS	2	0	6	8	1	2	3	4	4	8	19
STS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2
Jumlah	100	100	100	300	100	100	200	100	100	200	700

Lampiran 3. Tabulasi Variabel Persepsi WP tentang Pelaksanaan SPN

Sensus Pajak Nasional (X ₂)														
No.	X _{2.1.1}	X _{2.1.2}	X _{2.1.3}	X _{2.1.4}	X _{2.1.5}	X _{2.1}	X _{2.2.1}	X _{2.2.2}	X _{2.2.3}	X _{2.2.4}	X _{2.2.5}	X _{2.2.6}	X _{2.2}	X ₂
1.	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	5	30	55
2.	5	4	5	3	4	21	5	4	4	5	3	5	26	47
3.	4	3	3	4	4	18	5	4	4	3	3	4	23	41
4.	4	5	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24	45
5.	3	4	3	3	3	16	3	2	4	3	3	4	19	35
6.	4	4	4	4	4	20	4	5	5	4	4	4	26	46
7.	3	3	3	1	3	13	4	2	2	2	2	2	14	27
8.	3	4	3	3	2	15	2	3	3	3	2	2	15	30
9.	4	4	4	4	4	20	5	5	5	4	5	4	28	48
10.	4	4	4	4	5	21	4	5	5	4	5	4	27	48
11.	4	4	4	4	4	20	5	5	5	5	4	4	28	48
12.	5	5	3	4	4	21	3	4	4	4	4	4	23	44
13.	5	4	3	4	5	21	3	5	4	3	3	4	22	43
14.	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	4	4	25	46
15.	4	5	4	5	5	23	5	5	5	5	4	4	28	51
16.	4	4	4	4	3	19	4	2	2	2	2	2	14	33
17.	3	3	3	1	3	13	3	5	4	5	3	2	22	35
18.	5	5	4	4	4	22	4	5	5	5	5	4	28	50
19.	5	5	5	5	4	24	4	4	4	4	4	4	24	48
20.	5	5	5	4	5	24	5	4	4	4	5	5	27	51
21.	5	4	4	4	5	22	4	5	5	4	4	4	26	48
22.	5	4	5	4	5	23	4	5	4	5	5	5	28	51
23.	5	5	4	4	4	22	5	5	5	5	4	5	29	51
24.	5	4	4	4	5	22	4	4	5	5	5	4	27	49
25.	4	4	5	4	4	21	4	4	4	4	4	5	25	46
26.	5	4	5	5	4	23	4	4	4	4	5	4	25	48
27.	3	4	3	4	3	17	3	4	5	4	3	4	23	40
28.	5	5	5	4	5	24	4	5	5	4	5	5	28	52
29.	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	26	48
30.	4	4	4	4	4	20	4	2	2	3	3	4	18	38
31.	4	4	4	4	4	20	5	4	4	4	4	4	25	45
32.	5	4	4	4	4	21	5	4	5	3	3	4	24	45
33.	4	4	5	4	3	20	3	3	4	4	3	3	20	40
34.	4	3	4	3	3	17	3	3	4	3	4	3	20	37
35.	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	5	5	27	48
36.	3	4	4	3	4	18	4	5	4	5	4	4	26	44
37.	2	3	2	3	2	12	2	3	3	4	5	2	19	31
38.	4	4	4	4	5	21	5	5	4	4	5	5	28	49

Lanjutan Lampiran 3.

Sensus Pajak Nasional (X ₂)														
No.	X _{2.1.1}	X _{2.1.2}	X _{2.1.3}	X _{2.1.4}	X _{2.1.5}	X _{2.1}	X _{2.2.1}	X _{2.2.2}	X _{2.2.3}	X _{2.2.4}	X _{2.2.5}	X _{2.2.6}	X _{2.2}	X ₂
39.	4	3	4	4	4	19	4	4	4	4	3	4	23	42
40.	4	4	4	4	5	21	5	5	4	4	5	5	28	49
41.	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	4	19	34
42.	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	5	5	30	51
43.	3	3	3	4	4	17	3	5	4	4	3	5	24	41
44.	4	3	4	4	5	20	5	4	5	4	4	5	27	47
45.	5	5	5	5	4	24	4	4	4	4	4	4	24	48
46.	3	4	4	3	5	19	4	4	5	4	4	5	26	45
47.	3	4	4	3	5	19	5	4	4	4	5	5	27	46
48.	4	5	5	4	4	22	4	5	5	4	4	4	26	48
49.	5	4	4	5	5	23	5	5	4	4	4	4	26	49
50.	5	4	4	4	5	22	4	4	3	4	5	3	23	45
51.	3	3	4	4	5	19	4	3	3	4	3	4	21	40
52.	4	4	4	4	5	21	5	4	4	4	5	4	26	47
53.	4	5	5	5	4	23	5	3	3	4	5	4	24	47
54.	4	4	5	4	5	22	5	5	4	4	4	5	27	49
55.	4	4	5	3	5	21	4	5	4	4	4	5	26	47
56.	5	4	4	5	5	23	4	3	4	4	4	5	24	47
57.	5	4	3	4	4	20	4	5	5	5	3	4	26	46
58.	3	3	3	3	3	15	3	3	3	4	3	3	19	34
59.	4	5	4	4	5	22	5	4	4	5	5	4	27	49
60.	4	3	3	4	4	18	4	3	4	4	4	3	22	40
61.	4	5	3	5	4	21	5	3	4	5	4	5	26	47
62.	3	4	4	3	4	18	4	4	5	4	4	4	25	43
63.	4	4	4	3	5	20	5	4	4	4	5	5	27	47
64.	3	4	4	3	5	19	5	4	4	4	5	5	27	46
65.	5	4	5	4	5	23	4	4	4	4	5	5	26	49
66.	4	4	4	4	5	21	5	5	5	5	5	5	30	51
67.	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	4	4	25	45
68.	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	3	3	22	42
69.	3	4	4	4	5	20	5	4	4	4	5	5	27	47
70.	4	4	4	4	4	20	4	5	4	4	5	4	26	46
71.	4	4	5	5	4	22	5	4	4	5	4	5	27	49
72.	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4	5	26	48
73.	4	4	4	4	5	21	5	4	5	4	5	5	28	49
74.	5	4	4	5	5	23	4	4	5	5	4	5	27	50
75.	4	4	4	5	5	22	4	4	4	5	5	5	27	49
76.	4	4	5	5	5	23	4	4	5	5	5	5	28	51

Lanjutan Lampiran 3.

Sensus Pajak Nasional (X ₂)														
No.	X _{2.1.1}	X _{2.1.2}	X _{2.1.3}	X _{2.1.4}	X _{2.1.5}	X _{2.1}	X _{2.2.1}	X _{2.2.2}	X _{2.2.3}	X _{2.2.4}	X _{2.2.5}	X _{2.2.6}	X _{2.2}	X ₂
77.	5	5	4	5	5	24	5	3	3	5	5	5	26	50
78.	4	4	4	4	4	20	4	5	5	5	5	5	29	49
79.	5	4	4	5	4	22	5	5	4	5	4	4	27	49
80.	2	2	4	4	4	16	4	1	5	5	2	4	21	37
81.	5	4	5	4	5	23	4	4	5	4	4	5	26	49
82.	5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	4	4	24	45
83.	3	3	3	4	4	17	3	4	4	3	4	3	21	38
84.	3	4	3	3	4	17	4	4	3	4	4	5	24	41
85.	4	4	4	5	5	22	4	4	4	4	4	5	25	47
86.	5	4	4	5	5	23	4	4	4	5	5	4	26	49
87.	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4	5	26	48
88.	4	4	4	4	5	21	4	4	4	4	4	5	25	46
89.	4	4	5	4	5	22	4	4	4	5	4	5	26	48
90.	4	4	5	4	5	22	4	4	5	4	4	5	26	48
91.	3	3	4	4	4	18	4	4	4	3	3	3	21	39
92.	5	4	4	5	5	23	4	4	4	5	4	5	26	49
93.	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	3	18	33
94.	3	3	3	3	3	15	4	3	3	3	3	3	19	34
95.	4	2	4	4	4	18	4	2	4	4	4	4	22	40
96.	5	3	4	5	5	22	4	4	5	4	4	5	26	48
97.	3	4	3	4	5	19	4	4	4	4	5	5	26	45
98.	4	4	4	4	4	20	4	3	3	4	4	5	23	43
99.	4	3	4	5	4	20	5	4	4	5	4	5	27	47
100.	4	4	5	4	5	22	5	4	4	5	5	4	27	49
Jml.	403	394	403	397	432	2029	417	401	411	414	406	424	2473	4502

	X _{2.1.1}	X _{2.1.2}	X _{2.1.3}	X _{2.1.4}	X _{2.1.5}	X _{2.1}	X _{2.2.1}	X _{2.2.2}	X _{2.2.3}	X _{2.2.4}	X _{2.2.5}	X _{2.2.6}	X _{2.2}	Jumlah
SS	28	16	24	20	47	135	33	29	29	30	33	44	198	333
S	49	64	56	61	40	270	53	50	56	56	44	41	300	570
RG	21	18	19	17	11	86	12	15	12	12	19	10	80	166
TS	2	2	1	1	2	8	2	5	3	2	4	5	21	29
STS	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	0	1	2
Jumlah	100	100	100	100	100	500	100	100	100	100	100	100	600	1100

Lampiran 4. Tabulasi Variabel Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran Wajib Pajak (Y)												
No.	Y _{1.1.1}	Y _{1.1.2}	Y _{1.1.3}	Y _{1.1.4}	Y _{1.1}	Y _{1.2.1}	Y _{1.2.2}	Y _{1.2.3}	Y _{1.2.4}	Y _{1.2.5}	Y _{1.2}	Jumlah
1.	5	5	4	4	18	4	4	4	4	4	20	38
2.	4	5	4	3	16	4	5	4	3	5	21	37
3.	4	4	4	4	16	4	4	5	4	4	21	37
4.	4	5	5	4	18	4	4	5	5	5	23	41
5.	4	4	4	3	15	3	3	4	4	4	18	33
6.	4	4	4	5	17	5	5	4	5	4	23	40
7.	4	4	4	4	16	4	4	2	3	3	16	32
8.	4	3	4	3	14	4	3	2	3	4	16	30
9.	4	5	5	5	19	4	4	4	4	5	21	40
10.	4	5	5	4	18	4	4	4	4	4	20	38
11.	4	4	5	5	18	5	5	5	4	5	24	42
12.	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	36
13.	3	3	2	3	11	3	3	2	3	3	14	25
14.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	5	21	41
15.	5	5	4	4	18	4	4	5	5	4	22	40
16.	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	27
17.	4	5	5	5	19	5	4	5	5	5	24	43
18.	4	4	4	5	17	5	5	5	4	4	23	40
19.	4	5	4	5	18	4	5	5	5	5	24	42
20.	5	5	4	4	18	4	5	5	4	5	23	41
21.	5	4	4	4	17	5	4	5	5	4	23	40
22.	4	5	5	5	19	4	4	5	5	5	23	42
23.	4	5	4	4	17	4	4	5	5	4	22	39
24.	5	4	4	4	17	5	5	4	5	5	24	41
25.	4	5	5	5	19	5	5	4	4	4	22	41
26.	5	5	4	4	18	5	5	5	4	4	23	41
27.	4	3	5	5	17	4	3	5	4	3	19	36
28.	4	4	4	4	16	5	4	5	4	5	23	39
29.	5	5	4	5	19	3	3	5	4	5	20	39
30.	3	3	3	4	13	4	3	3	4	4	18	31
31.	5	5	5	5	20	4	4	5	5	5	23	43
32.	3	4	4	3	14	4	3	4	4	4	19	33
33.	3	4	5	4	16	5	3	5	4	5	22	38
34.	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	20	37
35.	5	4	4	4	17	4	4	4	4	4	20	37
36.	4	5	4	4	17	3	3	3	4	4	17	34
37.	2	5	1	2	10	4	3	3	3	3	16	26
38.	5	3	4	4	16	5	3	4	4	5	21	37

Lanjutan Lampiran 4.

Kesadaran Wajib Pajak (Y)												
No.	Y _{1.1.1}	Y _{1.1.2}	Y _{1.1.3}	Y _{1.1.4}	Y _{1.1}	Y _{1.2.1}	Y _{1.2.2}	Y _{1.2.3}	Y _{1.2.4}	Y _{1.2.5}	Y _{1.2}	Jumlah
39.	4	5	3	4	16	4	4	4	5	4	21	37
40.	4	4	4	5	17	5	4	4	4	5	22	39
41.	4	4	4	4	16	4	3	3	3	3	16	32
42.	5	3	4	4	16	5	3	4	4	5	21	37
43.	4	3	4	4	15	4	3	4	4	5	20	35
44.	3	3	4	4	14	4	3	4	4	5	20	34
45.	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4	22	42
46.	4	4	4	5	17	3	4	4	4	5	20	37
47.	4	3	4	4	15	5	4	5	5	5	24	39
48.	5	5	5	5	20	4	4	4	4	4	20	40
49.	5	5	4	5	19	5	5	5	5	5	25	44
50.	3	4	3	2	12	4	2	3	3	3	15	27
51.	3	3	2	3	11	3	2	3	3	3	14	25
52.	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	36
53.	4	5	5	3	17	4	5	4	5	4	22	39
54.	3	3	3	3	12	3	3	4	4	4	18	30
55.	3	3	2	4	12	3	3	3	4	4	17	29
56.	3	4	3	3	13	2	3	3	3	4	15	28
57.	3	4	3	3	13	3	2	3	2	3	13	26
58.	3	3	3	3	12	3	3	3	3	3	15	27
59.	4	5	4	4	17	4	4	4	4	4	20	37
60.	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	36
61.	5	4	5	4	18	5	4	4	4	4	21	39
62.	5	3	3	4	15	4	4	3	4	4	19	34
63.	4	3	4	5	16	5	5	4	4	5	23	39
64.	5	3	4	4	16	5	3	4	4	5	21	37
65.	4	5	4	4	17	5	4	5	4	5	23	40
66.	5	4	5	4	18	5	4	5	5	5	24	42
67.	4	5	4	4	17	5	4	4	5	5	23	40
68.	4	4	4	3	15	3	4	4	4	4	19	34
69.	4	3	5	4	16	5	5	4	4	5	23	39
70.	5	4	4	5	18	5	4	5	4	5	23	41
71.	3	4	5	4	16	5	3	4	4	5	21	37
72.	4	4	4	5	17	4	5	5	4	5	23	40
73.	5	5	5	5	20	5	4	4	4	5	22	42
74.	4	4	5	5	18	3	4	4	5	5	21	39
75.	5	5	5	5	20	4	4	4	5	5	22	42
76.	4	4	4	5	17	5	4	4	4	5	22	39

Lanjutan Lampiran 4.

Kesadaran Wajib Pajak (Y)												
No.	Y _{1.1.1}	Y _{1.1.2}	Y _{1.1.3}	Y _{1.1.4}	Y _{1.1}	Y _{1.2.1}	Y _{1.2.2}	Y _{1.2.3}	Y _{1.2.4}	Y _{1.2.5}	Y _{1.2}	Jumlah
77.	5	5	5	4	19	5	5	5	4	3	22	41
78.	4	4	4	4	16	5	5	4	4	4	22	38
79.	5	5	5	5	20	5	5	4	4	4	22	42
80.	2	2	2	2	8	4	2	2	2	2	12	20
81.	5	5	5	4	19	5	5	5	5	5	25	44
82.	4	5	5	4	18	4	4	5	4	4	21	39
83.	4	4	4	3	15	3	4	4	4	3	18	33
84.	4	3	4	4	15	5	3	4	4	5	21	36
85.	5	5	5	4	19	4	4	4	4	5	21	40
86.	4	4	3	3	14	3	3	4	3	4	17	31
87.	3	2	3	4	12	4	2	2	3	4	15	27
88.	4	4	4	5	17	5	4	4	4	5	22	39
89.	2	2	2	3	9	2	2	2	2	4	12	21
90.	4	4	4	5	17	5	4	4	4	5	22	39
91.	5	5	5	5	20	5	5	5	5	5	25	45
92.	3	3	3	4	13	4	3	3	3	4	17	30
93.	3	3	3	4	13	4	3	3	3	3	16	29
94.	3	3	3	4	13	4	3	3	3	3	16	29
95.	5	5	2	4	16	4	4	4	4	4	20	36
96.	4	3	4	4	15	3	4	4	5	5	21	36
97.	3	3	4	4	14	5	3	4	4	5	21	35
98.	4	4	4	4	16	4	4	4	4	4	20	36
99.	3	2	3	3	11	3	4	3	3	4	17	28
100.	2	2	2	3	9	3	4	3	4	4	18	27
Jml.	400	402	395	404	1601	414	380	398	398	427	2017	3618

	Y _{1.1.1}	Y _{1.1.2}	Y _{1.1.3}	Y _{1.1.4}	Y _{1.1}	Y _{1.2.1}	Y _{1.2.2}	Y _{1.2.3}	Y _{1.2.4}	Y _{1.2.5}	Y _{1.2}	Jumlah
SS	28	27	27	28	110	36	20	27	21	43	147	257
S	48	44	50	51	193	44	46	50	59	42	241	434
RG	20	24	15	18	77	18	28	17	17	14	94	171
TS	4	5	7	3	19	2	6	6	3	1	18	37
STS	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1
Jumlah	100	100	100	100	400	100	100	100	100	100	500	900

Lampiran 5. Hasil Uji Validitas dan Uji Reliabilitas

Sosialisasi Perpajakan (X₁)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,862	7

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X _{1.1.1}	25,43	12,185	,825	,815
X _{1.1.2}	25,07	13,857	,634	,844
X _{1.1.3}	25,30	12,769	,635	,843
X _{1.2.1}	25,20	13,683	,597	,848
X _{1.2.2}	25,33	13,816	,580	,850
X _{1.3.1}	25,20	13,131	,574	,852
X _{1.3.2}	25,27	12,616	,613	,847

Persepsi Wajib Pajak tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X₂)

Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Total Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,916	11

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X _{2.1.1}	40,47	40,740	,703	,908
X _{2.1.2}	40,50	42,879	,568	,914
X _{2.1.3}	40,70	41,183	,627	,911
X _{2.1.4}	40,90	39,955	,619	,911
X _{2.1.5}	40,63	39,620	,758	,905
X _{2.2.1}	40,67	42,230	,498	,917
X _{2.2.2}	40,57	38,323	,678	,909
X _{2.2.3}	40,53	39,154	,684	,908
X _{2.2.4}	40,73	39,720	,678	,908
X _{2.2.5}	40,87	37,016	,841	,899
X _{2.2.6}	40,77	38,530	,779	,903

Kesadaran Wajib Pajak (Y)**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	30	100,0
	Excluded ^a	0	,0
	Total	30	100,0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
,874	9

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y _{1.1.1}	33,57	18,392	,532	,868
Y _{1.1.2}	33,40	16,731	,667	,856
Y _{1.1.3}	33,57	17,289	,631	,859
Y _{1.1.4}	33,53	17,292	,613	,861
Y _{1.2.1}	33,57	18,116	,527	,868
Y _{1.2.2}	33,67	17,264	,591	,863
Y _{1.2.3}	33,50	15,086	,717	,852
Y _{1.2.4}	33,60	17,352	,639	,859
Y _{1.2.5}	33,47	17,361	,626	,860

Lampiran 6. Hasil Uji Analisis Deskriptif

Statistik Deskriptif Sosialisasi Perpajakan (X₁)

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X _{1.1.1}	100	418	4,18	,744	,553
X _{1.1.2}	100	434	4,34	,639	,408
X _{1.1.3}	100	394	3,94	,862	,744
X _{1.2.1}	100	423	4,23	,737	,543
X _{1.2.2}	100	418	4,18	,757	,573
X _{1.3.1}	100	401	4,01	,835	,697
X _{1.3.2}	100	406	4,06	,827	,683
Valid N (listwise)	100				

**Statistik Deskriptif Persepsi Wajib Pajak tentang
Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional (X₂)**

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
X _{2.1.1}	100	403	4,03	,758	,575
X _{2.1.2}	100	394	3,94	,649	,421
X _{2.1.3}	100	403	4,03	,688	,474
X _{2.1.4}	100	397	3,97	,745	,555
X _{2.1.5}	100	432	4,32	,750	,563
X _{2.2.1}	100	417	4,17	,711	,506
X _{2.2.2}	100	401	4,01	,859	,737
X _{2.2.3}	100	411	4,11	,723	,523
X _{2.2.4}	100	414	4,14	,697	,485
X _{2.2.5}	100	406	4,06	,827	,683
X _{2.2.6}	100	424	4,24	,830	,689
Valid N (listwise)	100				

Statistik Deskriptif Kesadaran Wajib Pajak (Y)

Descriptive Statistics

	N	Sum	Mean	Std. Deviation	Variance
Y _{1.1.1}	100	400	4,00	,804	,646
Y _{1.1.2}	100	402	4,02	,899	,808
Y _{1.1.3}	100	395	3,95	,892	,795
Y _{1.1.4}	100	404	4,04	,764	,584
Y _{1.2.1}	100	414	4,14	,779	,606
Y _{1.2.2}	100	380	3,80	,829	,687
Y _{1.2.3}	100	398	3,98	,829	,686
Y _{1.2.4}	100	398	3,98	,710	,505
Y _{1.2.5}	100	427	4,27	,737	,543
Valid N (listwise)	100				

Lampiran 7. Hasil Pengolahan Data dan Pengujian Hipotesis

Variables Entered/Removed^a

Model	Variables Entered	Variables Removed	Method
1	X ₂ , X ₁ ^b	.	Enter

a. Dependent Variable: Y₁

b. All requested variables entered.

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,775 ^a	,601	,593	3,480

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	1767,826	2	883,913	72,974	,000 ^b
	Residual	1174,934	97	12,113		
	Total	2942,760	99			

a. Dependent Variable: Y₁b. Predictors: (Constant), X₂, X₁**Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	-1,157	3,388		-,342	,733		
	X ₁	1,006	,101	,687	9,912	,000	,858	1,166
	X ₂	,183	,069	,184	2,656	,009	,858	1,166

a. Dependent Variable: Y₁**Collinearity Diagnostics^a**

Model	Dimension	Eigenvalue	Condition Index	Variance Proportions		
				(Constant)	X ₁	X ₂
1	1	2,983	1,000	,00	,00	,00
	2	,010	17,606	,02	,85	,50
	3	,007	20,678	,98	,15	,50

a. Dependent Variable: Y₁**Residuals Statistics^a**

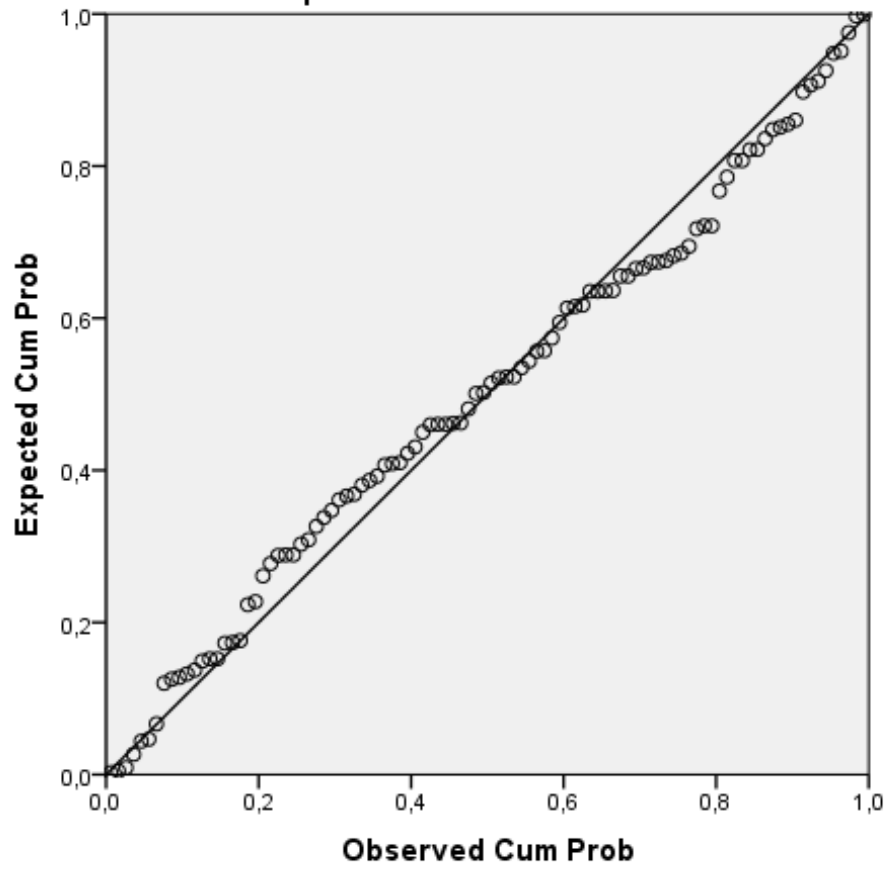
	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation	N
Predicted Value	20,88	43,00	36,18	4,226	100
Residual	-9,745	11,123	,000	3,445	100
Std. Predicted Value	-3,621	1,615	,000	1,000	100
Std. Residual	-2,800	3,196	,000	,990	100

a. Dependent Variable: Y₁

Charts

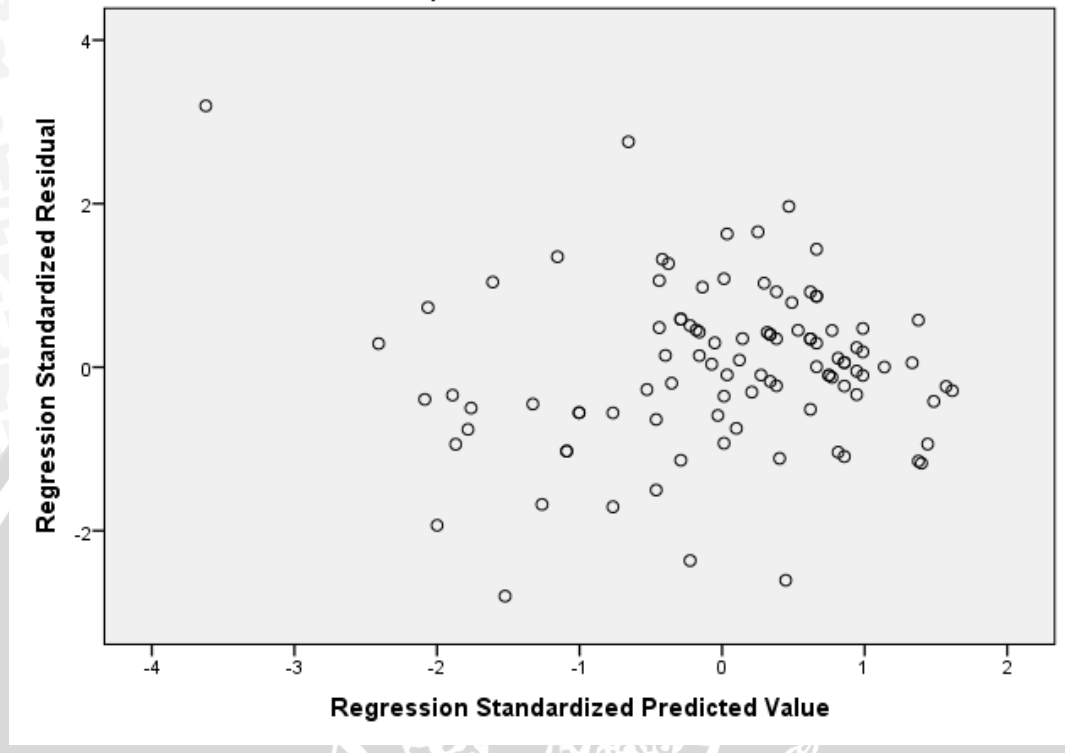
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual

Dependent Variable: Y



Scatterplot

Dependent Variable: Y



Lampiran 8. Tabel r

df = 1 - 50

df = (N - 2)	0.05	df = (N - 2)	0.05
1.	0.9877	26.	0.3172
2.	0.9000	27.	0.3115
3.	0.8054	28.	0.3061
4.	0.7293	29.	0.3009
5.	0.6694	30.	0.2960
6.	0.6215	31.	0.2913
7.	0.5822	32.	0.2869
8.	0.5494	33.	0.2826
9.	0.5214	34.	0.2785
10.	0.4973	35.	0.2746
11.	0.4762	36.	0.2709
12.	0.4575	37.	0.2673
13.	0.4409	38.	0.2638
14.	0.4259	39.	0.2605
15.	0.4124	40.	0.2573
16.	0.4000	41.	0.2542
17.	0.3887	42.	0.2512
18.	0.3783	43.	0.2483
19.	0.3687	44.	0.2455
20.	0.3598	45.	0.2429
21.	0.3515	46.	0.2403
22.	0.3438	47.	0.2377
23.	0.3365	48.	0.2353
24.	0.3297	49.	0.2329
25.	0.3233	50.	0.2306

Lampiran 9. Angket Penelitian Skripsi**ANGKET PENELITIAN SKRIPSI**

Perihal : Permohonan menjadi responden
Kepada : Yth. Bapak/Ibu/Saudara/i selaku Wajib Pajak Orang Pribadi Terdaftar di KPP
Pratama Banyuwangi

Dengan hormat, dalam rangka menunjang kegiatan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul "*Pengaruh Sosialisasi Perpajakan Dan Persepsi Wajib Pajak Tentang Pelaksanaan Sensus Pajak Nasional Terhadap Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Orang Pribadi (Survei Terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi Di Wilayah Banyuwangi)*" yang dilakukan oleh peneliti selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Program Studi Perpajakan Universitas Brawijaya Malang. Mohon Bapak/Ibu/Sadara/i bersedia meluangkan waktu untuk memberikan pendapat melalui angket yang telah disediakan.

Hasil penelitian ini hanya diperuntukkan bagi keperluan penyusunan skripsi yang merupakan tugas akhir bagi mahasiswa S1 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penelitian ini tidak ditujukan untuk kepentingan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), sehingga respon Bapak/Ibu/Saudara/i tidak akan berpengaruh pada sistem administrasi perpajakan Bapak/Ibu/Saudara/i di KPP Pratama Banyuwangi. Jawaban Bapak/Ibu/Saudara/i tidak dipublikasikan dan bersifat rahasia.

Atas Perhatian dan kesediaan Bapak/Ibu/Saudara/i dalam meluangkan waktu untuk mengisi anket ini, peneliti mengucapkan terima kasih.

Malang, 6 Maret 2014

Peneliti



Herlambang Kurniawan
NIM. 105030400111058

Komisi Pembimbing



Dr. Srikandi Kumadji, MS
NIP. 19611110 198601 2 002

Komisi Pembimbing



Dra. Fransisca Yaningwati, M.Si
NIP. 19530919 198010 2 001

A. IDENTITAS

Petunjuk Pengisian Identitas

1. Mengisi Identitas sesuai dengan pertanyaan yang tersedia.
2. Untuk jenis kelamin, pekerjaan, kepemilikan NPWP dan tahun sensus, mohon memilih jawaban dengan cara memberi tanda centang/cek list (✓) pada kolom yang tersedia.

1. Nama :*(Boleh tidak diisi)

2. Umur :tahun

3. Jenis Kelamin : Laki-laki Perempuan

4. Pendidikan terakhir :

5. Jenis Pekerjaan :

Karyawan Perusahaan

Pegawai Negeri

Wiraswasta

Lain-lain :

6. Nama Instansi/Badan Usaha :*(Boleh tidak diisi)

7. Alamat

.....

8. Status Kepemilikan NPWP

Ya Tidak

9. Tahun Sensus Pajak Nasional

2011 2012 2013 belum disensus

B. PERNYATAAN**Petunjuk Pengisian Jawaban**

1. Bapak/Ibu/Saudara/i cukup memilih salah satu jawaban pada kolom yang tersedia dengan cara memberi tanda centang/*cek list* (√).
2. Pilihan jawaban yang tersedia adalah Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (RG), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS).
3. Jika Bapak/Ibu/Saudara/i tidak mempunyai jawaban yang tepat, mohon untuk memilih jawaban yang paling mendekati dengan pendapat Bapak/Ibu/Saudara/i.
4. Mohon Bapak/Ibu/Saudara/i menjawab tanpa pengaruh dari pihak manapun.

SOSIALISASI PERPAJAKAN						
ITEM	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RG	TS	STS
X _{1.1.1}	Sosialisasi Perpajakan dapat memberikan kesadaran perpajakan kepada Wajib Pajak (WP) mengenai pajak.					
X _{1.1.2}	Sosialisasi Perpajakan diperlukan agar tercipta pengetahuan perpajakan kepada WP.					
X _{1.1.3}	Sosialisasi Perpajakan diterapkan untuk meningkatkan ketertarikan WP terhadap pajak.					
X _{1.2.1}	Metode pelaksanaan Sosialisasi Perpajakan secara intensif, akan semakin meningkatkan kesadaran WP mengenai pajak.					
X _{1.2.2}	Metode Sosialisasi Perpajakan yang jelas dan terarah, akan mudah untuk dipahami WP.					
X _{1.3.1}	DJP memberikan informasi perpajakan yang tepat dan akurat kepada WP.					
X _{1.3.2}	DJP memberikan kemudahan kepada WP dalam memperoleh informasi perpajakan.					
SENSUS PAJAK NASIONAL (SPN)						
X _{2.1.1}	Sensus Pajak Nasional (SPN) dapat menyadarkan WP untuk membayar pajak.					
X _{2.1.2}	SPN mampu menjaring WP baru.					
X _{2.1.3}	SPN dapat Membantu DJP dalam memutakhirkan basis data masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak.					
X _{2.1.4}	Dengan adanya SPN, pembinaan terhadap WP akan semakin mudah.					
X _{2.1.5}	SPN dapat memberikan edukasi kepada WP, mengenai hak dan kewajiban perpajakannya.					
X _{2.2.1}	SPN diperlukan agar tercipta keadilan dalam memenuhi kewajiban perpajakan.					

ITEM	PERNYATAAN	JAWABAN				
		SS	S	RG	TS	STS
X2.2.2	Dengan berpartisipasi dalam pelaksanaan SPN dapat mewujudkan pemerataan pembangunan.					
X2.2.3	SPN mendukung pencapaian target dan pengamanan penerimaan Negara dari sektor pajak.					
X2.2.4	SPN dapat menyiapkan data yang akurat atas daerah yang berpotensi pajak.					
X2.2.5	SPN dapat meningkatkan pelayanan DJP kepada WP yang berkeadilan.					
X2.2.6	SPN dapat membantu DJP melakukan sosialisasi perpajakan secara langsung kepada WP.					
KESADARAN PERPAJAKAN						
Y1.1.1	Apabila telah memenuhi syarat perpajakan dan berpenghasilan, WP harus berinisiatif untuk membayar pajak.					
Y1.1.2	Membayar pajak merupakan kewajiban WP sebagai Warga Negara.					
Y1.1.3	Sebagai Warga Negara WP harus membayar Pajak dengan Sukarela					
Y1.1.4	Pajak merupakan wujud partisipasi WP dibidang pembangunan dan/atau untuk mendanai pengeluaran umum pemerintah.					
Y1.2.1	Dengan adanya sosialisasi perpajakan yang rutin, WP harus melaporkan kewajiban pajaknya lebih tepat waktu.					
Y1.2.2	WP memiliki kewajiban untuk melaporkan seluruh penghasilan, ketika berpartisipasi dalam pelaksanaan SPN.					
Y1.2.3	Setelah mengikuti sosialisasi perpajakan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan SPN, WP harus memiliki tanggungjawab dalam menyetor pajak.					
Y1.2.4	Setelah mengikuti sosialisasi perpajakan dan berpartisipasi dalam pelaksanaan SPN, WP wajib melapor kewajiban pajaknya.					
Y1.2.5	Dengan adanya sosialisasi perpajakan dan SPN, WP mengetahui fungsi dan manfaat pajak bagi Negara.					

Terima kasih

Lampiran 10. Surat Balasan Izin Penelitian dan Jawaban Permintaan Data



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III

JALAN LETJEN S. PARMAN No.100 MALANG KODE POS 65122
 TELEPON (0341) 403333 . 403461-62: FAKSIMILE (0341) 403463; SITUS www.pajak.go.id
 LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK 500200
 E-MAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S- 868 /WPJ.12/2014 26 Maret 2014
 Sifat : Segera
 Lampiran : 1 (satu) set
 Hal : Pemberian Izin Riset
 a.n. Herlambang Kurniawan, NPM 105030400111058

Yth. Sekretaris Program Studi Perpajakan
 Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang
 Jl. MT. Haryono No. 163 Malang

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor: 3395/UN10.3/PG/2014 tanggal 6 Maret 2014 hal Riset/Survey, atas :

Nama / NPM : Herlambang Kurniawan / 105030400111058

dengan ini Kantor Wilayah DJP Jawa Timur III memberikan izin kepada mahasiswa yang bersangkutan untuk melaksanakan penelitian dan/atau riset di KPP Pratama Banyuwangi, sepanjang bahan-bahan keterangan/data yang didapat digunakan untuk keperluan akademis yang tidak untuk dipublikasikan dan tidak menyangkut rahasia jabatan/Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan.

Setelah selesai melaksanakan riset/penelitiannya, mahasiswa yang bersangkutan agar dapat memberikan satu *softcopy* hasil riset/penelitian tersebut untuk menjadi masukan bagi kami. *Softcopy* dimaksud dapat dikirim melalui email ke alamat sebagai berikut: perpustakaan@pajak.go.id

Demikian agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Kantor,


 Budi Susanto
 NIP 197004031995031001

Tembusan :
 Mahasiswa yang bersangkutan.

Kp.:BD.05/BD.0503





KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

JL. ADI SUCIPTO NO. 27 BANYUWANGI
TELEPON (0333) 428451 ; FAKSIMILE (0333) 428451; SITUS www.pajak.go.id
LAYANAN INFORMASI DAN KELUHAN KRING PAJAK (021) 500200;
EMAIL pengaduan@pajak.go.id

Nomor : S - 018 / WPJ.12/KP.0802/2014

April 2014

Lampiran : 1 Set

Perihal : Jawaban Permintaan Data

Yth. Sdr. Herlambang Kurniawan
Mahasiswa Brawijaya NPM 105030400111058
Di Malang

Sehubungan dengan surat Dari Kanwil DJP Jawa Timur III Nomor: S-868/WPJ.12/2014 Tanggal 26 Maret 2014 perihal Pemberian Izin Penelitian dan/atau Riset di KPP Pratama Banyuwangi atas surat yang Saudara ajukan dengan Nomor Surat 3395/UN10.3/PG/2013 Tanggal 6 Maret 2014 hal ljin Pemberian Data, maka dalam lampiran surat ini kami sampaikan jawaban data yang saudara minta.

Untuk selanjutnya saudara dapat mempergunakan data tersebut sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan ketentuan Pasal 34 Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan Nomor 16 Tahun 2009 sebagaimana surat ijin Kepala Kanwil DJP Jawa Timur III diatas.

Demikian disampaikan dan dipergunakan untuk semestinya.



Kepala Seksi PDI

Hendry Susanto

NIP.105902121984031001

Tembusan:

1. Kepala Kantor
2. Arsip



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI

Jalan Adi Sucipto No. 27 Telp. (0333) 423451, Fax: (0333) 428452, Banyuwangi 68416, Homepage: www.pajak.go.id

Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi berdiri pada tanggal 10 Oktober 1989, Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi adalah pecahan dari Kantor Pelayanan Pajak Jember, sedangkan Kantor Perpajakan di Kabupaten Banyuwangi sebelumnya adalah Kantor Dinas Luar Pajak yang berlokasi di jalan Kartini Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan berlokasi di jalan Adi Sucipto. Maka mulai tanggal 10 Oktober 1989 berdirilah Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi yang menempati gedung kantor yang statusnya menyewa berlokasi di jalan Brawijaya Banyuwangi.

Atas perjuangan pejabat Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi dan Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan pada waktu itu ke Kantor Pusat DJP untuk memiliki gedung kantor sendiri, di tahun 1999 Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi mempunyai gedung baru yang strategis di jantung kota Banyuwangi yang memudahkan bagi Wajib Pajak untuk melakukan administrasi perpajakan yang berlokasi di jalan Adi Sucipto No.27 Banyuwangi dan diresmikan pada tanggal 1 Agustus 1999. Satu gedung kantor satu atap tersebut ditempati 2 (dua) kantor terdiri dari :

- Kantor Pelayanan Pajak Banyuwangi;
- Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan.

Sejak tanggal 31 Mei 2007 terbit Peraturan Pemerintah yang merombak Direktorat Jenderal Pajak menjadi Institusi yang modern. Maka kedua kantor tersebut digabung menjadi satu dengan pelayanan satu atap bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang mempunyai :

Visi Direktorat Jenderal Pajak

"Menjadi institusi pemerintah penghimpun pajak negara yang terbaik di wilayah Asia Tenggara."

Misi Direktorat Jenderal Pajak

"Menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat."

Nilai-Nilai Kementerian Keuangan

Integritas

"Berpikir, berkata, berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip moral."

Professionalisme

"Bekerja tuntas dan akurat atas dasar kompetensi terbaik dengan penuh tanggung jawab dan komitmen yang tinggi."

Sinergi

"membangun dan memastikan hubungan kerja sama internal yang produktif serta kemitraan yang harmonis dengan para pemangku kepentingan untuk menghasilkan karya yang bermanfaat dan berkualitas."

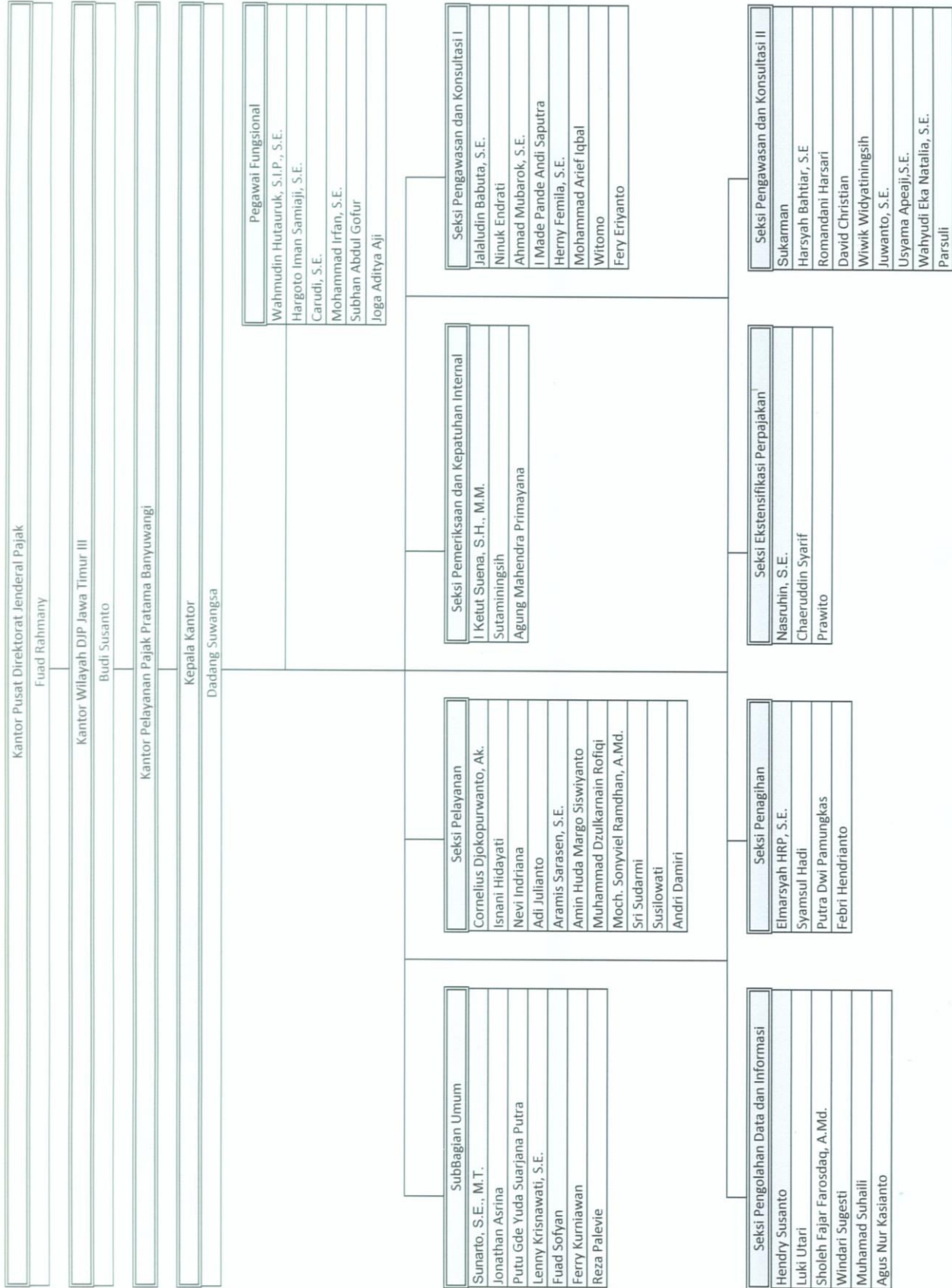
Pelayanan

"Memberikan layanan yang memenuhi kepuasan pemangku kepentingan yang dilakukan dengan sepenuh hati, transparan, cepat, akurat dan aman."

Kesempurnaan

"Senantiasa melakukan upaya perbaikan di segala bidang untuk menjadi dan memberikan yang terbaik."





Lampiran

Surat S- /WPJ.12/KP.0802/2014

Tagl. April 2014

3. Rincian Jumlah Seluruh WP Terdaftar di KPP Pratama Banyuwangi per Kecamatan per 8 April 2014

KECAMATAN	sd. 2009	2010	2011	2012	2013	2014	Grand Total
BANGOREJO	1.404	376	277	262	329	179	2.827
BANYUWANGI	12.543	2.893	1.916	1.671	1.638	545	21.206
CLURING	1.960	598	475	416	567	257	4.273
GAMBIRAN	2.367	618	471	388	493	198	4.535
GENTENG	3.762	929	734	594	854	263	7.136
GIRI	1.754	486	330	266	323	108	3.267
GLAGAH	1.415	350	291	245	293	84	2.678
GLENMORE	1.834	429	346	409	400	182	3.600
KABAT	1.353	484	445	313	427	189	3.211
KALIBARU	1.673	267	282	283	302	119	2.926
KALIPURO	2.471	120	121	555	593	344	4.204
LICIN	176	24	46	98	102	56	502
MUNCAR	3.006	775	648	480	535	374	5.818
PESANGGARAN	1.612	770	494	242	271	92	3.481
PURWOHARJO	1.726	522	478	338	378	242	3.684
ROGOJAMPI	3.196	808	642	532	659	275	6.112
SEMPU	879	78	62	354	382	170	1.925
SILIRAGUNG	309	65	117	144	208	127	970
SINGOJURUH	985	296	269	205	214	110	2.079
SONGGON	784	208	264	210	248	153	1.867
SRONO	2.183	661	711	405	502	256	4.718
TEGAL DLIMO	1.081	355	416	356	329	370	2.907
TEGALSARI	327	60	113	171	194	133	998
WONGSOREJO	1.422	302	265	274	306	281	2.850
Grand Total	50.222	12.474	10.213	9.211	10.547	5.107	97.774

Kepala Seksi PDI
 Hendry Susanto
 NIP. 195902121984031001



Lampiran
 Surat S- /WPJ.12/KP.0802/2014
 Tagl. April 2014

4. Jumlah Target dan Realisasi responden yang disensus pada pelaksanaan Sensus Pajak Nasional di Kabupaten Banyuwangi

Tahun Sensus	Jumlah Target	Realisasi Responden	Prosentase
2011	4.400	3.362	76,41
2012	15.000	12.999	86,66
2013	2.500	2.558	102,32



Kepala Seksi PDI

Hendry Susanto
 NIP. 95902121984031001





PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Letkol Istiqlah Nomor 68 Telepon (0333 – 424234)
Web: www.banyuwangikab.go.id e-mail: dispenduduk@banyuwangikab.go.id
BANYUWANGI

Banyuwangi, 7 April 2014

Nomor : 470/186/429.115/2014.
Sifat : Biasa.
Lampiran : -
Perihal : Data Penduduk dan KK

K e p a d a
Yth. Sdr. Dekan Fakultas Ilmu
Administrasi
Universitas Brawijaya
di
M A L A N G

Memperhatikan surat Saudara tanggal 6 Maret 2014 nomor : 3194/UN
10.3/PG/2014, perihal permintaan data jumlah penduduk dan kepala keluarga,
sehubungan dengan hal tersebut dengan ini disampaikan data dimaksud untuk jumlah
penduduk dan kepala keluarga Kabupaten Banyuwangi sebagaimana terlampir.

Demikian untuk menjadi maklum.

A.n. Kepala Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Banyuwangi
Sekretaris



ZAINUL KOMARY, S. Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19581027 198003 1 006



JUMLAH PENDUDUKAN DAN KEPALA KELUARGA
KABUPATEN BANYUWANGI

No.	Kecamatan	TAHUN 2009		TAHUN 2010		TAHUN 2011		TAHUN 2012		TAHUN 2013	
		JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK	JUMLAH PENDUDUK	JUMLAH KK
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Pesanggaran	48,356	-	48,052	-	48,052	21,928	51,216	21,936	51,030	24,036
2	Bangorejo	68,978	-	69,010	-	69,010	25,952	64,486	25,972	64,338	28,493
3	Purwoharjo	65,706	-	65,675	-	65,745	27,694	67,757	27,698	67,693	29,512
4	Tegaldlimo	65,507	-	66,571	-	66,489	23,641	59,656	23,691	59,646	24,839
5	Muncar	125,696	-	125,996	-	126,113	47,185	126,864	47,998	126,713	51,600
6	Cluring	70,166	-	70,191	-	70,248	27,536	69,922	27,546	70,072	29,384
7	Gambiran	63,206	-	63,256	-	63,378	22,241	59,393	22,260	59,515	24,338
8	Srono	90,488	-	90,117	-	89,854	36,122	89,678	36,131	89,394	39,255
9	Genteng	85,859	-	87,007	-	87,399	33,855	86,144	33,859	86,109	33,671
10	Glenmore	71,104	-	71,086	-	71,110	28,449	76,505	28,451	76,267	30,655
11	Kalibaru	57,887	-	58,348	-	58,653	27,351	73,476	27,359	73,804	29,920
12	Singojuruh	48,072	-	48,031	-	47,975	20,551	46,008	20,574	46,071	20,474
13	Rogojampi	100,317	-	100,101	-	99,578	38,401	91,757	38,446	91,395	41,268
14	Kabat	78,962	-	79,316	-	79,805	27,783	68,857	27,798	68,889	30,315
15	Glagah	33,932	-	34,070	-	34,375	13,832	30,677	13,884	30,739	14,882
16	Banyuwangi	101,558	-	101,648	-	101,889	43,285	115,156	45,297	115,313	46,752
17	Giri	29,297	-	29,385	-	29,460	11,148	26,457	11,188	26,604	11,917
18	Wongsorejo	69,977	-	70,011	-	70,120	35,805	84,952	35,886	84,957	37,360
19	Songgon	51,132	-	51,043	-	51,107	21,710	51,211	21,783	51,395	22,521
20	Sempu	76,420	-	76,697	-	76,735	29,959	76,627	30,453	76,678	31,929
21	Kalipuro	74,356	-	74,483	-	74,643	41,778	90,241	41,801	90,454	41,467
22	Siliragung	52,733	-	52,131	-	51,876	18,163	47,265	18,279	47,041	19,443
23	Tegalsari	48,190	-	48,121	-	47,948	16,551	45,623	16,607	45,496	18,291
24	Licin	32,938	-	32,953	-	32,920	11,802	27,541	11,911	27,517	13,375
	Jumlah	1,610,837	-	1,613,474	-	1,614,482	652,722	1,627,469	656,808	1,627,130	695,697

Banyuwangi, 7 April 2014
A.n. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN BANYUWANGI

SEKRETARIS



ZAINUL KOMARY, S. Sgs

Pembina Tingkat I

NIP. 19581027 198003 1 006



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA TIMUR III
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BANYUWANGI
Jalan Adi Sucipto No. 27 Telp. (0333) 423451, Fax: (0333) 428452, Banyuwangi 68416, Homepage: www.pajak.go.id

SURAT KETERANGAN

Nomor : KET- 71 /WPJ.12/KP.08/2014

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dadang Suwangsa
NIP : 195805161985031001
Pangkat : Pembina (IV/a)
Jabatan : Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi

Dengan ini kami menerangkan bahwa mahasiswa yang dibawah ini :

Nama : Herlambang Kurniawan
NIM : 105030400111058
Program Studi : Perpajakan
Lembaga Pendidikan : Universitas Brawijaya, Malang

Benar-benar telah melakukan penelitian kerja di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banyuwangi yang dilaksanakan mulai tanggal 29 April 2014 s.d 05 Mei 2014.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya, apabila dikemudian hari ditemukan kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Banyuwangi, 05 Mei 2014
Kepala Kantor,



Dadang Suwangsa
NIP. 195805161985031001

Visi : " Menjadi institusi pemerintah yang menyelenggarakan system administrasi perpajakan modern yang efektif, efisien dan dipercaya masyarakat dengan integritas dan profesionalisme yang tinggi."

Kp: WPJ.12/KP.0801



Curriculum Vitae

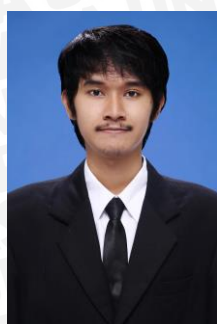
No.	Data Pribadi	
1.	Nama Lengkap	Herlambang Kurniawan
2.	Tempat dan tanggal lahir	Banyuwangi, 16 juli 1991
3.	Jenis Kelamin	Laki – laki
4.	Agama	Islam
5.	Alamat Asal	Jl. Raya Grajagan, Dsn. Kaliboyo RT 1/RW 2, Ds. Kradenan, Kec. Purwoharjo, Kab. Banyuwangi
6.	Domisili	Jl. MT Haryono, Gg. Brawijaya 06, 105D, Malang
7.	Telepon	085655821443
8.	Email	Herlambangk20@gmail.com

No.	Pendidikan	Tahun Masuk	Tahun Lulus
1.	SD Negeri 1 Kradenan	1998	2004
2.	SMP Negeri 1 Purwoharjo	2004	2007
3.	SMA Negeri 1 Purwoharjo	2007	2010
4.	Universitas Brawijaya Malang	2010	2014

No.	Pengalaman Kerja	Periode
1.	Magang di KPP Pratama Banyuwangi	1 Juli – 30 Agustus 2013

No.	Organisasi	Jabatan	Periode
1.	Korp Sukarela Univ. Brawijaya (KSR UB)	Anggota Biasa	2012
2.	Korp Sukarela Univ. Brawijaya (KSR UB)	Pengmasy	2013

No.	Kepanitiaan	Penyelenggara	Divisi	Tahun
1.	Himafutsal	Himabis	Kestari	2010
2.	PK2MU Raja Brawijaya	EM UB	Pendamping	2011
3.	Olimpiade Brawijaya	EM UB	Transkoper	2011
4.	Olimpiade Brawijaya	EM UB	DDM	2012
5.	Baksos Muda KSR UB	KSR UB	Konsumsi	2012
6.	HUT KSR UB 32	KSR UB	Co. Transperkap	2012
7.	Satuan Gerak Penunjang Penanggulangan Bencana	KSR UB	Co. PDD	2013
8.	Baksos Desa KSR UB	KSR UB	PDD	2013



No.	Pelatihan/Sertifikasi	Tahun
1.	<i>Tax Goes to Campus</i>	2011
2.	<i>Microsoft Office Desktop Training</i>	2012
3.	Manajemen Pertolongan Darurat di Lapangan	2012
4.	Studi Praktik (<i>The Journey of Taxation</i>)	2013
5.	IC ³ – <i>Computing Fundamentals</i>	2014
6.	IC ³ – <i>Living Online</i>	2014
7.	TOEIC	2014
8.	Pelatihan Brevet A, B dan C	2014

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

